

15 TAHUN



SEBUAH MEKANISME YANG BUSUK HINGGA KE AKARNYA

15 Tahun REDD

Sebuah Mekanisme yang Busuk hingga ke Akarnya

Penulis: Boaventura Monjane, Chris Lang, Dercy Teles de Carvalho, Euridse Samuel, Izzuddin Prawiranegara, Joanna Cabello, Jutta Kill, Larry Lohmann, Letícia Yawanawa, Muyissi Environnement, Natacha Bruna, Prince Lungungu, Tamra L. Gilbertson, Tom Goldtooth dan WRM Sekretariat.

Editor: Joanna Cabello dan Jutta Kill

Tata letak dan ilustrasi: Edições Athena

Publikasi ini juga tersedia dalam bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris.

Gerakan Hutan Hujan Dunia
(World Rainforest Movement)
2022

Pekerjaan ini terwujud berkat kontribusi dari Misereor/KZE (Jerman), Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia (Sida) melalui Masyarakat Konservasi Alam Swedia (SSNC), dan Bread for All dari Swiss. Pandangan yang diungkapkan di sini bukan pendapat resmi kontributor atau penyandang dana mereka.



Gerakan Hutan Hujan Dunia

Av Bolivia 1962 BIS

CP 11500 – Montevideo, Uruguay

Telp.: +598 2605 6943

Email: wrm@wrm.org.uy

www.wrm.org.uy

Indeks

- 4** **Kata pengantar**
SEKRETARIAT WRM
- 6** **Panduan tentang Beberapa Istilah yang
Digunakan dalam Publikasi ini**
- 11** **REDD: Lebih dari sekedar kegagalan**
JUTTA KILL
- 14** **Ada Apa di balik Huruf R-E-D-D?**
- 27** **Apakah Semua Karbon Sama?**
Karbon Fossil, Kekerasan dan Kekuasaan
JOANNA CABELLO
- 32** **Mengakhiri Kolonialisme dengan Mengakhiri REDD+**
LARRY LOHMANN
- 37** **Bukan Hanya Tanah...**
Mereka Juga Merampas Identitas Kami
WAWANCARA DENGAN TOM GOLDTOOTH
- 46** **10 Tahun REDD+ di Acre dan Dampaknya terhadap Perempuan
Adat dan Ekstrativista Perempuan**
WAWANCARA DENGAN LETÍCIA YAWANAWA DAN DERCY TELES DE CARVALHO
- 54** **Batubara Berdarah untuk Karbon Berdarah di Kolombia:
Perluasan Pajak Karbon melalui REDD+ Bukti Kegagalan Penetapan
Harga Karbon**
TAMRA L. GILBERTSON
- 61** **Proyek REDD+ Katingan di Indonesia:
Komodifikasi Alam, Tenaga Kerja dan
Reproduksi Masyarakat**
IZZUDIN PRAWIRANEGARA
- 69** **Warisan Proyek Karbon Komunitas di
Nhambita, Mozambik:**
Nostalgia, Kekecewaan, dan Kemarahan
BOAVENTURA MONJANE, NATACHA BRUNA DAN EURIDSE SAMUEL
- 77** **Proyek PIREDD/Plateaux REDD+ di
Mai-Ndombe, DRC:
Konflik dan Mekanisme Pengaduan**
PANGERAN LUNGUNGU
- 86** **Bahaya bagi Komunitas dan Iklim:
Bukan “Solusi Berbasis Alam” di Gabon**
MUYISSI ENVIROMENTAL DAN WRM
- 97** **Antara Pencemar Besar, Penyeimbangan Karbon, dan REDD+**
CHRIS LANG
- 108** **Bacaan yang Direkomendasikan**

Kata pengantar

Sejak diperkenalkan pada tahun 2007, program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan / Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) telah menjadi kebijakan hutan yang dominan di seluruh dunia, yang berdampak pada masyarakat yang bergantung pada hutan di negara-negara khususnya negara dengan hutan tropis.

Pengalaman selama 15 tahun terakhir telah menunjukkan catatan besar bencana kegagalan oleh REDD untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan – dan lebih buruk lagi: REDD juga telah mengintensifkan krisis iklim dan membiarkan penyebab deforestasi tak tersentuh. Nyatanya REDD telah menjadi penyebab mendasar dari deforestasi dan perubahan iklim itu sendiri.

Selama 15 tahun, REDD telah membantu menyembunyikan kejahatan proyek penggantian kerugian karbon melalui akuntansi karbon ‘kreatif’, propaganda ‘hijau’ dan komitmen iklim tanpa akhir yang dibuat oleh perusahaan dan pemerintah berdasarkan janji yang menyesatkan dan palsu.

Fakat ini seharusnya tidak mengejutkan karena logika inti dari skema ini busuk.

Hal ini memungkinkan pihak-pihak pendorong utama polusi dan deforestasi untuk melanjutkan dan memperluas bisnis mereka secara legal. Ini adalah logika yang memungkinkan perusahaan pencemar, pemerintah dan elit untuk menyangkal bahwa ekstraksi bahan bakar fosil adalah akar dari krisis iklim, dan menipu banyak orang untuk percaya bahwa masalah sedang ditangani dan tidak ada yang benar-benar harus diubah. Ini adalah logika yang didasarkan pada penindasan kolonial, rasis dan patriarki, dengan menyalahkan mereka yang telah menjaga dan melindungi hutan dan ruang kehidupan lainnya dari generasi ke generasi. Perusahaan-persaan ini memperlakukan mereka karena mempertahankan kegiatan, mata pencaharian, dan kepercayaan leluhur mereka, dan menolak akses masyarakat ini ke wilayah mereka sendiri.

Selama 15 tahun, REDD telah membantu menyembunyikan kejahatan proyek penggantian kerugian karbon melalui akuntansi karbon ‘kreatif’, propaganda ‘hijau’ dan komitmen iklim tanpa akhir yang dibuat oleh perusahaan dan pemerintah berdasarkan janji yang menyesatkan dan palsu.

Masyarakat Adat dan komunitas lain yang tinggal di dalam dan sekitar proyek REDD selalu dilarang untuk masuk ke hutan leluhur mereka. Mereka menyaksikan bagaimana komunitas dan tanaman mereka dihancurkan dan digusur. Mereka dilarang melanjutkan kehidupan, dan dilarang melanjutkan kegiatan pertanian, penangkapan ikan atau berburu. Pohon-pohon telah ditanam secara monokultur dengan skala industri di tanah yang menjadi sandaran masyarakat untuk kelangsungan hidup mereka dan di tanah yang mereka anggap suci, karena merupakan tempat pemakaman dan tempat ritual. Banyak proyek REDD bahkan mengerahkan penjaga,

militer atau pasukan keamanan untuk melindungi komoditas karbon yang tersimpan di pohon, yang mengakibatkan lebih banyak kekerasan dan ketakutan, terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Banyak proyek REDD juga menggunakan taktik pemaksaan dan manipulasi untuk mendapatkan tanah, menghancurkan tatanan sosial dan menciptakan konflik di dalam masyarakat.

Karena REDD, perusahaan bahan bakar fosil serta kompleks industri dan keuangan yang bergantung pada fosil dapat terus menghancurkan, menggunduli hutan, dan mencemari lebih banyak wilayah dan ruang kehidupan. Perusahaan mampu melakukannya dengan impunitas. Tentu saja bagi mereka, REDD bukanlah kegagalan yang membawa bencana.

Banyak masyarakat hutan telah menentang REDD sejak diperkenalkan. Lima belas tahun kemudian, butuh penentangan yang lebih serius terhadap gangguan berbahaya ini untuk mengatasi penyebab deforestasi; oposisi yang lebih keras dan lebih kuat. Perlawanan ini tidak hanya untuk melawan REDD, tetapi juga melawan nama-nama barunya seperti 'solusi berbasis alam', 'net zero' atau istilah lain yang akan ditemukan berdasarkan logika tipuan yang sama.

Publikasi ini terdiri dari 11 artikel yang mencerminkan dimensi proyek REDD yang paling mendasar dan berbahaya. Kami berharap masing-masing dari artikel ini akan membantu memperkuat argumen dan tindakan kami melawan skema penyeimbangan dan mengungkapkannya kenyataannya: skema rasis yang tidak pernah dapat diperbaiki karena dirancang demi 'menjaga minyak mengalir' dan, tentu saja, sistem kapitalis yang mendorong krisis iklim, hutan dan sosial yang ada dibelakangnya saat ini.

Sekretariat WRM Internasional

Panduan tentang beberapa istilah yang digunakan dalam publikasi ini

Istilah-istilah berikut akan muncul berkali-kali di seluruh publikasi dan penulisannya akan diberi highlight berwarna seperti ini.

1 Pertanian tebang-dan-bakar atau **perladangan berpindah** adalah salah satu dari berbagai macam sistem pertanian di mana sebidang tanah di hutan atau sabana dibuka dan diolah untuk jangka waktu tertentu dan kemudian dibiarkan untuk regenerasi. Dalam praktiknya, sistem *perladangan berpindah* ini adalah bagian dari sistem penggunaan lahan yang kompleks yang menyumbang pada keragaman hutan dan membantu hutan mempertahankan fungsi ekologisnya. Akan tetapi, praktik perladangan gilir balik masih sering disamakan dengan istilah ‘tebang-dan-bakar’. Penggunaan ungkapan ini memperkuat tuduhan palsu bahwa *perladangan berpindah* adalah penyebab deforestasi. Bank Dunia dan pemerintah di seluruh dunia memiliki rekam jejak yang panjang dalam menggunakan istilah ‘tebang-dan-bakar’ sebagai bagian dari upaya mereka untuk memberantas *perladangan berpindah*. Banyak kegiatan REDD yang berfokus pada pelarangan atau pembatasan *perladangan berpindah*, misalnya dengan melarang penggunaan api untuk menyiapkan lahan untuk budidaya.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Survival International. Shifting cultivation. What is it and who does it? <https://www.survivalinternational.org/about/swidden>

2 Penebangan Selektif / Tebang Pilih. Istilah ini menyesatkan. Menurut industri penebangan, *tebang pilih* tidak merusak hutan karena hanya beberapa pohon yang dipilih dengan hati-hati (khususnya bernilai komersial) yang ditebang. Namun pada kenyataannya, sebagian besar *tebang pilih* atau *penebangan selektif* adalah *penebangan industri* yang menghancurkan dan mendegradasi kawasan hutan yang luas untuk mengekstraksi beberapa pohon yang bernilai komersial. Penggunaan istilah *selektif* menyembunyikan kenyataan bahwa terutama di kawasan hutan tropis, *penebangan industri* - baik selektif atau tidak - memiliki sejarah panjang yang menyebabkan konflik kekerasan, kondisi kerja yang sewenang-wenang dan dampak yang sangat merusak bagi mereka yang tinggal di sekitar kegiatan ini.

3 Netralitas Karbon / Emisi nol bersih. Banyak perusahaan (dan pemerintah) telah berjanji untuk mengurangi emisi mereka yang merusak iklim menjadi netral atau *nol*. Penggunaan kata *net* / bersih memungkinkan perusahaan untuk terus membakar minyak bumi, gas dan batu bara dan pada saat yang sama mengklaim bahwa kegiatan ini tidak merusak iklim. Bagaimana cara kerja tipu daya ini? Perusahaan ini menyiapkan neraca yang menunjukkan bagaimana jumlah emisi yang sama yang terus mereka dorong ke atmosfer telah dikeluarkan dari atmosfer oleh pihak lain di tempat lain (lihat *carbon offsets* / *penyeimbangan karbon* untuk mengetahui mengapa skema ini tidak berhasil untuk iklim dan justru membahayakan kedaulatan masyarakat hutan atas wilayah mereka). Beberapa pihak bersikeras bahwa janji *nol-bersih* harus mencakup pengurangan emisi yang tajam, dan bahwa hanya emisi yang ‘sulit untuk dihindari’ yang harus diimbangi, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Janji *net-zero emission* menyamarkan semakin tingginya perkembangan lalu lintas udara, pembukaan

ladang minyak dan gas baru, dan sebagainya. Intinya, janji-janji ini, hanyalah taktik untuk melindungi perusahaan yang mengeruk keuntungan dari pembakaran bahan bakar fosil.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Friends of the Earth International et al. (2021). The Big Con: How Big Polluters are advancing a “net zero” climate agenda to delay, deceive, and deny. <https://www.foei.org/resources/publications/net-zero-climate-agenda-big-con>

4 **Penyeimbangan Karbon** atau **Offsetting** telah mendapatkan momentum sebagai alat menuju ‘Ekonomi Hijau’ – karena penyeimbangan memungkinkan kelanjutan model ekonomi yang dibangun di atas perusakan ‘alam’ dengan alasan bahwa kerusakan yang disebabkan di satu tempat dapat dikompensasikan melalui meningkatkan kegiatan untuk memulihkan ‘alam’ di tempat lain. Melalui skema ini, perusahaan bisa terus meraih keuntungan mereka dengan memanfaatkan ketersediaan bahan bakar fosil murah selama mungkin, dengan melobi pemerintah agar penyeimbangan karbon menjadi alternatif intervensi pemerintah yang dapat mengakhiri penggunaan pembakaran bahan bakar fosil.

Untuk penjelasan singkat tentang kontradiksi yang mengganggu penyeimbangan karbon dan yang menjadikannya gangguan berbahaya untuk menghindari kerusakan iklim, lihat buklet WRM 10 things communities should know about REDD. <https://www.wrm.org.uy/id/node/10438>

5 **Rasisme lingkungan.** *Rasisme lingkungan* meliputi eksploitasi oleh perusahaan yang mengekspos secara berlebihan baik komunitas maupun lingkungan yang mayoritas penduduknya kulit hitam, pribumi asli atau masyarakat adat, dan orang kulit berwarna dengan pencemaran paling beracun dan operasi yang paling merusak, mencemari, dan berisiko. Pengabaian dan penolakan untuk mengakui kenyataan ini adalah bentuk lain dari *rasisme lingkungan*. *Rasisme* ini juga memanifestasikan dirinya ketika pemahaman non-Barat tentang teritorial bahkan tidak diakui sebagai ada atau ketika kosmologi Masyarakat Adat digambarkan sebagai hambatan untuk ekspansi perusahaan. Masyarakat Adat selalu menghadapi *rasisme lingkungan* ketika wilayah mereka dinyatakan sebagai Kawasan Lindung atau situs proyek REDD+.

Buklet WRM 223 – Racism in the forests: a process of oppression at the service of capital mengeksplorasi bagaimana *rasisme ini* memanifestasikan dirinya secara struktural melekat dalam kapitalisme. <https://wrm.org.uy/bulletins/issue-223/>

6 **Akuntansi karbon.** Di luar angka-angka yang mewakili volume emisi yang dilepaskan atau diduga diimbangi, ada banyak yang tersembunyi dibalik istilah *akuntansi karbon* yang harus diungkapkan. Salah satu hal yang disembunyikannya adalah *rasisme lingkungan* yang melekat pada ekonomi bahan bakar fosil. Dibalik *Akuntansi karbon* tersembunyi konflik kekerasan di lokasi ekstraksi, pemrosesan dan pemurnian bahan bakar fosil serta di tempat-tempat di mana penyeimbangan karbon terjadi menjadi angka yang rapi dan bebas konflik pada neraca karbon.

Dalam konteks ini, *Akuntansi karbon* digunakan untuk melacak *perkiraan emisi* dari pemerintah dan perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai bagian ekonomi atau bisnis perusahaan pada titik di mana emisi tersebut dilepaskan ke atmosfer. Disinilah permasalahan mulai terlihat, karena tujuannya bukan untuk mengakhiri pembakaran bahan bakar fosil. Pemerintah juga menggunakan *akuntansi karbon* untuk menunjukkan berapa banyak emisi yang disebabkan di satu bagian ekonomi negara telah *diimbangi*

dengan penyimpanan ekstra karbon di tanah, pohon, dan vegetasi negara lainnya. Sementara perusahaan menggunakan *akuntansi karbon* juga untuk menunjukkan bahwa emisi mereka telah diseimbangkan melalui pembelian *kredit karbon*.

Akuntansi karbon menciptakan asumsi yang sekarang diterima secara luas bahwa kerusakan iklim yang disebabkan oleh berbagai gas rumah kaca dan oleh emisi dari sumber yang berbeda dapat dibuat seimbang – melalui unit *kesetaraan CO₂*. Hal ini membuka jalan bagi REDD dan proyek “solusi berbasis alam” – yang didasarkan pada asumsi bahwa menghindari deforestasi yang diduga direncanakan dapat mengimbangi kerusakan iklim yang disebabkan oleh emisi bahan bakar fosil. Oleh karena itu, *akuntansi karbon* merupakan alat utama bagi perusahaan dan pemerintah yang berjanji untuk menjalankan ekonomi atau bisnis mereka *dengan emisi nol* bersih di masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Larry Lohmann (2009). Neoliberalism and the Calculable World. <http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/neoliberalism-and-calculable-world>

7 **omodifikasi alam** menghilangkan keunikan suatu tempat – cerita, kenangan, dan interaksi antara kehidupan manusia dan non-manusia yang membuat suatu tempat berbeda dari tempat lain – dan mendefinisikannya kembali dengan satuan-satuan yang mendorong komodifikasi tersebut. tertarik pada saat komodifikasi dimulai. Wilayah yang identik dengan ingatan, cerita, dan kosmologi yang berbeda dari suatu masyarakat diubah menjadi tanah yang diplot pada peta yang menunjukkan di mana mineral, tanah subur, reservoir air, atau pohon berharga. Setelah dipetakan, kepemilikan pribadi atau negara dapat diklaim dan mineral, air, pohon, dll. diberi label ulang sebagai sumber daya yang tersedia untuk dijual. Belakangan ini, fungsi ekologis seperti kapasitas penyimpanan karbon hutan menjadi sasaran komodifikasi. Dalam prosesnya, nilai hutan hanya ditentukan oleh kapasitasnya untuk menyimpan karbon. Setiap dugaan kandungan karbon hutan dipetakan oleh surveyor lahan modern dan satuan harga yang digunakan kali ini adalah ton karbon per hektar hutan.

Sejarah telah membuktikan bahwa proses komodifikasi melibatkan konflik kekerasan dan pemindahan atau penggusuran. Komodifikasi fungsi ekologi seperti kapasitas penyimpanan karbon hutan tidak terkecuali. Peta yang menunjukkan distribusi kapasitas penyimpanan karbon di berbagai hutan atau di berbagai bagian hutan telah digunakan oleh perusahaan untuk membatasi akses masyarakat ke wilayah mereka: Proyek REDD tidak akan mungkin terjadi tanpa menanggalkan keunikan hutan dan mereduksinya menjadi ‘fasilitas penyimpanan karbon’ untuk kemudian ditawarkan kepada perusahaan pencemar dan di mana satu-satunya hal yang diperhitungkan, dihitung dan diubah menjadi uang adalah ton karbon di pohon.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat pengarahannya WRM Perdagangan Jasa Ekosistem. Ketika “pembayaran untuk jasa lingkungan” memberikan izin untuk merusak.

<https://www.wrm.org.uy/id/node/11503> (tersedia juga dalam Bahasa Indonesia)

8 **Sertifikasi / pengamanan.** Penyeimbangan karbon pada umumnya, dan proyek REDD pada khususnya cenderung menimbulkan konflik ketika pemilik proyek mengubah lahan yang digunakan oleh masyarakat hutan menjadi kawasan penyeimbangan karbon. Hal ini tidak pernah diperdebatkan oleh para pendukung pasar karbon dan REDD. Tanggapan mereka terhadap peringatan tentang

kekerasan tersebut adalah pengembangan pedoman sukarela yang dikatakan mampu mencegah konflik. Para perunding iklim PBB telah mengadopsi seperangkat pedoman dan program-program REDD besar sering berlindung pada 'perlindungan ketat' mereka untuk menangkai kecaman. Pada kenyataannya, kerangka pedoman ini tidak mencegah konflik dan juga tidak memastikan bahwa dana besar REDD selama 15 tahun terakhir telah mengalir ke mereka yang menghadapi perubahan penggunaan lahan, yaitu masyarakat yang lahannya telah dinyatakan sebagai kawasan proyek REDD. Untuk menjual kredit karbon, proyek REDD membutuhkan alat pemasaran yang lebih kuat: yaitu sertifikasi. Standar sertifikasi membantu memoles cerita proyek REDD tentang masa depan hipotetis tanpa proyek dengan banyak perhitungan dan rumus matematika yang membingungkan.

Sertifikasi menawarkan stempel persetujuan eksternal yang mengubah cerita tentang dugaan emisi yang direncanakan di masa depan yang dihindari menjadi produk yang dapat dipasarkan: yaitu ton kesetaraan CO₂ yang diduga tidak dilepaskan ke atmosfer seperti yang direncanakan. Banyak proyek REDD bersertifikat telah terbukti membesarkan volume emisi yang diduga mereka hindari. Sebagian besar proyek REDD mengandalkan standar sertifikasi yang disebut Verified Carbon Standard (VCS) yang dikelola oleh organisasi bernama Verra. Seperti yang didokumentasikan secara luas, sertifikasi tidak dapat mencegah proyek untuk menjual kredit karbon yang ada di atas kertas saja dan tidak bisa menghindari konflik dan pelanggaran hak masyarakat atas tanah mereka.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat materi WRM tentang sertifikasi di <https://www.wrm.org.uy/subjects/certification-schemes>

9 Kebakaran dan hutan. Sebuah bagian dari sebuah artikel di Buletin WRM 238 - *Api baik atau jahat, siapa yang memutuskan? Refleksi tentang api dan hutan* menyoroti bagaimana konsepsi kapitalis tentang api saat ini mendominasi dunia dan menentukan apakah bentuk api tertentu dinilai baik atau buruk: "Di bawah kapitalisme, api bergerak dari lanskap terbuka ke boiler, turbin, dan ruang bakar. Pada saat yang sama, api terbuka yang digunakan selama ribuan tahun untuk menciptakan dan memelihara hutan dan lahan pertanian menjadi tersangka, direndahkan, bahkan dikriminalisasi. Sementara itu, kebakaran berbahan bakar fosil yang jauh lebih hebat, merusak, di dalam mesin dan turbin, menjadi tanda peradaban dan kemajuan, bersama dengan ekstraksi dan limbah yang menyertainya. Jadi ketika Anda menyalakan TV selama musim kemarau di zona perkebunan pohon Chili atau Portugal atau hutan negara bagian barat Amerika Utara, Anda dapat melihat laporan menakutkan tentang kebakaran hutan tak terkendali dan penjahat yang dikabarkan berada di belakang mereka. Akan tetapi, laporan tersebut tidak pernah menyebutkan kebakaran berbahan bakar fosil yang secara bersamaan menyala tanpa terlihat di dalam setiap mobil lokal dan pembangkit listrik termal. Kebakaran yang - terlepas dari pemanasan global dan kehancuran yang menyertai ekstraksi bahan bakar fosil - tidak akan pernah dituntut oleh siapa pun sebagai tindakan kriminal. Laporan tersebut juga tidak menyebutkan bahwa dua fenomena bermasalah ini hanyalah sisi berlawanan dari mata uang yang sama."

Respon terhadap api lebih dominan ditujukan kepada konsepsi kapitalis yang menyebabkan kerusakan iklim dari pada kepada program penyeimbang REDD: penggunaan api kecil yang dikendalikan untuk *perladangan berpindah* direndahkan dan dikriminalisasi dengan tujuan memasok kredit karbon kepada mereka yang memicu

kerusakan iklim dengan *api yang membakar fosil* di dalam mesin dan turbin perusahaan.

<https://wrm.org.uy/bulletins/issue-238/>

10 Kawasan Lindung. Istilah ini dibebani dengan konsepsi kolonial tentang *Kawasan Lindung* sebagai sarana untuk melindungi ‘alam’ dari Masyarakat Adat dan melestarikannya sebagai ‘hutan belantara asli’ untuk berburu trofi Elite dan menikmati keindahan pemandangan dan wisata safari. Pendekatan kolonial dan rasis terhadap konservasi ini telah memunculkan pola pikir ‘konservasi benteng’ yang memaparkan masyarakat yang wilayahnya telah dinyatakan sebagai Kawasan Lindung pada kejahatan seperti pelanggaran hak asasi manusia, penggusuran dengan kekerasan dan penghancuran mata pencaharian.¹ Meskipun LSM konservasionis menyatakan ini adalah cerita masa lalu, bagi banyak komunitas di dalam Kawasan Lindung, serangan kekerasan masih menjadi realita sehari-hari. LSM konservasi internasional sedikit banyak terlibat di sebagian besar Kawasan Lindung, sering kali dalam bentuk aliansi dengan perusahaan yang justru mendorong deforestasi di tempat lain.

1 WRM Bulletin 249 (2020). Protected Areas feed corporate profiting and destruction.

<https://wrm.org.uy/bulletins/issue-249/>



REDD: Lebih dari sekedar kegagalan

REDD telah mendominasi kebijakan kehutanan internasional selama 15 tahun terakhir dengan janji bahwa pohon yang tumbuh lebih berharga daripada pohon yang ditebang karena menyediakan cara yang cepat dan murah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, perusahaan yang mengantongi miliaran dolar dari mengubah hutan menjadi perkebunan monokultur, penggembalaan ternak atau menghancurkannya untuk tambang, hidrodam dan infrastruktur lainnya, tidak tertarik pada REDD. REDD tidak diragukan lagi telah gagal mengurangi deforestasi skala besar. Namun, kita tidak bisa hanya memusatkan perhatian pada kegagalan REDD yang nyata, karena yang dibutuhkan adalah gambaran lengkap tentang warisannya yang merusak.

REDD adalah singkatan dalam bahasa Inggris untuk 'Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation'; yang telah mendominasi kebijakan kehutanan internasional selama 15 tahun terakhir. Titik awal REDD adalah asumsi bahwa menawarkan imbalan finansial akan meyakinkan mereka yang bertanggung

jawab atas perusakan hutan untuk membatalkan rencana mereka; sebagai ganti pembayaran REDD, mereka akan melindungi hutan. Dengan demikian, REDD akan membuat pohon lebih bernilai jika berdiri daripada ditebang dan dengan demikian, menyediakan cara yang cepat dan murah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagi para pendukung REDD, semua yang diperlukan untuk mengakhiri deforestasi, adalah tawaran imbalan finansial untuk melindungi, bukan menghancurkan.

Namun perusahaan-perusahaan yang mengantongi miliaran dari mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau kedelai, penggembalaan ternak atau menghancurkannya untuk tambang, waduk pembangkit listrik tenaga air, jalan raya dan infrastruktur lainnya, tidak tertarik pada REDD. Beberapa tidak tertarik, karena mereka masih bisa mendapatkan lebih banyak jika mereka terus merusak hutan. Siapapun “yang menanggapi insentif ekonomi murni akan memilih minyak kelapa sawit”, seperti yang telah ditulis oleh kelompok pro-REDD Ecosystem Market Place pada tahun 2014. Yang lain tidak tertarik karena deforestasi mereka ilegal. Perusahaan mana yang akan mengajukan pembayaran REDD, mengatakan akan bersedia membatalkan rencana untuk menghancurkan hutan secara ilegal? Ada juga mereka yang melakukan deforestasi terutama sebagai cara untuk mengklaim kepemilikan atas tanah, atau memperkuat klaim kepemilikan mereka. Bagi kelompok ini, janji pembayaran REDD kurang menarik karena motivasi utama mereka untuk membuka lahan bukanlah keuntungan finansial langsung.¹

15 tahun kemudian, konsep yang diperkenalkan ke dalam negosiasi iklim PBB dengan janji akan mengarah pada pengurangan emisi yang cepat dan murah dari perusakan hutan tropis, telah gagal menurunkan deforestasi skala besar. Di negara-negara seperti Brasil, Peru atau Republik Demokratik Kongo, deforestasi bahkan semakin meningkat sejak REDD diperkenalkan.²

Kegagalan REDD untuk mengurangi deforestasi telah didokumentasikan secara luas.³ Sebuah studi baru-baru ini tentang efektivitas pendanaan pemerintah Jerman untuk REDD menjelaskan mengapa kisah sukses REDD tetap berlimpah: dengan “menurunkan standar ke bawah dari harapan” tentang apa yang ingin dicapai REDD telah memungkinkan para pendukung REDD untuk membangun “efek yang tampaknya positif dalam konteks banding terbatas instrumen itu.” Harga untuk penyesuaian ini adalah: “memuluskan tujuan yang lebih luas untuk menghentikan deforestasi.”⁴

Berfokus hanya pada kegagalan REDD dalam membantu menurunkan hilangnya hutan, bagaimanapun, tampaknya tidak cukup menyajikan gambaran lengkap tentang warisan instrumen perusak ini.

REDD bukanlah kegagalan bagi semua orang

REDD bukanlah kegagalan bagi mereka yang menggunakannya sebagai alat untuk mengendalikan lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat yang bergantung pada hutan. Cerita bahwa **pertanian ‘tebang-bakar’** merusak hutan; bahwa petani pertanian petani menyebabkan deforestasi dan bahwa praktik budidaya masyarakat hutan perlu ‘dimodernisasi’ adalah – meskipun salah dan memperkuat pola dominasi kolonial – bahkan lebih diterima secara luas saat ini daripada 15 tahun yang lalu.⁵

Terlebih lagi: karena hampir semua kegiatan REDD berfokus pada perubahan cara petani dan masyarakat hutan menggunakan hutan, *bukan* pada deforestasi skala besar, kehancuran perusahaan menjadi kurang terlihat sebagai akibat dari REDD.

REDD, khususnya wujud terbarunya yang disebut ‘solusi berbasis alam’ (Nature-based Solution/NbS) atau ‘solusi iklim alam’, juga berpihak pada industri bahan bakar fosil. REDD telah memberikan peluang bagi industri ini untuk terus menghancurkan simpanan karbon bawah tanah yang menjadi inti model bisnis dan kerusakan iklim. Dengan REDD, dan sekarang NbS, perusahaan minyak, batu bara, dan gas fosil mengklaim bahwa mereka dapat melanjutkan perusakan yang menguntungkan tanpa merusak iklim. Yang harus mereka lakukan hanyalah membayar seseorang yang mengaku menghemat karbon di tempat lain.⁶ Maskapai penerbangan, perusahaan pertambangan, agroindustri, perusahaan pupuk dan makanan, antara lain, juga telah menggunakan REDD sebagai strategi untuk mempertahankan model kapitalis dari mode produksi dan konsumsi yang bergantung pada bahan bakar fosil untuk meraup keuntungan .

Kenyataannya, bagaimanapun, adalah tidak mungkin untuk mengkompensasi dampak iklim yang disebabkan ketika karbon dilepaskan dari deposit karbon bawah tanah yang telah memakan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Berpura-pura bahwa kompensasi tersebut dapat dicapai melalui pembayaran untuk kegiatan REDD seperti menanam lebih banyak pohon atau menghindari deforestasi yang diduga direncanakan, adalah ilusi yang berbahaya (lihat artikel dalam publikasi ini *Apakah Semua Karbon Sama? Karbon Fosil, Kekerasan dan Kekuasaan*). Dengan memelihara ilusi itu, REDD membantu menunda diskusi yang tak terhindarkan tentang mengakhiri pembakaran bahan bakar fosil, dan dengan demikian, menjadi pendorong kerusakan iklim .

Dan yang terakhir, perusahaan konsultan, LSM konservasi internasional dan lembaga *think tank* semuanya telah mendapat manfaat dari program pendanaan REDD yang murah hati dari negara-negara industri dan filantropi dan pembelian offset karbon perusahaan.⁷ Agen penjualan REDD khusus, pemilik proyek REDD sektor swasta, pengembang **standar sertifikasi** dan perusahaan audit, juga telah mengukir ceruk yang menguntungkan untuk diri mereka sendiri. Tentu saja bagi mereka, REDD sama sekali bukanlah sebuah kegagalan.

Ada Apa di Balik Huruf R - E - D - D?

Apa kepanjangan dari huruf-huruf REDD?

REDD adalah singkatan dalam bahasa Inggris dari 'Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan'.

Mengapa hutan dibahas pada pertemuan iklim PBB?

Karbon yang ditemukan dalam batu bara, minyak bumi dan gas serta di pohon sering digunakan untuk menyatakan bahwa pengurangan deforestasi penting untuk mencegah kekacauan iklim (lihat ilustrasi dan teks *Fossil versus Biotic Carbon*). Panel ilmuwan yang memberi nasihat kepada PBB tentang masalah iklim telah menyetujui argumen yang dipertanyakan ini dengan mengklaim bahwa untuk menghindari kerusakan iklim, yang penting adalah berapa banyak karbon dioksida gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer, bukan dari mana karbon dioksida ini berasal.⁸ Perusahaan bahan bakar fosil dan pemerintah negara industri menggunakan argumen ini untuk mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak untuk melindungi simpanan karbon bawah tanah yang menyumbang sebagian besar karbon dalam gas rumah kaca. Perusahaan ini khawatir hal ini akan mengakhiri ekstraksi batu bara, minyak bumi dan gas. REDD membantu menunda keputusan yang tak terhindarkan ini dengan berpura-pura bahwa melindungi hutan (atau menanam jutaan pohon) dapat membatalkan kerusakan yang disebabkan oleh pembakaran karbon fosil yang berkelanjutan. Tentu saja ini harus dihentikan dan merupakan gangguan yang berbahaya.

Mengapa ada begitu banyak nama yang berbeda untuk REDD dan apa perbedaannya?

Penjelasan tentang bagaimana REDD membantu mengakhiri deforestasi telah mengalami perubahan beberapa kali sejak REDD diperkenalkan pada tahun 2005. Perubahan ini sebagian mencerminkan besarnya pengaruh dari berbagai kelompok kepentingan pada rancangan REDD. Awalnya, REDD bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dengan menawarkan uang kepada perusahaan yang merusak hutan. Dengan setiap perubahan berikutnya, pintu semakin terbuka untuk lebih banyak kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana internasional dalam volume besar. Penanaman pohon, penebangan, konservasi hutan dan intensifikasi praktik pertanian tradisional seperti **perladangan berpindah** akhirnya dinyatakan sebagai kegiatan yang memenuhi syarat untuk pendanaan REDD. *Setidaknya* ada lima bentuk program REDD yang berbeda, masing-masing memiliki namanya sendiri.

- Program ini dimulai pada tahun 2005 dengan RED, di mana fokusnya adalah pada D=deforestasi. Asumsinya adalah bahwa pembayaran RED akan membuat hutan dengan pepohonan yang tumbuh lebih bernilai daripada hutan dengan pohon yang ditebang. Dana RED diharapkan meyakinkan perusahaan yang berencana menghancurkan hutan untuk berhenti menebang pohon.

- Huruf D kedua yaitu D=degradasi kedua, ditambahkan pada tahun 2007: **REDD** memungkinkan pembayaran juga kepada mereka yang merusak hutan tetapi masih ada beberapa pohon yang tumbuh sehingga yang tersisa masih disebut hutan dalam statistik internasional.

Baik dalam RED maupun REDD, pembayaran dijanjikan jika siapa pun yang berencana menghancurkan atau mendegradasi hutan bersedia membatalkan rencana ini. Ini adalah insentif yang sangat buruk karena dapat mengundang pemerasan. Logikanya: jika Anda tidak membayar saya, saya akan menghancurkan hutan.

- Tak lama setelah itu, tanda +/plus ditambahkan: **REDD+** memungkinkan pembayaran kepada perusahaan penebangan dan perkebunan serta industri konservasi. Secara khusus, tanda “+” menambahkan ‘peningkatan stok karbon’ (perkebunan), ‘pengelolaan hutan lestari’ (penebangan industri) dan konservasi (kawasan lindung) sebagai kegiatan yang dapat dimintakan pembayaran REDD.

Ada banyak argumen untuk penambahan program-program tersebut. Di antara pembenaran yang paling umum adalah bahwa pohon menyerap karbon saat mereka tumbuh, jadi menanam banyak pohon mestinya baik untuk iklim⁹ dan bahwa perusahaan penebangan membutuhkan uang ekstra agar mereka dapat melakukan penebangan lebih hati-hati dan mempraktikkan ‘**penebangan selektif**’ dengan perhatian khusus terhadap iklim .

Argumen untuk menambahkan konservasi ke dalam daftar malah menimbulkan banyak masalah. Bagi mereka yang telah melindungi hutan agar memenuhi syarat untuk pendanaan REDD, mereka harus menyetujui salah satu dari narasi berikut: **1** kegiatan mereka (**perladangan berpindah**, biasanya) merusak hutan dan mereka harus menghentikan atau mengubah kegiatan ini dengan imbalan uang REDD. Atau, **2** hutan mereka terancam oleh penyusup yang memasuki wilayah mereka. Intrusi dan deforestasi yang diakibatkannya hanya dapat diatasi karena uang REDD; tanpa REDD, mereka yang melindungi hutan tidak akan memiliki cukup dana untuk menghentikan deforestasi.

Kisah-kisah ini memperkuat persepsi yang salah bahwa populasi yang bergantung pada hutan mendorong deforestasi atau bahwa mereka membebaskan negara dari kewajibannya untuk mencegah intrusi dan perusakan hutan di wilayah Masyarakat Adat. Alur narasi kedua mengabaikan bahwa di banyak negara, melindungi wilayah adat dari penyusupan adalah kewajiban hukum otoritas negara. REDD menempatkan tanggung jawab itu kepada masyarakat yang bergantung pada hutan yang justru hutannya sedang diserang.

- Perubahan selanjutnya menghasilkan nama **lanskap REDD+** dan **yurisdiksional REDD+**. Argumen untuk ini adalah bahwa REDD+ perlu mencakup area yang lebih luas di luar proyek individu saja. Asumsinya adalah program-program REDD yang mencakup seluruh wilayah, provinsi atau seluruh negara bagian dibutuhkan untuk mengurangi deforestasi. Jika tidak, perusakan mungkin hanya bergerak di luar batas proyek REDD. Kesepakatan PBB di Paris PBB tahun 2016 tentang perubahan iklim mengacu pada versi REDD ini. Karena melibatkan banyak kawasan hutan yang berbeda di bawah kepemilikan dan rezim yang berbeda, pemerintah memikul tanggung jawab untuk memperhitungkan perubahan volume karbon yang tersimpan di hutan di bawah yurisdiksi REDD+. Neraca karbon dari masing-masing proyek REDD+ entah bagaimana harus diintegrasikan ke

dalam neraca karbon hutan nasional atau provinsi. *The World Bank's BioCarbon Fund* atau Dana BioKarbon Bank Dunia memprakarsai prakarsa semacam itu. Dalam apa yang disebut pasar karbon sukarela, proyek-proyek REDD individu terus mendominasi, meskipun proyek-proyek ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam rencana yurisdiksi REDD+. Bagaimana dan kapan ini akan terjadi, dan apa artinya bagi masing-masing proyek REDD, masih belum jelas.

- Istilah REDD terlalu rumit untuk bagian Humas perusahaan atau lembaga. istilah itu terlalu panjang, terlalu teknis, terlalu sulit untuk dijelaskan, terlalu rumit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dengan meningkatnya penentangan terhadap REDD dan semakin jelasnya kekurangan dalam rancangan REDD, LSM konservasi besar mulai mempromosikan REDD dengan nama lain: **Solusi Berbasis Alam (NbS)** atau **Solusi Iklim Alam**¹⁰.

- **REDD Adat** adalah konsesi terhadap tekanan dari Masyarakat Adat guna mengingatkan mereka yang telah mempromosikan REDD bahwa perlawanan Masyarakat Adat terhadap perusakan hutan dan demarkasi wilayah adat lah yang menjaga hutan berdiri di banyak tempat. Usulan ini muncul setelah konservasi dijadikan sebagai kegiatan yang memenuhi syarat REDD. Demarkasi dan pengakuan hukum atas wilayah adat telah menjadi tuntutan inti dari Masyarakat Adat untuk terlibat dalam REDD Adat. Dalam banyak kasus, janji ini belum dipenuhi.¹¹

Siapa yang mencetuskan ide tersebut dan siapa yang mempromosikan REDD?

Diskusi kembali ke awal pembicaraan iklim PBB. Proyek yang mengklaim dapat mengurangi emisi dengan menghindari deforestasi (perusahaan kelapa sawit atau kedelai yang tidak membuka hutan untuk memperluas perkebunan mereka, misalnya) dikeluarkan dari perdagangan karbon di bawah Protokol Kyoto PBB pada tahun 1997. Para perunding iklim memberikan empat alasan utama untuk keputusan ini: **1** proyek-proyek ini akan menghasilkan begitu banyak kredit karbon sehingga akan 'membanjiri pasar' dan menurunkan harga kredit karbon; **2** hutan dapat terbakar, dan ketika hutan terbakar, kompensasi emisi karbon fosil hilang (penyimpanan karbon di hutan tidak abadi sehingga tidak memungkinkan kompensasi pelepasan karbon fosil adalah narasi yang digunakan dalam perdebatan pada saat itu); **3** memperlambat deforestasi di area terbatas dari proyek penggantian karbon hutan tidak menghentikan perusakan hutan untuk melanjutkan perusakan mereka di tempat lain; dan **4** tidak ada cara efektif dan langsung untuk mengukur berapa banyak karbon yang tersimpan di hutan, oleh karena itu angka-angka tersebut sangat tidak dapat diandalkan dan perhitungannya mengungkapkan variasi dan ketidakakuratan yang besar.

LSM konservasi internasional seperti Environmental Defense dan Nature Conservancy dan lembaga *think tank* seperti World Resources Institute (WRI) telah berkampanye keras untuk melihat proyek penggantian kerugian hutan dimasukkan ke dalam mekanisme perdagangan karbon Protokol Kyoto. Mereka melanjutkan kampanye mereka dan pada tahun 2005, "Koalisi untuk Negara Hutan Hujan", melalui perwakilan pemerintah Papua Nugini dan Kosta Rika, gagasan tersebut diperkenalkan kembali ke negosiasi iklim PBB

sebagai RED (Pengurangan emisi dari deforestasi, lihat di atas). Koalisi ini sering salah digambarkan sebagai koalisi *dari* negara-negara hutan hujan sementara nama yang benar “Koalisi *untuk* Bangsa Hutan Hujan” aslinya adalah sebuah LSM. LSM ini didirikan oleh dua lulusan Columbia Business School dari AS dan Italia, salah satunya dibesarkan di Papua Nugini dan secara teratur menjadi delegasi negara tersebut di konferensi iklim PBB.

Didukung oleh pemerintah negara-negara industri seperti Norwegia, Jerman dan Inggris, “Koalisi untuk Negara Hutan Hujan” ini memainkan peran kunci dalam melihat bagaimana REDD berakar kuat dalam negosiasi iklim PBB di Bali, Indonesia, pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Bank Dunia, meluncurkan **Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan / FCPF)**, dengan tujuan untuk “memulai pasar karbon hutan”.¹² Kemudian juga diluncurkan **BioCarbon Fund** dan **Forest Investment Program (FIP)**. Bersama dengan prakarsa seperti program **REDD Early Movers (Penggerak Awal / REM)** pemerintah Jerman dan **Prakarsa Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (NICFI)**, program-program ini telah menjadi ujung tombak REDD+ di banyak negara di belahan dunia Selatan.

Meskipun tidak ada yang berubah pada argumen untuk tidak memasukkan karbon hutan dalam mekanisme penggantian kerugian Protokol Kyoto, REDD ditetapkan sebagai alat kebijakan kehutanan internasional. Didukung oleh berbagai program pendanaan pemerintah dan filantropi, industri baru bermunculan, seperti konsultan, perusahaan proyek REDD seperti Wildlife Works Carbon, standar **sertifikasi** seperti Standar Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati (CCBS) dan agen-agen penjualan khusus untuk proyek REDD. Dengan pekerjaan dan karier yang sekarang terkait dengan REDD, pertanyaan tentang efektivitas dan apakah gagasan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan sepertinya tidak ada dalam daftar kelompok pemrakarsa REDD ini.

Bagaimana dengan uang yang dijanjikan oleh REDD?

Pendanaan untuk REDD sebagian besar berasal dari empat sumber. Sebagian besar dana berasal dari pemerintah, secara langsung dan melalui entitas seperti Bank Dunia dan Dana Iklim Hijau.¹³ Filantropi dan perusahaan yang tertarik untuk membeli kredit karbon telah mendanai proyek dan organisasi REDD individu yang mempromosikan REDD.

Bank Dunia dan inisiatif bilateral REDD lainnya menggunakan ‘bantuan teknis’ mereka untuk mengawasi persiapan ‘garis dasar’ emisi dari deforestasi dan karbon yang tersimpan di pohon dan sistem pengaturan untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi (Measure, Report, and Verify /MRV) pergerakan karbon hutan. Mereka juga menyiapkan sektor-sektor dalam **penghitungan karbon** dan skema perdagangan karbon dan menggerakkan perubahan peraturan hukum yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi negara-negara Selatan di pasar karbon di bawah Perjanjian Paris PBB atau skema perdagangan karbon internasional lainnya seperti industri penerbangan CORSIA.¹⁴

Bank Dunia khususnya juga telah menggunakan inisiatif REDD seperti **Forest Investment Programme (FIP)**, **Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)**¹⁵ atau **Inisiatif Dana Biokarbon untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan (ISFL)** untuk lebih membuka ekonomi negara-negara Selatan terhadap pasar komoditas karbon dan pertanian. Misalnya, ISFL melibatkan kegiatan di lima negara (Ethiopia, Zambia, Indonesia, Kolombia dan Meksiko). Dampaknya terhadap kebijakan nasional yang mempengaruhi pertanian dan petani

mungkin berlangsung lama dan mempersiapkan landasan untuk mendorong petani petani lebih dalam ke pertanian industri. Tujuan inisiatif Dana BioCarbon ini adalah: untuk merintis program yang memungkinkan negara dan sektor swasta “mengadopsi perubahan dalam cara petani bekerja di lapangan.”¹⁶ Bahkan jika program ini menjual sedikit kredit karbon pada akhirnya, mereka masih akan mendorong petani konvensional lebih dalam ke produksi agroindustri dan merusak praktik budidaya tradisional seperti **perladangan berpindah** dan penggunaan api terkendali untuk persiapan tanah pertanian.

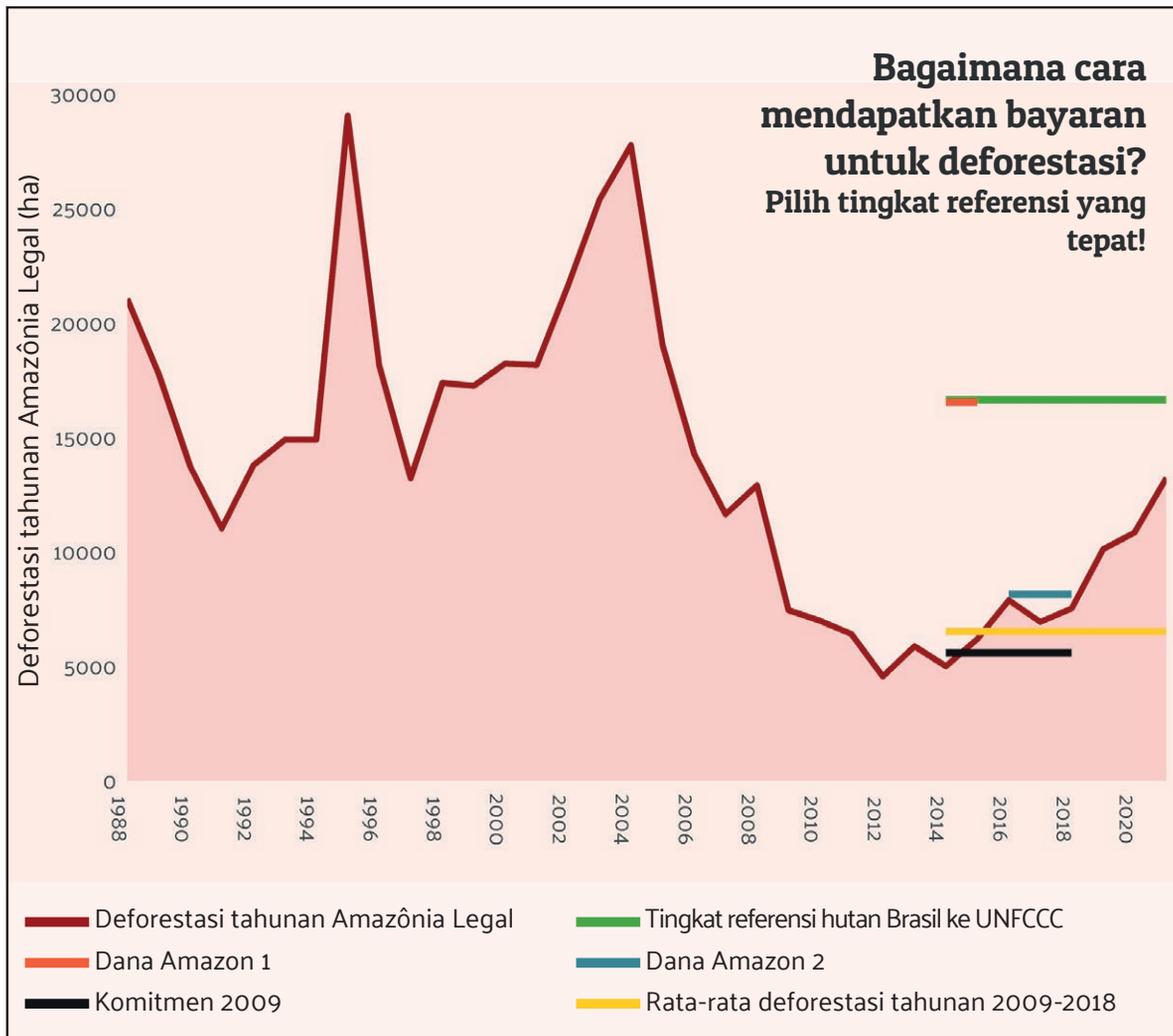
Pembayaran REDD dan kredit karbon disaat deforestasi meningkat. Bagaimana ini mungkin?

Pada tahun 2019, Dana Iklim Hijau atau Green Climate Fund membayar US\$ 96,5 juta kepada pemerintah Jair Bolsonaro di Brasil karena diduga mengurangi deforestasi; sejak tahun 2015, program Penggerak Awal REDD pemerintah Jerman telah mentransfer jutaan dolar pembayaran ‘kinerja’ REDD+ kepada pemerintah negara bagian Acre di Brasil (EUR 25 juta / US\$ 28 juta) dan Mato Grosso (EUR 44 juta). Uang ini dibayarkan meskipun deforestasi telah meningkat di kedua negara ini sejak REDD diperkenalkan.

Bukan hal yang aneh REDD membayarkan uang ke negara-negara ini meskipun deforestasi di wilayah program atau proyek REDD telah meningkat. Ini berkaitan erat dengan bagaimana REDD mendefinisikan ‘keberhasilan’. Dalam hal pembayaran Dana Iklim Hijau dan program Penggerak Awal REDD, pemerintah yang terlibat sepakat bahwa pembayaran REDD akan dilakukan selama deforestasi aktual tetap di bawah laju deforestasi rata-rata selama beberapa waktu di masa lalu. Dalam kasus negara bagian Acre dan Mato Grosso di Brasil, tahun-tahun puncak deforestasi, 2004 dan 2005, dimasukkan dalam perhitungan. Deforestasi telah turun drastis setelah tahun-tahun itu, karena langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Brasil untuk mengurangi deforestasi bahkan sebelum REDD ada. Ini termasuk demarkasi wilayah Masyarakat Adat dan pemeriksaan rutin dan denda bagi mereka yang ditemukan merusak hutan secara ilegal. Ketika REDD diperkenalkan, demarkasi dan penegakan hukum digantikan oleh logika insentif keuangan yang menjadi dasar REDD. Hasilnya: deforestasi kembali meningkat.

Mengapa mereka masih menerima pembayaran REDD? Periode referensi di masa lalu dipilih yang sangat tinggi, oleh karena itu, bahkan peningkatan besar-besaran dalam deforestasi setelah REDD dianggap sebagai keberhasilan REDD: logikanya adalah karena deforestasi jauh lebih tinggi di masa lalu, deforestasi sekarang – bahkan jika meningkat – lebih kecil daripada yang mungkin terjadi tanpa REDD.

Gambar berikut menunjukkan jumlah pembayaran REDD bergantung pada nomor referensi yang dinegosiasikan daripada pada realita apa yang sebenarnya terjadi di hutan. Garis hijau tua menunjukkan deforestasi yang sebenarnya di Amazon Brasil. Batang berwarna antara 2014 dan 2018 menunjukkan angka referensi berbeda yang dinegosiasikan oleh pemerintah Brasil di bawah inisiatif REDD yang



Deforestasi Amazon Brasil dapat berlipat ganda berdasarkan proposal pilihan tingkat referensi FP100 dari UNDP dan masih menghasilkan 'pembayaran REDD berbasis hasil'

- (a) *FREL* Tingkat Referensi Hutan Brasil UNFCCC. (Dasar konversi ke ton CO₂ yang diklaim sebagai hasil mitigasi dalam proposal UNDP untuk pembayaran REDD+ berbasis hasil program percontohan RfP GCF): Rata-rata 1996-2010: 16.640 km².
 (b) Tingkat referensi *Dana Amazon Brasil 1* untuk pembayaran 2011-2015: Rata-rata 2001-2010: 16.640 km²
 (c) Tingkat referensi *Dana Amazon Brasil 2* untuk pembayaran 2016-2020: Rata-rata 2006-2015: 8.150 km²
 (d) Komitmen Pemerintah Brasil 2009 untuk mengurangi deforestasi di Amazon hingga 80 persen pada 2020, dibandingkan dengan rata-rata 1996-2005: 3.925 km²

berbeda. Meskipun pemerintah melewatkan komitmennya sendiri pada tahun 2009 untuk mengurangi deforestasi, pemerintah masih memenuhi syarat untuk pendanaan REDD. Jumlah pendanaan REDD yang diterima tidak terlalu bergantung pada deforestasi aktual tetapi pada perbedaan antara deforestasi aktual dan nomor referensi yang dinegosiasikan (garis merah): Semakin tinggi deforestasi diasumsikan di bawah nomor referensi, semakin banyak uang yang dibayarkan berdasarkan REDD - walaupun deforestasi meningkat.

Pembayaran yurisdiksi REDD+ seperti itu beralih ke masa lalu untuk menetapkan garis dasar (yang digelembungkan). Masing-masing proyek REDD+ menggunakan metode yang lebih meragukan: Mereka membandingkan deforestasi aktual dalam proyek dengan cerita fiksi tentang berapa banyak deforestasi yang akan terjadi tanpa proyek REDD. Beberapa laporan mengungkap bagaimana metode ini telah menyebabkan dugaan penghematan emisi yang dilebih-lebihkan.¹⁷

Bukan hal yang aneh REDD membayarkan uang ke negara-negara ini meskipun deforestasi di wilayah program atau proyek REDD telah meningkat.

Bahkan yang lebih buruk, REDD menyertakan insentif jahat untuk membesar-besarkan perusakan hutan yang diduga *akan terjadi* tanpa proyek REDD: **Semakin besar kerusakan hipotetis, semakin besar perbedaan antara deforestasi aktual dan apa yang diklaim oleh pemilik proyek akan terjadi. Dan perbedaan inilah yang diubah menjadi kredit karbon yang dapat dijual oleh proyek.** Sebagian besar, proyek REDD yang ada didasarkan pada klaim yang tidak masuk akal seakan-akan hutan akan dihancurkan tanpa proyek REDD.¹⁸

Salah satu contohnya adalah proyek REDD yang dikelola oleh LSM konservasi terbesar di dunia, The Nature Conservancy (TNC). Kisah REDD TNC adalah bahwa tanpa proyek REDD, TNC akan menebangi hutan dan mengambil kayu paling berharga di tahun-tahun mendatang. Ini sangat tidak masuk akal, paling tidak karena dua dekade sebelumnya, TNC berhasil menjalankan kampanye penggalangan dana untuk membeli tanah. Dalam kampanye penggalangan dana, TNC berargumen bahwa membeli hutan akan melindunginya dari ancaman penebangan.¹⁹

REDD sebagai alat untuk mengendalikan lahan yang digunakan oleh masyarakat hutan

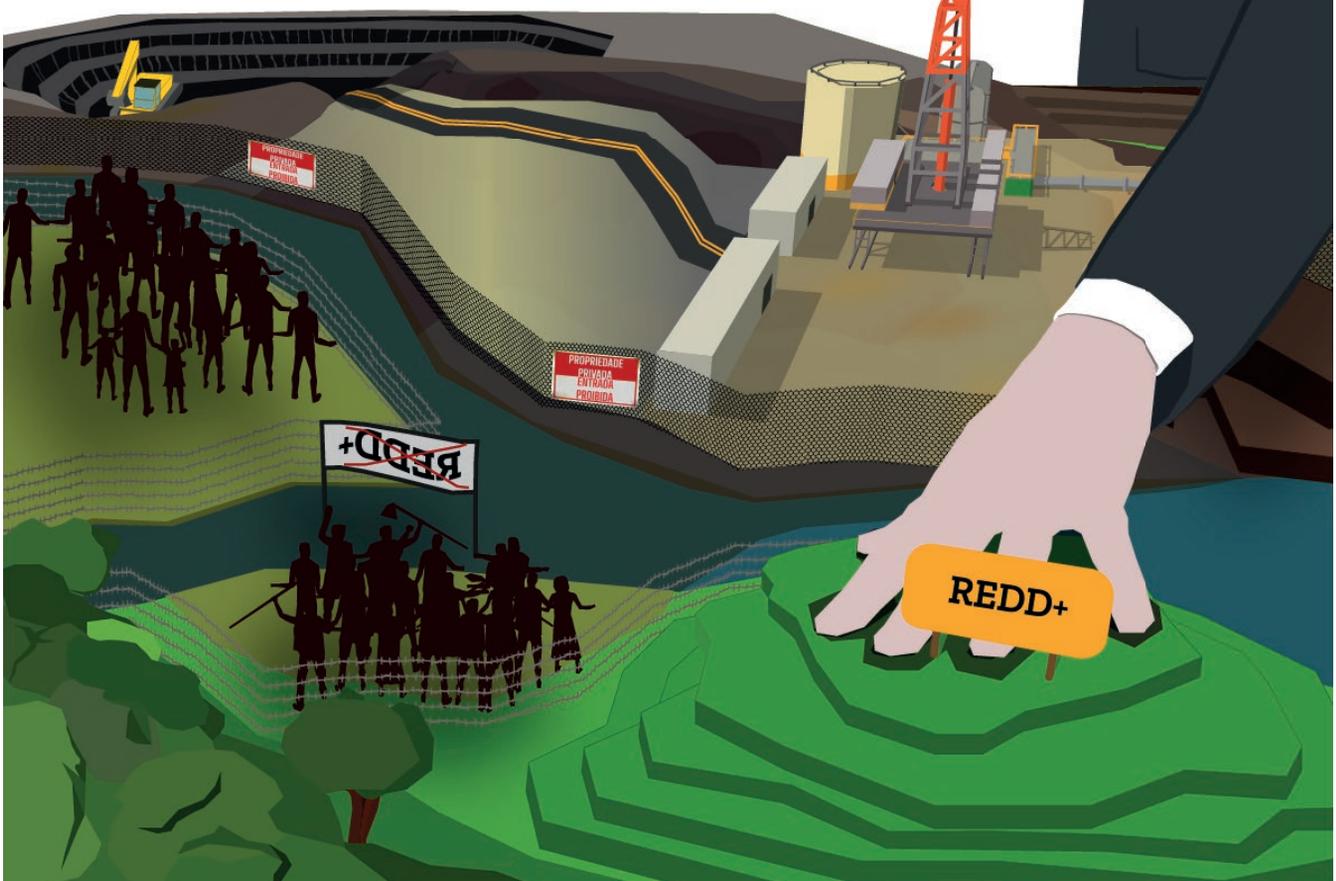
Konflik yang disebabkan oleh proyek REDD dan dampak negatifnya terhadap masyarakat hutan telah banyak didokumentasikan²⁰. Konflik-konflik tersebut sering terjadi di mana proyek-proyek didirikan di atas tanah yang kepemilikannya dipersengketakan. Konflik muncul, misalnya, ketika proyek REDD membatasi penggunaan lahan di dalam wilayah proyek REDD. Mereka yang memberlakukan pembatasan cenderung mengabaikan bahwa klaim mereka atas tanah tersebut dapat disengketakan dan bahwa masyarakat hutan telah lama menggunakan wilayah yang sekarang dinyatakan sebagai proyek REDD²¹.

Pembatasan sering kali mencakup larangan mengumpulkan kayu bakar dan kegiatan pertanian menggunakan api. Keluarga yang terkena proyek REDD juga telah melaporkan pembatasan akses dan penyitaan ternak mereka, misalnya di mana proyek REDD tidak lagi mengizinkan masyarakat untuk menggunakan lahan yang sebelumnya tersedia bagi mereka sebagai lahan penggembalaan untuk hewan mereka. Konflik manusia-satwa liar juga dilaporkan meningkat. Keluarga yang terkena proyek REDD Koridor Kasigau di Kenya, misalnya, melaporkan bahwa tanaman mereka sering dirusak oleh gajah tanpa kompensasi yang memadai dari proyek REDD atau Taman Nasional terdekat. Masing-masing mengklaim gajah adalah tanggung jawab pihak lain dan masyarakat pribumi terjebak di tengah, dibiarkan tanpa kompensasi atas tanaman mereka yang hancur.

REDD juga mempermudah pemerintah dan LSM konservasi untuk membenarkan program yang membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat seperti **perladangan berpindah** (“tebang dan bakar”). Banyak dari prakarsa ini memaksakan

perubahan yang membuat praktik pertanian masyarakat hutan dan petani lebih bergantung pada teknologi dengan memperkenalkan metode pertanian yang dikendalikan oleh perusahaan. Mereka mungkin mempromosikan praktik yang mengandalkan penggunaan pupuk dan benih khusus yang dikendalikan perusahaan untuk meningkatkan hasil per hektar (sehingga masyarakat hutan akan membuka lebih sedikit lahan, demikian argumennya). Hal ini memungkinkan perusahaan, konsultan dan lembaga negara untuk meningkatkan kontrol atas tanah yang digunakan oleh masyarakat hutan dan mengintegrasikan pertanian petani lebih dalam ke pasar komoditas pangan global. Dengan cara ini, REDD berkontribusi pada petani dan masyarakat yang bergantung pada hutan kehilangan otonomi dan pengetahuan dan budaya leluhur mereka atas tanah dan ruang hidup mereka.

Banyak proyek REDD juga menggunakan drone dan kamera untuk memantau siapa yang menggunakan lahan dan bagaimana area dalam proyek REDD digunakan.²² Kadang-kadang, pemantauan ini disajikan sebagai sesuatu yang positif, cara untuk mendeteksi penyusup yang merusak hutan di dalam wilayah Masyarakat Adat secara ilegal, misalnya. Tetapi bukankah pemantauan semacam ini merupakan cara untuk mengontrol bagaimana, di mana, dan kapan suatu komunitas menggunakan wilayahnya, terutama di wilayah-wilayah di mana hak atas tanah dipersengketakan? Apakah



masyarakat hutan akan didenda jika gambar drone yang diambil oleh proyek REDD menunjukkan bahwa mereka telah menebang pohon di wilayah mereka, katakanlah, untuk pembangunan rumah masyarakat? Akankah pengembang dan konsultan proyek REDD dapat mengumpulkan informasi penting dari peralatan pemetaan digital yang mereka berikan kepada anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan REDD? Siapa yang mengontrol informasi ini?

Baik terfokus pada praktik pertanian masyarakat hutan atau pemanfaatan hutan mereka, REDD dalam implementasi aktualnya cenderung membahayakan otonomi dan kedaulatan pangan masyarakat. Hal ini juga meningkatkan pengaruh yang dimiliki manajer dan konsultan proyek REDD terhadap penggunaan lahan di hutan di dalam proyek REDD. Dengan menetapkan nilai finansial pohon sebagai penyimpanan karbon, REDD (dan “solusi berbasis alam” secara lebih luas) juga telah memicu perampasan lahan sebagai cara untuk menguangkan nilai karbon baru dari lahan.²³

REDD sebagai pendorong kekacauan iklim

Berangkat dari membuktikan alasan populer untuk menunda penghentian pembakaran bahan bakar fosil, REDD sebenarnya justru mendorong kelanjutan dan perluasan penggunaan bahan bakar fosil. Dengan meningkatnya tekanan pada perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka ‘mengambil tindakan untuk mengurangi dampak iklim mereka’, banyak yang menampilkan diri mereka sebagai pembela hutan. Perusahaan minyak seperti Eni dan Shell menulis tentang “komitmen mereka untuk melindungi dan melestarikan hutan” (Eni) dan bagaimana “solusi berbasis alam dapat memberikan kontribusi besar bagi ambisi Shell untuk menjadi bisnis energi bersih-**nol emisi** pada tahun 2050, atau lebih cepat” (Shell).

Akan tetapi perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki antusiasme yang sebanding untuk berkomitmen “melindungi dan melestarikan” simpanan karbon **bawah tanah** yang terus mereka hancurkan untuk mengekstrak minyak, batu bara, dan gas. Di mana kah komitmen untuk mengakhiri kehancuran penyebab utama kerusakan iklim?

Artikel REDD-Monitor dari Desember 2020 telah merangkum mengapa perusahaan seperti Eni, Shell dan banyak lainnya begitu antusias dengan hutan, REDD dan “solusi berbasis alam” atau solusi iklim alam: “Perusahaan pencemar Besar menyukai mereka karena mereka mengizinkan *bisnis seperti biasa* untuk terus beroperasi. Serangkaian perusahaan minyak dan gas termasuk Shell, BP, Total, Gazprom, Eni, Petronas, PetroChina, dan Occidental, baru-baru ini mengumumkan pengiriman gas alam cair “netral karbon”. Bahan bakar fosil, tentu saja, tidak mungkin “karbon netral” dan mengklaim bahwa emisi telah “dikompensasikan” dengan membeli kredit karbon adalah murni aksi green wash. Penipuan iklim dan solusi iklim seperti REDD ada untuk tujuan memungkinkan industri bahan bakar fosil mencuci tangan dan membersihkan dirinya sendiri.”²⁴

Kondisi ini memungkinkan *green washing* atau pencucian berkedok hijau dari pembakaran bahan bakar fosil yang berkelanjutan, dan eksploitasi ekonomi serta

perusakan sosial-ekologis dan budaya yang terkait erat dengan ekstraktivisme bahan bakar fosil yang membuat REDD jauh lebih buruk daripada sekadar kegagalan skala besar untuk membantu mengurangi hilangnya hutan.

Jutta Kill
Sekretariat WRM

- 1 Branford, S. & T. Borges (2021). Facebook enabling Amazon land grabbing, deforestation, finds investigation. <https://news.mongabay.com/2021/03/facebook-enabling-amazon-land-grabbing-deforestation-investigation/> dan Branford, S. & M. Torres (2017). Crime and not enough punishment: Amazon thieves keep stolen public land. <https://news.mongabay.com/2017/03/crime-and-not-enough-punishment-amazon-thieves-keep-stolen-public-land/>; lihat juga, Forest Trends (2014). Consumer Goods and Deforestation. An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations. http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf
- 2 Untuk statistik tentang deforestasi di Amazon Brasil, lihat proyek PRODES pemerintah Brasil: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes> dan http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5811; untuk tren deforestasi di negara tertentu, lihat juga kumpulan data Global Forest Watch di: <https://tinyurl.com/ncseahyh>
- 3 Lihat contohnya: Song, L. (2019). An even more inconvenient truth. Why carbon credits for forest preservation may be worth than nothing. <https://features.propublica.org/brazil-carbon-offsets/inconvenient-truth-carbon-credits-dont-work-deforestation-redd-acre-cambodia/>; tentang FCPF Bank Dunia, lihat REDD-Monitor (2022). Congo's forest 'emissions reductions programme': Germany, Norway and UK taxpayers paying for nothing, as the World Bank-backed Forest Carbon Partnership Facility produces only 'hot air' emissions reductions. <https://redd-monitor.org/2022/01/19/congos-forest-emissions-reductions-programme-germany-norway-and-uk-taxpayers-paying-for-nothing-as-the-world-bank-backed-forest-carbon-partnership-facility-produces-only/>; WRM (2019): REDD+: A Scheme Rotten at the Core. <https://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/redd-a-scheme-rotten-at-the-core/>; Milne, S. et al. (2019). Learning From 'Actually Existing' REDD+. <https://www.environmentandsociety.org/mml/learning-actually-existing-redd-synthesis-ethnographic-findings>
- 4 German Institute for Development Evaluation (DEval) (2020). Germany's Contribution to the Forest and Climate Protection Programme REDD+. <https://www.deval.org/de/publikationen/germanys-contribution-to-the-forest-and-climate-protection-programme-redd>
- 5 Geist, H. and Lambin, E. F. (2002). Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation. *BioScience*, 52 (2002), 143-150.
- 6 REDD and Natural Climate Solutions are a massive distraction from real climate solutions. REDD-Monitor, 14 December 2021. <https://redd-monitor.org/2021/12/14/redd-and-natural-climate-solutions-are-a-massive-distraction-from-real-climate-solutions/>

- 7 Lund, J. F. et al. (2016). Promising Change, Delivering Continuity: REDD+ as Conservation Fad. World Development. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X15312821> dan Svarstad H. & Benjaminsen, T. (2017). Nothing succeeds like success narratives: a case of conservation and development in the time of REDD, Journal of Eastern African Studies. https://www.researchgate.net/publication/318754737_Nothing_succeeds_like_success_narratives_a_case_of_conservation_and_development_in_the_time_of_REDD
- 8 Lihat Bincang-Bincang 'Carbon Policy is not Climate Policy' oleh Larry Lohmann untuk beberapa alasan mengapa asumsi ini dipertanyakan: <http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/carbon-policy-not-climate-policy>
- 9 WRM (2020). What could be wrong about planting trees? <https://www.wrm.org.uy/publications/what-could-be-wrong-about-planting-trees-the-new-push-for-more-industrial-tree-plantations-in-the-global-south>
- 10 Counsell, S. (2021). Conservation NGOs Gift Polluters a Massive Land Grab called 'Nature Based Solutions'. In: "Nature-based Solutions": Concealing a Massive Land Robbery. WRM Bulletin 255 – March/April 2021. <https://wrm.org.uy/bulletins/issue-255/>
- 11 Lihat contoh, 25 September 2020 surat dari AIDSESEP kepada FCPF di sini: Surat N° 156-2020-Aidesep. <http://www.aidesep.org.pe/sites/default/files/media/COMUNICADOS/Letter%20N%C2%B0%20156-2020-Aidesep%20about%20PRE.pdf>; Forest Peoples Programme (2021). La realidad de REDD en Peru. Entre el dicho y el hecho. https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/la-realidad-de-redd-en-peru-entre-el-dicho-y-el-hecho-para-el-sitio-web_0.pdf dan Rights and Resources Initiative (2018). Mai-Ndombe: Will the REDD+ Laboratory Benefit Indigenous Peoples and Local Communities? <https://rightsandresources.org/publication/mai-ndombe-will-redd-laboratory-benefit-indigenous-peoples-local-communities/>
- 12 Forest Carbon Partnership Facility Takes Aim at Deforestation. <https://archive.md/BDXmG>
- 13 Global Forest Coalition (2020). 15 years of REDD. Has it been worth the money? <https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2020/09/REDD-briefing.pdf> WRM (2019). Misguided funding: Green Climate Fund support for REDD+. <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/misguided-funding-green-climate-fund-support-for-redd>
- 14 Cabello, J. (2013). The World Bank and 'market readiness': A 'carbon bible' for Southern countries. <https://www.twn.my/title2/resurgence/2013/269-270/cover09.htm>
- 15 Fern and Forest Peoples Programme (2011). Smoke and Mirrors: A critical assessment of the Forest Carbon Partnership Facility. <https://redd-monitor.org/2011/03/15/smoke-and-mirrors-a-critical-assessment-of-the-forest-carbon-partnership-facility/>
- 16 <https://www.biocarbonfund-isfl.org/> dan https://www.biocarbonfund-isfl.org/sites/isfl/files/2020-04/ISFL%20CSO%20Briefing_June%202016.pdf untuk ikhtisar tentang siapa yang terlibat dalam inisiatif yang berbeda.
- 17 Lihat antara lain: Foodwatch (2021). Offsetting: 'climate neutral' through forest protection? Assessment of the 'climate neutral' claims related to the Tambopata-area

REDD project in Brazil nut concessions in Madre de Dios, Peru. https://www.foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Windbeutel/Bilder/2021/Dokumente/foodwatch2021_Tambopata-offset-project_Assessment.pdf; West, Th. et al. (2020). Overstated carbon emission reductions from voluntary REDD+ projects in the Brazilian Amazon. PNAS. <https://www.pnas.org/content/117/39/24188>

18 Selain laporan di **17** dan **19**, lihat juga: REDD-Monitor (2017). Is Wildlife Work's Mai Ndombe REDD+ project "additional"? <https://redd-monitor.org/2017/09/13/is-wildlife-works-mai-ndombe-redd-project-additional/>; Seyller, C. et al. (2016). The 'Virtual Economy' of REDD+ Projects. International Forestry Review. <https://bit.ly/3ocO9QQ>; Mulungu, K. (2021). The Luangwa Community Forests Project (LCFP) in Zambia. A review of the biggest REDD+ project in Africa financed by the Italian oil and gas company ENI. Report commissioned by Greenpeace Italy. https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2021/06/719f406b-gp-lcfp_scientific-report_english-version-1.pdf; REDD-Monitor (2019). Indonesia's Katingan REDD project sells carbon credits to Shell. <https://redd-monitor.org/2019/12/12/indonesias-katingan-redd-project-sells-carbon-credits-to-shell-but-that-doesnt-mean-the-forest-is-protected-its-threatened-by-land-conflicts-fire-s-and-a-palm-oil-plantation/>.

19 Sebagian besar kegiatan REDD+ ditemukan di belahan dunia Selatan, tetapi proyek REDD+ juga ada di AS dan Kanada. Lihat misalnya, Ben Elgin (2020). These Trees Are Not What They Seem. How the Nature Conservancy, the world's biggest environmental group, became a dealer of meaningless carbon offsets. Bloomberg Green. <https://www.bloomberg.com/features/2020-nature-conservancy-carbon-offsets-trees/>

20 Di antara proyek-proyek REDD+ yang menimbulkan konflik adalah proyek REDD Koridor Kasigau di Kenya, proyek-proyek REDD Pegunungan Cardamon di Kamboja, proyek-proyek REDD+ Alto Mayo, Cordillera Azul dan Tambopata di Peru, proyek-proyek REDD Russas dan Valparaiso di Brasil, proyek REDD+ Katingan di Indonesia, proyek REDD Mai Ndombe di DR Kongo. REDD-Monitor telah menerbitkan artikel tentang semua proyek ini. www.redd-monitor.org. Lihat juga: Nel, A (2017). Contested carbon: Carbon forestry as a speculatively virtual, falteringly material and disputed territorial assemblage. Geoforum 81: 144–152; Flynn, G. (2021). REDD+ Projects Still Struggling to Live up to Expectations in Cambodia. <https://cambodianess.com/article/redd-projects-still-struggling-to-live-up-to-expectations-in-cambodia>

21 Lihat misalnya, REDD-Monitor (2021). Indigenous Kichwa community takes the Peruvian State and Cordillera Azul National Park to court. <https://redd-monitor.org/2021/07/02/indigenous-kichwa-community-takes-the-peruvian-state-and-cordillera-azul-national-park-to-court/> dan Comunidad Kichwa Puerto Franco se reúne con representantes del Parque Nacional Cordillera Azul y exige que respeten sus derechos. <https://www.idl.org.pe/comunidad-kichwa-puerto-franco-se-reune-con-representantes-del-parque-nacional-cordillera-azul-y-exige-que-respeten-sus-derechos/>

22 Basta! & Amis de la Terre (2013): "REDD+ in Madagascar: You Can't See the Wood for the Carbon". English; <http://vimeo.com/79770272>

23 BBC News Brasil (2021): Documentário: BBC revela venda ilegal de terras na Amazônia pelo Facebook.

24 <https://redd-monitor.org/2021/12/14/redd-and-natural-climate-solutions-are-a-massive-distraction-from-real-climate-solutions/>

Ekstraksi minyak di Amazon Ekuador
Foto: Ecuador sin petróleo



Apakah semua Karbon Sama? Karbon Fosil, kekerasan dan kekuasaan

Asumsi yang mendasari REDD adalah kebohongan dan tipu daya: Bahwa dampak iklim dari semua karbon adalah sama - baik itu karbon yang dilepaskan dari tumbuh-tumbuhan ('Karbon Biotik') atau karbon yang dilepaskan dari pembakaran minyak, gas atau batu bara ('Karbon Fosil'). Asumsi ini mengaburkan fakta bahwa pembakaran 'Karbon Fosil' mendorong perubahan iklim. Yang tersembunyi dari kebohongan ini adalah kekerasan, perusakan, dan pelanggaran yang terjadi di akar kerajaan bahan bakar fosil. Jadi, apa sebenarnya perbedaannya dan mengapa begitu penting?

Ilmuwan Konvensional dan para pembuat keputusan sebagian besar mendukung gagasan bahwa dampak iklim dari semua **karbon** adalah sama... baik itu **karbon** yang dilepaskan dari tumbuh-tumbuhan atau **karbon** yang dilepaskan dari pembakaran minyak, gas, atau batu bara. Ini adalah asumsi dasar utama di balik pasar karbon, REDD+, '**emisi nol bersih**', 'deforestasi nol bersih' yang sekarang juga disebut '**solusi berbasis alam**.' Pada dasarnya, penyeimbangan karbon atau **karbon offset** tidak dapat ditetapkan tanpa asumsi bahwa emisi dari sumber yang berbeda memiliki dampak yang sama terhadap iklim.

Terlepas dari sumbernya, ketika **karbon** bersentuhan dengan oksigen, ia berubah menjadi gas karbon dioksida. Akumulasi karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer membuat iklim tidak seimbang. Di luar dampak iklim, akumulasi karbon dioksida yang berlebihan ini juga erat kaitannya dengan kisah kekerasan, kekuasaan, dan perampasan.

Dalam konteks kekacauan iklim saat ini, mengklaim bahwa dampak iklim dari semua **karbon** adalah sama adalah kebohongan yang berbahaya.

Mengapa begitu banyak orang, termasuk para ilmuwan seperti *Intergovernmental Panel on Climate Change* (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim / IPCC), terus bersikeras bahwa tidak ada perbedaan antara dampak iklim dari **karbon** yang ada di atas tanah dan yang dilepaskan ketika minyak, batu bara, dan gas diekstraksi dari tanah?

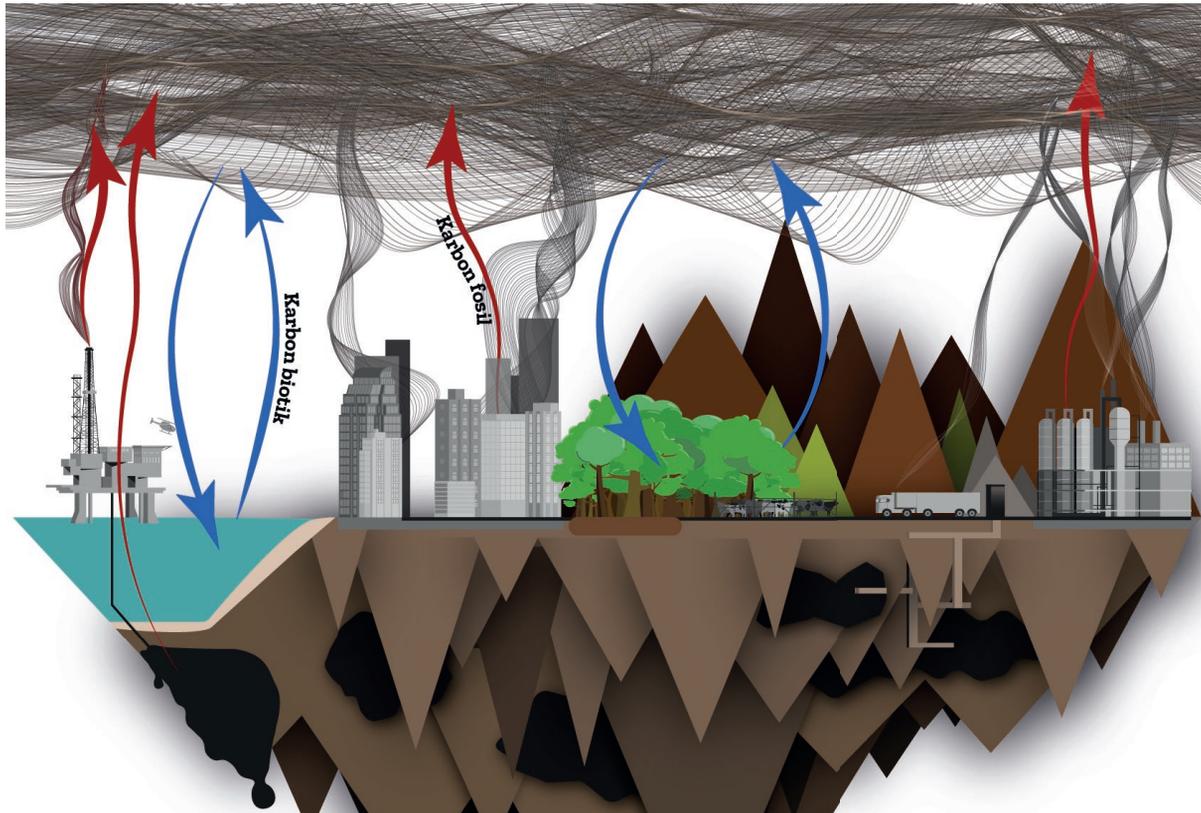
Tentu saja lebih mudah dan nyaman untuk mengasumsikan bahwa dampak iklim dari semua karbon adalah sama. Ini adalah dasar untuk mengklaim bahwa gas rumah kaca dari sumber yang berbeda (pabrik, penyulingan, penggunaan lahan, transportasi, produksi semen, pembangkit energi dan sebagainya) dan bahkan gas rumah kaca yang berbeda (karbon dioksida, metana dan gas lain yang terkait dengan produksi industri), memiliki dampak yang sama pada iklim dan oleh karena itu, kerusakan yang disebabkan oleh emisi dari satu sumber dapat dikompensasikan dengan mengurangi emisi dari sumber lain. Itulah sebabnya para ilmuwan yang menasihati negosiasi iklim PBB mengelompokkan berbagai gas yang menyebabkan perubahan iklim menjadi unit setara karbon dioksida atau CO₂e. Kesetaraan ini merupakan prasyarat untuk **offset**. Tetapi karbon dari sumber yang berbeda tidak sama. Klaim yang menyatakan semua sama menyembunyikan sejarah kekerasan, konflik dan penindasan terkait dengan ekstraksi **karbon** di sebagian besar dunia.

Penting untuk diketahui bahwa dampak iklim dari pelepasan **karbon**, yang terkurung di bawah tanah selama jutaan tahun dan yang sekarang dibakar sebagai minyak bumi, gas atau batu bara dalam jumlah besar dalam waktu singkat, berbeda dengan dampak yang ditimbulkan ketika siklus **karbon** yang bergerak cepat di mana beberapa **karbon**, disimpan sementara di atas tanah, di pohon misalnya, dilepaskan.

Dalam konteks kekacauan iklim saat ini, mengklaim bahwa dampak iklim dari semua karbon adalah sama adalah kebohongan yang berbahaya

Dan mengapa perbedaan ini begitu penting?

Karbon yang beredar di udara, lautan, vegetasi dan tanah (di atas tanah) sering disebut sebagai **Karbon Biotik**. Jenis karbon ini dapat disimpan sementara di salah satu tempat, termasuk vegetasi, seperti pohon. Dari sana, **Karbon Biotik** ini dapat dengan mudah dilepaskan secara alami, kebakaran, badai atau wabah serangga adalah beberapa contoh yang umum. Namun, perusakan hutan skala besar yang bersejarah, terutama di negara-negara industri dan untuk perluasan pertanian industri, telah menghasilkan banyak **karbon** yang dapat disimpan di hutan alih-alih terakumulasi



di atmosfer. Pembukaan hutan telah menciptakan siklus **Karbon Biotik**: terlalu terbentuk di atmosfer dalam menambah karbon dioksida yang telah akibat dari pembakaran bahan bakar fosil.

lahan dan penggundulan ketidakseimbangan dalam banyak **Karbon Biotik** yang bentuk **karbon** dioksida. Ini terakumulasi di atmosfer sebagai

Untuk membakar bahan bakar fosil, simpanan **Karbon Fosil** purba yang telah terkunci di bawah tanah selama jutaan tahun pun diekstraksi dan dihancurkan. Endapan bawah tanah itu terdiri dari sisa-sisa tanaman yang tumbuh jutaan tahun yang lalu. Proses yang mengubah vegetasi menjadi **Karbon Fosil** butuh waktu yang sangat lama, tekanan dan panas, dan mengakibatkan **karbon** menjadi sangat pekat. Konsentrasi karbon yang tinggi dalam deposit **Fosil Karbon** di bawah tanah membuatnya menjadi pembawa energi yang sangat kuat. **Karbon Fosil** dalam jumlah kecil mengandung lebih banyak energi dibandingkan dengan yang terkandung dalam kayu atau arang.

Untuk mengubah **Karbon Fosil** menjadi bensin, solar, dan batu bara, manusia membutuhkan banyak mesin untuk menggali dan mengekstrak **karbon** di deposit bawah tanah itu. Ketika **Karbon Fosil** yang telah terkunci jauh dari atmosfer selama jutaan tahun ini kemudian dibakar sebagai bahan bakar fosil, ia akan tetap berada di atmosfer dalam waktu yang lama.

Vegetasi, lautan, dan tanah dunia dapat menyerap banyak nya karbon ini namun tentu saja tidak mampu menyerap dengan cepat banyak dan cukup cepat, untuk menahan ketidakseimbangan CO_2 di atmosfer bumi. Akibatnya, banyaknya kelebihan **Karbon Fosil** ini menumpuk di atmosfer berdampak pada iklim global.

Sebagian besar ilmuwan sekarang menyadari bahwa pembakaran **Karbon Fossil** mendorong perubahan iklim. Namun, dalam pembicaraan dan rekomendasi kebijakan mereka memperlakukan **Karbon Fossil** dan **Karbon Biotik** seolah memiliki dampak yang sama terhadap iklim. Konsekuensinya adalah bahwa perdebatan iklim lebih difokuskan pada gas rumah kaca yang 'setara' di atmosfer bukannya mencegah lebih banyak **Karbon Fossil** yang digali dari deposit bawah tanah.

Masalah yang timbul adalah dengan mempromosikan asumsi yang salah bahwa semua **karbon** adalah sama, para ilmuwan dan pembuat kebijakan juga secara radikal meremehkan kontribusi industri bahan bakar fosil sebagai penyebab utama kekacauan iklim. Dengan semakin parahnyanya kerusakan, klaim bahwa semua **karbon** adalah sama juga membantu menyembunyikan kekerasan, perusakan ekologi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah menjadi fondasi perusahaan kerajaan bahan bakar fosil. Hal ini juga menyebarkan kekerasan dan penyalahgunaan ini ke tempat dimana proyek **penggantian kerugian** seharusnya menyimpan jumlah **karbon** yang setara dari **karbon** yang dilepaskan.

Kenyamanan dari narasi bahwa 'semua **karbon** adalah sama' telah memungkinkan perusahaan bahan bakar fosil dan semua industri yang bergantung pada bahan bakar tersebut untuk melanjutkan bisnis seperti biasa, bahkan setelah hampir tiga dekade negosiasi iklim PBB. Narasi ini juga telah melindungi keuntungan dan keuangan perusahaan, sementara slogan '**karbon netral**' atau '**emisi nol bersih**' memberikan legitimasi bagi perusahaan untuk melanjutkan kehancuran.

Industri bahan bakar fosil harus bertanggung jawab!

Kapitalisme sangat bergantung pada energi **Karbon Fossil**. Bahan bakar fosil adalah mesin dan bahan yang membuat kapitalisme (hijau) global kecanduan.

Kekacauan iklim adalah konsekuensi langsung dari penghancuran yang terjadi terus-menerus terhadap cadangan **Karbon Fossil** bawah tanah dan pembakarannya sebagai bahan bakar fosil. Narasi palsu untuk mengklaim kesetaraan antara **Karbon Biotik** dan **Karbon Fossil** jelas bersifat politis. Hal ini memungkinkan industri bahan bakar fosil dan sekutunya untuk melanjutkan bisnis mereka yang sangat menguntungkan dengan terus merusak alam. Kesetaraan seperti itu adalah contoh lain dari kekuatan bahan bakar fosi dalam industri yang selama dua abad terakhir telah menghancurkan dan memiliterisasi wilayah yang didudukinya untuk mengekstraksi, memproses, dan mengangkut **Karbon Fossil** di sepanjang jaringan infrastruktur, jaringan pipa, jalan, pelabuhan, dan infrastruktur yang sangat luas seperti saluran air, sampai ke kilang penyulingan polusi yang mematikan dan titik-titik polusi di sekitar mereka.

Perusahaan minyak raksasa Shell menyebarkan setidaknya tiga kebohongan ketika, perusahaan ini mengklaim telah mengkompensasi **Karbon Fossil** yang diambilnya dengan menanam perkebunan pohon skala besar. Kebohongan pertama adalah bahwa **Karbon Fossil** dapat disetarakan dan kerusakan iklim dikompensasikan dengan cadangan sementara **Karbon Biotik** di atas permukaan tanah. Kebohongan kedua adalah bahwa 'masalah perubahan iklim' seolah-olah sedang diatasi, sedangkan

kenyataannya adalah bahwa penyeimbangan memungkinkan pembakaran bahan bakar fosil yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah bahwa 'alam' adalah gratis untuk diambil oleh perusahaan sebagai penyimpan penyeimbang **karbon** mereka. Tentu saja ini tidak benar.

Kebohongan dan narasi palsu yang ada di balik asumsi ini harus diungkap. Penerimaan dan pemakluman terhadap asumsi yang salah bahwa **Karbon Fosil** dan **Karbon Biotik** mempengaruhi iklim dengan cara yang sama berarti bahwa kekacauan iklim, dan kerusakan wilayah akan semakin dipercepat.

Joanna Cabello
Sekretariat WRM

Bacaan lebih lanjut:

Carbon Trading – A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power, Larry Lohmann: <https://www.daghammarskjold.se/publication/carbon-trading-critical-conversation-climate-change-privatisation-power/>

What do forests have to do with climate change, carbon markets and REDD+? - A Toolkit for community activists: <https://www.wrm.org.uy/publications/what-do-forests-have-to-do-with-climate-change-carbon-markets-and-redd>

Chasing Carbon Unicorns: The Deception of Carbon Markets and “Net Zero”: <https://www.foei.org/publication/chasing-unicorns-carbon-markets-net-zero/>



Mengakhiri kolonialisme dengan mengakhiri REDD+

Agar REDD+ berhasil, masyarakat harus dibagi orang ke dalam tiga kelas. Salah satunya adalah yang orang yang seharusnya menyelamatkan hutan - 'orang yang aktif dan berinisiatif'. Kelas kedua adalah orang yang membiarkan hutan mati ketika tidak ada uang REDD+ yang dibayarkan untuk menjaga hutan tetap hidup - 'makhluk pasif yang bisa ditebak'. Dan kelas ketiga adalah orang memuji upaya kelas satu. Ini berasal dari perpecahan di antara manusia yang telah diciptakan atau diciptakan kembali oleh para kolonialis dan rasis selama berabad-abad. Faktanya adalah bahwa REDD+ akan bekerja efektif ketika sebagian besar orang-orang adalah kolonialis. Bagaimana REDD+ berhasil menutupi sifat aslinya selama bertahun-tahun?

Sebelum dapat menghasilkan dan membagikan uang, REDD+ pertama-tama harus membagi masyarakat dunia menjadi tiga kelas yang berbeda.

Kelas pertama adalah kelas yang konon menyelamatkan hutan. Ini adalah kelas

yang membayar uang yang, menurut klaimnya, akan membuat perbedaan antara menyelamatkan hutan dan membiarkan hutan mati.

Sebagai imbalan untuk membayar uang yang seharusnya membuat perbedaan ini, kelas pertama ini diizinkan untuk terus mengekstraksi dan menggunakan bahan bakar fosil – kegiatan yang penting bagi identitasnya, kekayaannya, kekuatannya. Untuk kelas ini, REDD+ harus menjadi investasi yang membuahkan hasil. Untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk REDD+, artinya satu dolar yang mereka hemat membantu agar terus membakar bahan bakar fosil.

Kemudian ada kelas kedua. Ini adalah kelas orang-orang yang seharusnya membiarkan hutan mati ketika tidak ada uang REDD+ yang dibayarkan untuk menjaga mereka tetap hidup.

Kelompok ini mungkin akan membiarkan hutan mati karena, tanpa uang REDD+, kelas ini tidak cukup kuat untuk menghentikan penebangan, pertambangan, bendungan, dan pertanian perkebunan komersial ke dalam wilayahnya. Atau bisa jadi membiarkan hutan mati karena, tanpa uang REDD+, mereka tidak dapat belajar bagaimana membuat karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dapat diserap. Atau mungkin karena, tanpa uang REDD+, kelas ini terlahir sebagai kelompok penghancur hutan, yang dengan bodohnya **'menebang dan membakar'**, mengumpulkan kayu bakar dan barang-barang hasil hutan, menyewakan diri mereka sendiri ke perusahaan penebangan atau pertambangan, atau membangun pemukiman dan menetap ditempat yang tidak seharusnya.

Apapun itu, agar REDD+ bekerja, kelas kedua adalah makhluk pasif yang membuat kelompok pertama menjadi orang-orang aktif dengan inisiatif menonjol secara kontras. Jika tidak, sangat sulit untuk membuktikan bahwa pohon-pohon yang masih tegak adalah 'hasil' dari uang REDD+ bukannya kemampuan pengorganisasian masyarakat pedesaan sendiri, atau peningkatan curah hujan.

Akhirnya, ada kelompok ketiga. Kelas ini adalah penonton untuk klaim kelas pertama bahwa mereka menyelamatkan hutan dunia dari malapetaka dan tidak akan mengikuti dari kelambanan kelompok kelas kedua. Tepuk tangan kelas ketiga ini sangat penting untuk kelangsungan hidup kelas pertama.

Dualisme Lama

Apakah situasi kontras antara kelas satu dan kelas dua terdengar familiar? Tentu saja karena itu adalah keturunan dari perpecahan di antara manusia yang telah diciptakan dan diciptakan kembali oleh para kelompok kolonialis dan rasis selama berabad-abad.

Kesenjangan antara kelas pertama dan kedua adalah seperti pembagian imperialis lama antara penakluk kulit putih yang "membuat sejarah" dan non-kulit putih sebagai kelompok "orang tanpa sejarah"¹ yang dengan bodohnya mengolah lahandengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Ini seperti kontras lama yang dibuat oleh para pemikir seperti John Locke antara orang Eropa yang

Bagaimana REDD+ berhasil menutupi sifat kolonialnya selama bertahun-tahun?

‘produktif’, pemilik properti pribadi dan Penduduk Asli, yang tidak pernah melakukan ‘perbaikan’ atas tanah mereka dan dengan demikian tidak berhak atas lahan mereka sendiri.² Ini seperti dikotomi yang dipromosikan kapitalis ketika mereka mengatakan bahwa ‘inisiatif’ dan ‘kecerdasan’ khas merekalah yang membuat mereka berhak untuk memanen keringat para pekerja mereka yang malas dan kurang cerdas.

Faktanya, REDD+ sangat manjur di situasi paling kolonialis. Saat kelas kedua digambarkan semakin tidak berdaya, semakin mudah memprediksi masa depan hutan mereka, maka semakin mudah untuk menemukan angka yang tepat untuk berapa banyak pohon yang telah ‘diselamatkan’ oleh uang REDD+. REDD+ tidak hanya didasarkan pada rasisme; program ini memiliki insentif rasisme bawaan yang halus yang semakin meningkat.

Mengapa semua ini memicu begitu sedikit skandal? Bagaimana REDD+ berhasil menutupi sifat kolonialnya selama bertahun-tahun?

Bersembunyi di balik Jargon

Rahasianya adalah **penghitungan karbon**.

Penghitungan karbon REDD+ seperti hukum dan literatur kolonialisme klasik. Keberadaan program ini untuk menjaga ketidaksetaraan. Perbedaannya adalah **penghitungan karbon** REDD+ tidak menyatakan standar gandanya secara terbuka. Itu menyembunyikannya di bawah jutaan halaman jargon teknis. Itu tidak pernah menggunakan kata-kata seperti ‘orang kelas dua’ dan ‘orang kelas satu’. Setiap istilah dan kata-kata dipilih dengan cermat sehingga program ini tidak pernah menggunakan kata-kata seperti ‘limbah’ untuk menyebut tanah orang kelas dua, atau ‘hektar produktif’ untuk menyebut tanah orang kelas satu. Alih-alih menggunakan istilah ‘baseline’ dan ‘proyek atau program yang didanai oleh REDD+’.

‘Baseline’ adalah kata sandi untuk ‘nasib’. Garis dasar adalah apa pun yang telah diputuskan oleh kekuatan kolonial tidak dapat diubah sampai mereka tiba untuk membuat perbedaan. Mungkin sifat statis dari orang biadab (baik bangsawan maupun sebaliknya) yang mendiami wilayah hutan. Konsep ini mungkin seperti visi Locke tentang Amerika sebagai wilayah yang ditakdirkan untuk keterbelakangan abadi sampai kedatangan orang Eropa. Atau mungkin merujuk pada barisan kemajuan kapitalis yang tak terbendung ke dalam ‘zona pengorbanan’ ekstraksi yang semakin banyak di bumi atau di luar angkasa: sebuah takdir universal yang sudah lama diprediksi oleh banyak ideolog kapitalis hari ini.

Bagaimanapun, tingkat kerusakan hutan ‘baseline’ di zona proyek REDD+ dapat diprediksi dengan mudah secara statistik – baik melalui pemodelan ekonomi, citra satelit, pengukuran pohon, ekstrapolasi linier dari contoh yang dipilih, atau metode lainnya. Akuntan karbon REDD+ secara profesional berkomitmen pada asumsi bahwa, pada prinsipnya, mereka dapat memprediksi masa depan hutan milik masyarakat hutan dengan cara yang sama seperti ahli kimia memprediksi hasil reaksi kimia.

Proyek REDD+ berbeda. Di bawah aturan **penghitungan karbon** REDD+, apa yang akan dilakukan proyek REDD+ tidak pernah boleh diprediksi secara statistik dari perilaku konsultan REDD+ atau uang REDD+ sebelumnya. Tidak seperti baseline,

REDD+ tanpa kolonialisme sama mustahilnya dengan ekstraktivisme tanpa kolonialisme.

proyek REDD+ tidak pernah ditentukan oleh masa lalu. Sementara masyarakat hutan dibayang-bayangi oleh takdir statistik, tidak demikian halnya dengan penyandang dana REDD+.

Tanpa fiksi dualistik ini, proyek REDD+ tidak akan pernah bisa didefinisikan sebagai ‘tambahan’ (membuat perbedaan). ‘Hasil’ yang diberikan uang REDD+ tidak akan pernah bisa dihitung, dan izin polusi karbon tidak akan pernah bisa dihasilkan.

Konsultan REDD+ – dan perusahaan serta pemerintah tempat mereka bekerja – tidak diragukan lagi akan sangat tersinggung jika akuntan karbon mencoba memprediksi perilaku karbon mereka di masa depan berdasarkan catatan masa lalu mereka yang suram, untuk kemudian dirangkum menjadi satu angka. Masyarakat hutan, bagaimanapun, diharapkan untuk duduk diam sementara akuntan karbon mendiktekan kepada mereka nasib tak terelakkan dari wilayah mereka jika mereka tidak menerima proyek-proyek REDD+.

Dalam banyak hal, **penghitungan karbon** REDD+ hanyalah satu lagi praktik sejarah kolonialis. Sembari memperlakukan penghuni hutan sebagai orang yang terjebak oleh masa lalu, akuntan karbon justru menghapus bagian-bagian yang tidak menyenangkan dari catatan mereka sendiri. REDD+ tanpa kolonialisme sama mustahilnya dengan ekstraktivisme tanpa kolonialisme.

Bergerak Maju dalam Kecaman REDD+

REDD+ perlu dihilangkan, bukan hanyadireformasi.

Rasisme **penghitungan karbon** REDD+ jauh lebih dalam dari sekadar fakta bahwa akuntan karbon biasanya berkulit putih (walaupun kenyataannya demikian). Masalah sebenarnya adalah bahwa **penghitungan karbon** REDD+ kental dengan kolonialis bahkan ketika digunakan oleh orang-orang dengan kulit hitam, coklat, kuning atau merah. Dan semakin baik REDD+ melakukan tugas teknisnya untuk menunjukkan bahwa uang REDD+ akan membuat perbedaan, semakin kental kolonialisnya.

Ironisnya, aroma kolonialis ini tercium bahkan ketika REDD+ mencoba memperlakukan Masyarakat Adat dan petani sebagai pihak yang aktif dalam menyelamatkan hutan, bukan sebagai perambah hutan yang tidak bertanggung jawab. REDD+ tidak punya pilihan selain berasumsi bahwa praktik masyarakat hutan, betapapun baiknya, dapat dibuat lebih efektif secara terukur dengan uang REDD+. Tetapi uang REDD+ membutuhkan penghitungan molekul karbon untuk mengukur hak polusi yang diberikan REDD+ kepada industri berbahan bakar fosil.

Artinya praktik-praktik yang bermanfaat bagi masyarakat hutan hanya dapat dikenali dan ‘diaktifkan’ ketika mereka dicatat, diukur, dikonseptualisasikan dan diorganisasikan kembali, disertifikasi dan dibayar oleh lembaga-lembaga

yang biasanya didominasi oleh pihak Utara. Institusi yang terikat kontrak untuk mempertahankan ekstraksi minyak, batu bara, dan gas yang berkelanjutan yang merupakan bahaya bagi banyak masyarakat hutan lainnya di seluruh dunia.

Jadi sekali lagi ini adalah ‘suplemen putih’ yang membuat uang REDD+ mengalir. Bukan pengorganisasian politik di antara masyarakat hutan itu sendiri, yang dianggap tanpa bukti, tidak akan pernah efektif. Di bawah REDD+, Masyarakat Adat dan petani dapat memperoleh pengakuan atas praktik kehutanan mereka – dan agensi mereka sendiri – hanya jika mereka diajari untuk memperlakukan mereka sebagai sarana untuk membuat hak polusi murah bagi kekuatan dominan.

Inilah sebabnya mengapa REDD+ perlu dihilangkan, bukan hanyadireformasi. Reformasi yang mendesak ‘garis dasar yang lebih akurat’ dan ‘REDD+ Adat’ hanya dapat mengarah pada kolonialisme yang intensif dan melemahkan gerakan hutan. Pada saat bahkan beberapa pendukung lama **penyeimbangan karbon** menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi mempertahankan praktik tersebut³, sudah waktunya bagi para pengkritik REDD+ untuk menjadi lebih keras sehingga lembaga tersebut dapat diakhiri untuk selamanya.

Larry Lohmann
The CornerHouse

1 Eric Wolf, *Europe and the People Without History*, 2010, <https://www.ucpress.edu/book/9780520268180/europe-and-the-people-without-history>

2 The 18th Century Common, *Locke’s American Wasteland*, 2018, <https://www.18thcenturycommon.org/lockes-american-wasteland/>

3 REDD/Monitor, *Bloomberg Green: “How the Carbon Offset Market is Slowing the Fight Against Climate Change”*, 2021, <https://redd-monitor.org/2021/04/29/bloomberg-green-how-the-carbon-offset-market-is-slowing-the-fight-against-climate-change/>; and *The Conversation*, *Climate scientists: concept of net zero is a dangerous trap*, 2021, <https://theconversation.com/climate-scientists-concept-of-net-zero-is-a-dangerous-trap-157368>



“Bukan hanya tanah ... Mereka juga merampas identitas kami”

Wawancara dengan Tom Goldtooth, Indigenous Environmental Network

Untuk menggambarkan apa arti REDD+ bagi Masyarakat Adat dan perjuangan mereka, mekanisme ini perlu dimasukkan ke dalam refleksi yang lebih luas tentang sejarah Masyarakat Adat. Sebuah sejarah yang ditandai dengan perlawanan terhadap penjajahan dan rasisme serta kapitalisme dan globalisasi neoliberal. Dalam perspektif ini, resistensi terhadap REDD+ bukan hanya menjadi masalah bagi Masyarakat Adat di hutan tropis; ini tentang perjuangan global historis mereka untuk keadilan.

WRM berbicara dengan Tom Goldtooth, dari the Indigenous Environmental Network (Jaringan Lingkungan Adat), yang juga anggota Komite Penasihat WRM.

WRM: Tolong ceritakan sedikit tentang diri Anda, mengapa dan bagaimana Anda terlibat dengan isu REDD+, mengingat Anda berasal dari daerah tanpa hutan tropis atau proyek REDD+.

[Inti masalahnya selalu tanah. Dan itu mencakup semua sumber daya dan konsep yang berbeda tentang cara memandang alam.]

Tom: Saya diberi mandat oleh beberapa suku Pribumi, pemimpin spiritual Pribumi dan kelompok akar rumput pada tahun 1998 ketika kami mengadakan pertemuan tentang perubahan iklim di Indigenous Environmental Network (Jaringan Lingkungan Adat / IEN) yang saya wakili. Saya pikir langkah baiknya jika orang mengetahui bahwa 574 suku individu kami, termasuk Penduduk Asli Alaska, dan beberapa aspek kedaulatan kami diakui oleh pemerintah AS. IEN adalah organisasi berbasis komunitas akar rumput dengan keanggotaan kami. Kami bukan perwakilan dari kepemimpinan Pribumi terpilih. *Tradisional* yang saya maksud disini adalah menggunakan cara yang masih asli.

Pada tahun 1700-an dan 1800-an terjadi konflik yang luar biasa dengan kedatangan para pendatang, yaitu para penjajah dari Eropa. Pada awalnya, kami cukup baik kepada para pemukim; itulah sifat kita, bagaimana kita. Tetapi setelah beberapa saat, kami mengetahui bahwa orang-orang ini memiliki agenda mereka sendiri: yaitu mengambil alih tanah kami. Dan selalu diakui di Utara bahwa penjajahan selalu datang dengan datangnya Gereja. Gereja harus memberikan restunya kepada penjajah ini untuk pengambilalihan seluruh negeri. Hukum internasional pada waktu itu didasarkan pada hukum dari Eropa, tetapi tetap saja ilegal untuk menaklukkan seluruh benua tanpa mendapatkan restu dari Gereja. Bagi penjajah ini, kami tidak beradab. Bahkan, mereka mengatakan kami tidak memiliki jiwa, jiwa, bahwa kami dianggap lebih rendah dari manusia. Itu adalah bagian dari proses penjajahan. Sangat penting untuk memahami beberapa latar belakang Masyarakat Adat di Utara. Tetapi proses yang sama pada dasarnya terjadi di tanah dan wilayah Amazon dan hutan tropis dengan Penduduk asli di sana, masyarakat adat dan penduduk hutan lainnya.

Jadi ada sejarah panjang antara penjajahan dan perampasan tanah, perampasan. Inti masalahnya selalu tanah. Dan itu mencakup semua sumber daya dan konsep yang berbeda tentang cara memandang alam. Misalnya, para penjajah yang datang ke Amerika Utara menginginkan pohon-pohon di pantai Timur untuk membangun armada pengiriman mereka. Armada-armada pelayaran tersebut dioperasikan baik sebagai bisnis Negara, perorangan maupun oleh korporasi. Dan banyak orang tidak tahu bahwa selama ratusan ribu tahun mereka telah menghancurkan hutan mereka sendiri di Eropa. Jadi mereka harus mencari lebih banyak kayu untuk kapal mereka dan produk lainnya. Misi orang Spanyol mencari bahan galian, sementara Belanda punya kepentingan sendiri-sendiri, tapi semua berdasarkan kolonialisme.

Jadi menimbang hal itu, Jaringan kami diberi tanggung jawab untuk mulai bekerja untuk perubahan iklim pada tahun 1998. Buenos Aires adalah kota pertemuan iklim PBB pertama saya dan waktuitu hanya ada lima Masyarakat Adat yang hadir. Saya tidak terbiasa dengan isu seputar mekanisme **penyeimbangan karbon**. Tetapi ketika saya terus menghadiri pertemuan-pertemuan itu, saya segera mendengar tentang mekanisme perdagangan emisi dan saya mendengar lebih banyak tentang Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) dan itu menarik bagi saya, karena IEN tidak terbatas di Amerika Serikat atau Kanada. Dalam pembentukan Jaringan kami pada tahun 1990, kami selalu memiliki partisipasi Masyarakat Adat dari Selatan

global, terutama di sekitar masalah perlindungan keanekaragaman hayati. Itulah tahun-tahun awal terbentuknya UN Convention of Biological Diversity (CBD). Pada tahun-tahun awal tahun 1990, sebagian besar masalah utama adalah tentang bahan kimia beracun di sekitar tempat pembuangan limbah, pembuangan beracun, dan pembuangan limbah nuklir di tanah adat. Tetapi ketika kami melanjutkan, kami mulai mengidentifikasi terminologi ketidakadilan **lingkungan** dan **rasisme lingkungan**, yang memperluas dialog dengan 574 suku kami dan lebih jauh lagi dengan orang-orang daerah Kanada.

Terminologi tersebut menjadi salah satu kerangka kerja kami untuk mengatasi masalah ketidakadilan oleh pemerintah Amerika Serikat yang kami hadapi. Apa yang kami lihat sebagai ekosistem yang sehat, yang mereka lihat apa yang disebut *sumber daya*. Masyarakat Adat yang dulu dan merupakan praktisi pengetahuan Adat, cara hidup Adat, selalu menasihati kita untuk tidak memandang alam sebagai sumber daya alam, jangan pernah memandangnya sebagai sumber daya. Jadi, kami dipandu oleh pemegang pengetahuan tradisional, yang selalu mengatakan bahwa kami tidak boleh berpartisipasi dalam kerangka kolonialis yang melihat alam dari perspektif kapitalis atau moneter. Jaringan kami dibentuk oleh perwakilan komunitas seperti ini dari suku kami, pribumi yang masih meneruskan pengetahuan tradisional Pribumi kami, instruksi leluhur yang diberikan kepada kami sejak awal.

Dalam banyak hal, perjuangan melawan globalisasi ekonomi ini dan melawan pasar karbon adalah perjuangan yang sama.

Sejak kami berpartisipasi dalam pembentukan IEN dari Masyarakat Adat dari Amerika Latin dan Afrika, dan Filipina, kami selalu menempatkan diri pada posisi bahwa kami juga harus mengeksplorasi apa masalah mereka. Kami ingin terlibat dalam isu-isu yang dapat melanggar hak asasi manusia saudara-saudari dari Selatan global. Itu sebabnya saya menerima undangan untuk pergi ke [pertemuan iklim PBB di] Durban. Saya mulai melihat bahwa rencana mitigasi bergabung di tingkat PBB, dan mereka berbicara seolah-olah rencana di pasar karbon itu akan menyelamatkan Ibu Pertiwi dan menyelamatkan Orang-orang kita, dan membawa kita ke tingkat di mana kita tidak perlu khawatir tentang pemanasan global, tentang perubahan iklim. Saya selalu berhati-hati terhadap pemerintah federal di sini di AS, tetapi saya lebih berhati-hati terhadap pertemuan PBB di mana mereka membawa pemerintah, tetapi juga Bank Dunia, LSM besar, dan perusahaan. Jadi semua bendera merah saya padam. Dalam pertemuan-pertemuan PBB inilah saya mendengar tentang Kyoto dan beberapa perdebatan seputar hutan, dan bahwa ada perjuangan untuk mencegah mereka menjadi skema **penggantian kerugian**. Jadi, saya belajar bagaimana CDM menjadi skema **offset** terbesar di dunia dan kemudian semua hal ini menjadi satu termasuk hutan sebagai penyerap karbon. Ini benar-benar menjadi perhatian bagi saya.

Saya memang berasal dari daerah berhutan di sini di Great Lakes di sepanjang perbatasan AS dan Kanada. Saya dikelilingi oleh hutan. Saya mengerti hubungannya dengan pohon. Pohon-pohon memiliki semangat. Menurut pengetahuan tradisional kami, kami memahami bagaimana pohon bernafas, jadi saya memahami konsep

karbon. Tetapi saya segera mengetahui bahwa orang-orang yang tinggal di hutan di belahan dunia Selatan benar-benar menghadapi risiko yang sangat besar dan ada masalah serius, seperti perampasan tanah jika hutan dimasukkan tidak hanya dalam penyerap karbon ini tetapi juga sebagai CDM. Dan saya harus melihat terminologi baru, seperti konsep aforestasi, dan reboisasi, dan bagaimana itu bisa dianggap sebagai metodologi dalam CDM. Tapi langsung menyebut mereka sebagai kredit karbon hutan, adalah sesuatu yang mulai kami atur, tetapi kemudian setelah beberapa saat muncul RED, dengan satu D, dan kemudian menjadi REDD, dan kemudian REDD+.

Seperti CDM, REDD+ diluncurkan oleh Bank Dunia. Saya mulai melihat mekanisme keuangan yang mendukung solusi palsu ini, lembaga pembangunan. Di sinilah saya mulai membuat hubungan antara bagaimana kita sebagai IEN dapat membantu mendukung hak-hak saudara Adat kita di belahan bumi Selatan di kawasan hutan, karena kita juga terlibat, sejak tahun 1996, dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Dan dengan pergi ke CBD, masalah-masalah yang menjadi perhatian ini mulai muncul bersama, memahami peran Bank Dunia dan lembaga-lembaga pembangunan. Mereka berada di balik sesuatu yang sangat kita kenal di sini di Utara dan itu adalah globalisasi neoliberal yang mulai menunjukkan kepalanya yang buruk. Dan saya ingat kami menggunakan istilah itu, globalisasi ekonomi dan kaitannya dengan kapitalisme.

Bagian dari IEN kemudian juga membangun aliansi dengan orang kulit berwarna yang terpinggirkan lainnya di sini di AS, dan bekerja dan membangun jaringan secara global dengan organisasi yang memerangi kapitalisme, memerangi globalisasi ekonomi. Jadi, semuanya mulai menyatu bagi kami, untuk lebih terlibat dan mencoba menghentikan REDD+, itu menjadi simbol perlawanan kami. Dalam banyak hal, perjuangan melawan globalisasi ekonomi ini dan melawan pasar karbon adalah perjuangan yang sama. Saya suka menekankan itu. Dan, jika bagi kami pasar karbon adalah bagian dari kelanjutan kolonisasi, tidak mengherankan bahwa selama pertemuan iklim PBB tahun 2007 di Bali, Bank Dunia, PBB dan paradigma pembangunan menemukan cara untuk mengatasi **penyeimbangan hutan**, yang ditulis dalam akronim dan bahasa yang aneh seperti REDD+. Saya merasa bahwa itu dimaksudkan untuk menciptakan kebingungan dan konflik, sangat sarat dengan informasi yang salah tentang iklim.

REDD+ hanyalah kelanjutan dari logika kolonial, kapitalis, patriarki yang sama yang telah membawa planet ini ke jurang kekerasan dan kerusakan.

Tentu saja, organisasi konservasi berada di belakangnya, seperti WWF, dan kami sudah mulai diprofilkan sebagai orang jahat. Bahkan pada saat itu, LSM mencoba untuk menemukan Masyarakat Adat yang ramah yang akan bekerja dengan mereka, dan mereka mencoba untuk menempatkan kita berlawanan satu sama lain, tidak hanya di Amerika, tetapi juga di Asia Tenggara, di Indonesia, dan pertemuan iklim PBB di Bali. Tidak mengherankan bagi saya bahwa LSM konservasi yang berada di balik ini mulai bertindak sebagai 'penguji pihak ketiga' dan mulai menunjukkan bahwa mereka akan menghasilkan uang dari REDD+. Dan mereka telah menghasilkan uang:

Conservation International (CI), WWF, Dana Pertahanan Lingkungan (EDF), dan lain-lain, yang berbasis di sini di Washington DC Mereka telah membangun organisasi mereka dalam beberapa dekade terakhir untuk mengatur **penyeimbangan karbon** dan memverifikasi program palsu ini. Demikian tanggapan saya atas pertanyaan Anda.

WRM: Anda mengatakan bahwa REDD+ telah menjadi simbol dalam perjuangan perlawanan Anda yang lebih luas. Apa yang membuat Anda mengatakan ini?

Saya menyebutnya kolonialisme, penjajahan, jadi program penjajah ini, seperti REDD+, didasarkan pada logika pembangunan. Mereka dibangun di atas primus bahwa negara-negara di Selatan global dapat mengikuti contoh Barat tentang ekspansi kapitalis dan menarik mereka keluar dari kemiskinan. Tetapi sebagai Penduduk Asli di Utara saya tahu bahwa ini tidak benar. Dan kita tahu ini adalah kebohongan sejak Perang Dunia II. Jadi, saya pikir telah bermanfaat bagi saya yang berasal dari negara seperti Amerika Serikat, untuk dapat memahami keterkaitan ini dengan penjajahan, dengan logika pembangunan kolonialis.

Dampaknya terhadap Penduduk Asli/Masyarakat Adat sangat luas dan dalam. REDD+ hanyalah kelanjutan dari logika kolonial, kapitalis, patriarki yang sama yang telah membawa planet ini ke jurang kekerasan dan kerusakan. Hampir tidak mungkin untuk mengatakan apa dampak REDD+ dalam 15 tahun terakhir karena REDD+ tertanam dalam sistem yang telah berlangsung lebih dari 500 tahun. Dari sudut pandang saya di Utara, ini memunculkan trauma sejarah yang datang dengan apa yang terjadi sejak penjajahan tanah kami di Utara. Ini bukan hanya pengambilalihan tanah dan pohon kami dan air kami, gunung kami dan padang rumput kami, tetapi itu adalah pengambilalihan identitas kami. Ini adalah penggantian ritual tradisional Pribumi kami dengan Kristen, merampas bahasa kami, mereka datang dengan pemerkosaan anak-anak kami, trauma sejarah yang didokumentasikan di Kanada di sekolah-sekolah perumahan yang didirikan Gereja. Ini adalah poin yang serius. Jika kita membandingkan 15 tahun prakarsa global yang memiliki dampak seperti itu pada kehidupan dan masa depan Masyarakat Adat kita di hutan tropis, ini tidak berbeda dengan 500 tahun terakhir.

Saya prihatin bagaimana mekanisme pasar karbon dengan janji pembagian manfaat ini mengakibatkan perpecahan Masyarakat Adat kita dan itu sangat menyakitkan, karena berdampak pada solidaritas nasional, regional dan global kita, dan bagaimana kita bekerja bersama. Banyak dari kami bekerja selama 19 tahun dalam penyusunan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Dan untuk melihat inisiatif seperti REDD+ menjadi alat pemecah belah, strategi membagi-dan-menaklukkan. Tapi sekali lagi, ini bukan dampak baru, sudah ada dalam sejarah tentang jenis taktik yang digunakan oleh pemerintah kolonial dan agen mereka: yaitu korporasi. Tingkat rasisme ini bukanlah hal baru. Masyarakat Adat, memiliki jawaban atas perubahan iklim. Tetapi jika kita terpecah-pecah, maka kita tidak dapat memimpin jalan yang dibutuhkan dunia ini. Orang-orang yang mempromosikan REDD+ benar-benar menyebabkan krisis iklim. Banyak

**Ini adalah mekanisme
sertifikasi pencurian
tanah**

yang harus mereka jawab dan pertanggungjawabkan.

WRM: Dalam menanggapi kecaman dan dampak, promotor REDD+ menciptakan kerangka **pengaman Cancun , praktik terbaik, standar **sertifikasi**, REDD+ partisipatif, dan sebagainya, dengan alasan dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Apa pandangan Anda?**

Saya melihat **perlindungan** sebagai tabir asap yang digunakan untuk membungkam kami, untuk membungkam saudara dan saudari adat kami. Untuk membuatnya terdengar seakan-akan mereka akan bertanggung jawab. Mereka menciptakan **perlindungan** untuk membingungkan dan mengalihkan narasi dari kehancuran, menjauh dari kekerasan yang menyertai kehancuran itu, yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka tidak memberi tahu orang-orang di Amazon bahwa uang itu berasal dari perusahaan yang mencemari. Mereka tidak memberi tahu mereka bahwa di suatu tempat yang jauh mungkin ada kilang, kota penyulingan, yang terus mengeluarkan bahan kimia beracun dan gas rumah kaca yang menyebabkan kontaminasi jangka panjang dan penyakit pernapasan bagi komunitas lokal di mana kilang minyak itu berada, membunuh orang. Mereka tidak akan memberi tahu mereka semua dampak kekerasan dan perusakan yang menjadi tanggung jawab REDD+.

Saya telah berbicara dengan beberapa Penduduk Asli setelah organisasi seperti EDF atau Conservation International (CI) mengadakan lokakarya, dan saya bertanya kepada mereka, “Apakah mereka memberi tahu Anda dari mana uang itu berasal?” Dan mereka berkata, “Tidak, saya pikir itu berasal dari Bank Dunia”, saya berkata, “Tidak, itu berasal dari Chevron”, karena dalam hal ini Chevron adalah satu-satunya, dan mereka terkejut, ngeri. “Perusahaan Gazprom”, “Apa?”, kata mereka. Jadi ini adalah cara kerjanya. Dan saya juga memberi tahu mereka “Tahukah Anda bahwa ada Penduduk Asli, orang kulit hitam, orang kulit putih yang miskin, orang-orang berbahasa Spanyol Meksiko, yang tinggal di sebelah kilang minyak di Richmond, California, di daerah San Francisco, yang sekarat karena gangguan pernapasan. Penyakit ini berasal dari emisi dari kilang minyak tersebut? Dan perusahaan-perusahaan ini memberi tahu orang-orang bahwa mereka telah menjadi netral karbon. Mereka memberi tahu orang-orang bahwa mereka menginvestasikan uang mereka di hutan di Amazon untuk melindungi orang”.

Di Utara saya harus menjelaskan greenwash (pencucian “hijau”) ini. Orang-orang di hutan tidak mengerti cara kerjanya, tetapi mereka merasa dilanggar, diyakinkan bahwa mengambil uang dari REDD+ adalah hal yang baik. Jadi itulah mengapa satu-satunya diskusi tentang **perlindungan** membingungkan dan mengalihkan narasi dari kekerasan dan perusakan yang menjadi tanggung jawab kobo karbon ini, dan pemerintah yang mendorongnya. Begitu banyak orang di organisasi konservasi percaya bahwa REDD+ bisa berhasil. Mereka bingung dan tidak melihat betapa rasisnya REDD+ dan program **offset** lainnya. Saya telah memberi tahu mereka bahwa ini adalah mekanisme sertifikasi pencurian tanah, dan mereka tidak suka saya berbicara seperti itu- Sertifikasi Pencurian Tanah. **Perlindungan** untuk membenarkan lebih banyak bahan bakar fosil dan polusi? Ini hanya gila. Solusi terbaik? Untuk apa? Perampasan? Ini konyol.

Multijutawan Jeff Bezos mendirikan Jeff Bezos Earth Fund. Dia menempatkan

seratus juta dolar AS tepat setelah pertemuan iklim PBB di Bali untuk mendanai WWF, Dana Pertahanan Lingkungan, CI dan TNC. Di balik pendanaan itu ada agenda untuk membantu mendorong **penyeimbangan** konservasi dan program penangkaran dan penyimpanan karbon mereka. Ada 400 juta dolar dana di kantong organisasi yang mendorong agenda ini! IEN dan organisasi lain masih berusaha untuk mengumpulkan kampanye kami untuk melawan ini.

Akan terus terjadi pelanggaran HAM, penggusuran. Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban Presiden Republik Demokratik Kongo? Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban Presiden Brasil? Mereka ingin menghapus sejarah Masyarakat Adat asli negara mereka. Mereka ingin menulis ulang sejarah. Mereka ingin mengabaikan bahwa Orang Pertama atau Pribumi memiliki hak yang melekat. Itulah yang mereka takutkan.

WRM: Beberapa organisasi adat telah secara aktif terlibat dengan REDD+, menghasilkan proposal seperti 'REDD+ Adat' dan kampanye seperti 'Tidak ada Hak, Tidak ada REDD'. Menengok ke belakang, apakah menurut Anda mungkin untuk mendamaikan hak-hak dasar dan nilai-nilai yang dipertahankan oleh Masyarakat Adat, dengan apa yang dimaksud dengan REDD+?

Seluruh sejarah yang saya kerjakan di REDD+ telah menarik perhatian karena selalu menjadi masalah yang memakan korban. Saya diundang ke Forum Sosial Dunia di Belém, Brasil, pada tahun 2009. Salah satu dari mereka mengundang saya ke pertemuan dengan Masyarakat Adat untuk menjelaskan dari sudut pandang saya keprihatinan dan masalah yang kami hadapi terkait implementasi REDD+. Ketika saya muncul, Steve Schwartzmann dari EDF melihat saya dan bertanya “mengapa dia ada di sini?” Dia sudah memiliki konflik dengan saya. Saat itulah LSM mulai menjangkau Masyarakat Adat kami. EDF punya banyak uang dan mereka mendapat favoritisme dari banyak kepemimpinan dari Amazon, termasuk COICA. Jadi COICA mulai bekerja dengan LSM dan mengembangkan konsep ‘Indigenous REDD+’.

Tapi itu adalah jalan yang panjang. Saya punya sejarah panjang mengerjakan ini, dan kami membuat strategi di Bangkok, Thailand, ketika ada pertemuan iklim PBB di sana, dan kami menyusun strategi [tentang hak dan REDD]. Saya tidak berpikir dulu dan saya masih tidak berpikir sekarang bahwa pemerintah di mana masyarakat yang tinggal di hutan dan Masyarakat Adat tinggal akan memberikan hak kepada Masyarakat Adat; itu berarti, hak atas tanah, hak atas tanah mereka, dan di Amazon itu juga berarti hak bawah permukaan. Tapi, melihat ke belakang, saya pikir saya membuat kesalahan, karena ada strategi pada pertemuan PBB di Thailand, dengan orang-orang Asia Tenggara yang mencoba membuat REDD+ bekerja, bersama dengan delegasi Pribumi lainnya dari Amazon, COICA, dan kami menyusun strategi protes pada pertemuan PBB itu dengan menggunakan slogan ‘*No Rights, No REDD*’ (Tidak ada Hak. Tidak ada REDD). Slogan ini mendapat perhatian. Sampai hari ini, ada beberapa perdebatan seputar strategi itu. Apakah itu strategi yang bagus? Ini menimbulkan pertanyaan: apakah ada kemungkinan di Peru atau bahkan Kolombia atau bahkan di Brasil untuk memberikan hak kepada Masyarakat Adat? Hak atas tanah di kawasan hutan? Saya kira tidak demikian. Dan strategi itu berada di balik pendekatan ‘REDD+ Adat’.

Saya telah berbicara dengan beberapa Orang Pribumi tentang pertanyaan: bagaimana Anda bisa berdamai dengan cara Pribumi Anda, kosmovision Anda, spiritualitas Anda, bagaimana Anda bisa berdamai, untuk berpartisipasi dalam sistem pasar kapitalis kulit putih? Bahkan jika Anda memperoleh kemampuan untuk menerapkan inisiatif REDD+ berbasis masyarakat adat, Anda masih harus berpartisipasi dalam komodifikasi dan privatisasi hutan Anda dan karbon di pohon Anda. Bukan pemerintah yang melakukan itu, bukan entitas luar, yang Anda lakukan sekarang sebagai Masyarakat Adat. Tampaknya sangat kontradiktif ketika saudara dan saudari Pribumi kita di Amazon berjuang melawan konsesi minyak dan dalam proyek REDD+ Pribumi, mereka mengetahui bahwa pendanaan REDD+ berasal dari Chevron dan pencemar lainnya. Dan apakah seseorang berdamai dengan itu? Saya masih menanyakan pertanyaan itu. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa berdamai. Artinya, mereka mengesampingkan pengetahuan spiritual Pribumi itu untuk berpartisipasi dalam kapitalisme iklim.

Ketika saya menindaklanjuti masalah ini dengan orang-orang dari akar rumput Amazon, tepat di desa-desa terpencil, mereka mengerti; itu tidak rumit. Mereka sering tidak mendukungnya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai mempertanyakan aliansi Pribumi Amazon yang bertindak sebagai perantara dan perantara untuk proyek REDD+. Ini sangat politis di Amazon, karena dari situlah saya berasal di utara. Bagi IEN, saya selalu menghargai mekanisme nyata yang menjamin partisipasi yang berarti dan untuk masalah rumit seperti pasar karbon dan rezim **offset**, prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) harus benar-benar diterapkan. Informasi lengkap tentang semua aspek skema REDD+ ini, dan sekarang disebut 'Solusi Berbasis Alam', sangat penting dalam hubungan politik yang kompleks di Amazon ini. Ini adalah struktur politik yang kompleks. Ketua Ninawa HuniKui dari Acre, Brasil, memiliki perspektif dan sangat teguh dengan posisinya dan ada kelompok yang mencoba memecah belah rakyatnya tentang masalah ini. Begitu pula dengan Marlon Santi, dari Sarayako di Ekuador, ketika dia mulai angkat bicara soal ini. Bahkan Gloria Ushigua dari Sápara Amazon di Ekuador memiliki perbedaan pendapat dengan kerabatnya dari desanya yang mendukung membawa proyek REDD+ ke daerah tersebut. Memiliki informasi sangatlah penting. Prinsip pelaksanaan FPIC sangat penting. Masyarakat Adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan harus memiliki pemahaman yang menyeluruh dan lengkap tentang kompleksitas proyek REDD+ dan bagaimana proyek tersebut melibatkan industri pencemar yang sebenarnya memiliki karbon di hutan. Saya sangat prihatin dan berdoa agar tidak ada pertumpahan darah di desa-desa karena masalah ini.

WRM: Apa tantangan utama bagi Masyarakat Adat dengan dorongan baru untuk REDD+ di bawah istilah yang terdengar bagus: 'Solusi Berbasis Alam'?

Saya telah memikirkan hal ini dan kami telah membicarakannya sebagai solusi yang salah. Tantangan kita adalah, bagaimana kita menyampaikan bahwa ini semacam perbatasan akhir penjajahan yang secara sistematis mengambil alih Ibu Pertiwi melalui privatisasi dan komodifikasi? Proses global ini melakukan ini melalui mekanisme yang memisahkan dan mengukur siklus dan fungsi Bumi Pertiwi, seperti karbon dan keanekaragaman hayati dan mengubahnya menjadi 'unit' untuk dijual di

pasar keuangan dan spekulatif.

Bagaimana kita bisa menyampaikan ini dan mengembangkan materi pendidikan populer untuk menghubungkan titik-titik struktur ekonomi fosil dan finansialisasi alam yang tidak menghormati hak asasi manusia dan hak-hak Masyarakat Adat. Bagaimana kita membangun gerakan perlawanan kita sehingga penyelenggara saluran pipa kita, pejuang minyak kita dan pembela bumi kita di garis depan mengerti?

Instrumen pemerintah negara-negara terjajah adalah seputar hak milik. Jadi 'Solusi Berbasis Alam' adalah tentang **penyeimbangan** atau **offset**. Perusahaan pencemar menyediakan uang untuk menempatkan tanah sebagai penyeimbang atau kompensasi konservasi, dan pada akhirnya, perusahaan yang memiliki tanah ini yang telah tersisihkan. Ini adalah rencana di balik rencana 30x30 [mencakup 30% wilayah dunia di bawah Kawasan Lindung pada tahun 2030]. Jadi re-branding atau pencitraan ulang 'Solusi Berbasis Alam' dari REDD+ saat ini dalam bahaya.

Kami melihat dorongan besar untuk ini di seluruh dunia, tinggal di sini di Amerika Serikat, di pusat kapitalis, ada undang-undang sekarang, yang disebut 'tindakan solusi iklim yang berkembang', yang memberi Departemen Pertanian wewenang untuk membuat sistem pencatatan **offset karbon** daring, yang akan membantu petani masuk ke pasar sukarela **offset karbon**. Jadi di situlah REDD+ juga ditemukan di sini. Tetapi juga masih ditemukan di tempat lain di dalam sistem penetapan harga karbon, seperti di Kolombia. Masalah utama sekarang adalah bagaimana kita akan menghentikan sistem matriks ini yang memungkinkan saluran pipa ini? Program-program ini seperti penetapan harga karbon menjadi semakin kompleks. Pajak dengan REDD+, perbankan karbon, obligasi hijau, terus dan terus.

Penyeimbangan / offset berbasis lahan ini dianggap ramah alam. Bagaimana Anda bisa berdebat dengan sesuatu yang melindungi alam? Itulah yang orang-orang tanyakan kepada saya. Kami khawatir karena kami kalah dalam pertempuran, kami kalah dalam pertempuran di sini di Washington DC, solusi palsu yang juga didorong Biden, karena dia neoliberal. Dan ini semua tentang kapitalisme dan kolonialisme. Dan beberapa kelompok lingkungan berkata, "ya, jangan dipaksakan di sini, kita harus bekerja sama dengan Biden". Tapi kami tidak bisa, kami terus berkampanye, dengan banyak kampanye pendidikan.

Selain itu, ada janji '**net-zero emission**' / **emisi nol** bersihdari banyak perusahaan. Dan penting untuk menghubungkan masalah dan membicarakan hal ini juga. Di bawah payung '**net-zero emission**' mereka menggunakan dua pendekatan. Mereka akan membeli **offset** berbasis lahan yang disebut '**Solusi Berbasis Alam**' atau menggunakan penangkapan dan penyimpanan karbon. Kedua pendekatan ini memperpanjang dan mendukung industri bahan bakar fosil. Ini tidak memungkinkan politik AS dan Kanada, Eropa dan negara-negara bahan bakar fosil lainnya, untuk terlepas dari ketergantungan dari bahan bakar fosil. Itu tidak memungkinkan mereka untuk menahan bahan bakar fosil di tanah demi menjaga menjaga bisnis seperti biasa. Jadi kita akan terus memiliki jaringan pipa, lalu lintas kapal tanker, transportasi energi kotor, bahan bakar fosil, sampai mencapai inti matriks, masalah utama, dan jawabannya adalah 'Solusi Berbasis', yang merupakan privatisasi akhir dari Ibu Pertiwi Alam.

Unjuk Rasa menentang solusi palsu berkedok Kapitalisme Hijau di Xapuri, Acre, Brazil



10 Tahun REDD+ di Acre dan dampaknya terhadap perempuan adat dan perempuan ekstraktivistas ¹

Selama bertahun-tahun, para pendukung REDD+ seperti WWF dan Bank Dunia telah mengiklankan program REDD+ di negara bagian Acre di Amazon Brasil sebagai model bagi dunia. WRM berbicara dengan Letícia Yawanawa, seorang pemimpin adat dari Acre, dan Dercy Teles de Carvalho, mantan presiden Serikat Pekerja Pedesaan Xapuri dan seorang advokat untuk ekstraktivista tentang bagaimana REDD+ telah mempengaruhi kehidupan perempuan di masyarakat yang bergantung pada hutan.

Acre adalah negara bagian di wilayah Amazon Brasil. Lebih dari 80% wilayahnya ditutupi oleh hutan. Sejarah proses **komodifikasi alam** di Acre dimulai pada tahun 1999 dengan datangnya kekuasaan di tingkat negara bagian Partai Buruh. Pemerintah

ini menamakan dirinya ‘pemerintah hutan’ dan mengadopsi narasi yang mengatakan bahwa adalah ada peluang untuk memulai siklus bisnis baru di Acre, sambil tetap menjaga ‘kedudukan hutan’, dan membuat negara bergabung dengan era yang disebut ‘kapitalisme hijau’.

Sebuah tonggak dalam proses ini terjadi pada tahun 2010 dengan persetujuan undang-undang SISA negara bagian, menciptakan Sistem Negara Insentif untuk Jasa Lingkungan. Undang-undang ini memungkinkan program REDD+ yurisdiksional pertama di dunia, yang mencakup seluruh wilayah negara bagian.² Pada tahun 2012, pemerintah Jerman, melalui bank publik KfW dan program REM (REDD Early Movers) memberi penghargaan kepada pemerintah Acre karena telah membuat undang-undang ini untuk pengurangan deforestasi di negara bagian tersebut pada dekade sebelumnya, ketika REDD+ Tidak ada. Kemudian, KfW meneruskan 16 juta euro (lebih dari 18,5 juta dolar AS) selama 4 tahun, diikuti oleh sejumlah jutaan lainnya.

WWF, salah satu LSM internasional yang membantu merumuskan undang-undang SISA, menyebut program REDD+ pemerintah Acre sebagai “inisiatif perintis”³. Program ini juga mendapat dukungan kuat dari Bank Dunia, yang selama bertahun-tahun memfasilitasi kunjungan orang-orang yang terkait dengan LSM dan pemerintah dari negara-negara lain di belahan selatan dunia ke Acre, dan menganggapnya sebagai contoh REDD+ yang bagus di dunia.

WRM berbicara dengan Letícia Yawanawá, dalam bahasa asli Atai Yawanawá. Dia telah aktif dalam gerakan masyarakat adat sejak tahun 1996 dan saat ini menjadi anggota dewan dari organisasi perempuan adat SITOAKORE – Organisasi Perempuan Adat Acre, Southern Amazônia dan Northwest Rondônia. Dia memimpin organisasi selama dua periode. Letícia juga merupakan bagian dari Dewan Nasional Perempuan Adat (CONAMI). WRM juga berbicara dengan Dercy Teles de Carvalho, yang lahir di Xapuri, Acre, dan tinggal di *Colocação*⁴ Pimenteira, bagian dari kawasan pohon karet Boa Vista. Pada tahun 1981, ia terpilih sebagai presiden perempuan pertama dari Serikat Pekerja Pedesaan Xapuri, yang pertama di negara bagiannya dan salah satu yang pertama di Brasil. Dia mendahului Chico Mendes, yang terpilih pada akhir tahun 1982.

WRM: Bagaimana Anda mengevaluasi 10 tahun REDD+ di Acre terkait dengan Masyarakat Adat? Ini adalah program yang selalu mengatakan bahwa Masyarakat Adat akan menjadi salah satu prioritas.

Letícia: Evaluasi dari saya sangat negatif. Saya adalah anggota dewan SISA selama hampir 6 tahun. Ketika koordinator REM/SISA tiba dari COPs (UN Climate Conferences), dia akan mengatakan bahwa banyak masyarakat adat akan mendapat manfaat. Kemudian saya mulai mengamati apa manfaat yang dimiliki Masyarakat Adat. Yang saya ingat ketika saya menjadi koordinator SITOAKORE dan akan menghabiskan waktu di tanah adat adalah saya tidak melihat ada komunitas yang mendapat manfaat tunggal dari program REDD+ ini. Selain itu, kami masih memiliki tanah yang perlu dibatasi di sini dan ini tidak pernah didukung; demarkasi tanah masih harus diperjuangkan.

Sekarang, apa yang akan saya lihat di kota, di pemerintahan, adalah bahwa

mereka memiliki beberapa departemen, dilengkapi dengan baik, dengan banyak teknisi dari tempat lain yang dapat memperoleh keuntungan dari SISA. Tetapi saya tidak melihat satu orang pribumi pun bekerja di sana, baik perempuan maupun laki-laki. Anda tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat adat tidak memiliki kapasitas; Ada banyak perempuan pribumi, kerabat, yang berpendidikan juga dan yang bisa bekerja di sana, tetapi dulu kami melihat, dan terus melihat hingga hari ini, merekahanya menjadi teknisi.

Sebagai anggota dewan SISA di masa lalu, saya mengatakan bahwa sumber daya yang datang untuk Masyarakat Adat harus sesuatu yang membuahkan hasil, yang tinggal di desa-desa, yang tinggal di sana untuk kebaikan masyarakat. Berjalan ke kantor SISA sangat indah, tetapi tidak ada sama sekali Masyarakat Adat dalam struktur referensi untuk Masyarakat Adat, baik untuk perempuan, maupun untuk laki-laki. Saya akan mengatakan hal-hal ini dan sering orang akan melihat saya mengatakan dia hanya datang ke sini untuk mengkritik. Ada kerabat lain yang akan datang untuk pertemuan di SISA, mereka akan menerima uang saku harian dan mereka tidak bisa berkata apa-apa.

Saya tidak pernah dianggap baik oleh pemerintah. Mereka terpaksa menyebut organisasi kami karena kami adalah organisasi perempuan dan kami semua legal, itulah yang mereka minta. Jadi tidak ada cara untuk tidak mengundang kami, juga karena kami adalah organisasi dengan perwakilan di tiga negara bagian, seluruh Acre, Amazônia Selatan, yang merupakan kotamadya Boca do Acre, dan Rondônia Barat Laut. Sementara SISA akan menampilkan dirinya sebagai organisasi yang bekerja dengan 20-30 asosiasi, saya akan mengatakan: itu bohong! Karena kebanyakan dari mereka sudah tidak ada lagi. Saat ini Anda melihat [asosiasi] LSM lain yang menjaga sumber daya ini, CPI (Komisi Pro-Adat) sendiri, AMAIAC (Asosiasi Gerakan Agen Agroforestri Adat Acre).

WRM: Program REDD+ membawa perubahan dalam organisasi masyarakat, dengan menciptakan lebih banyak asosiasi sehingga pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya. Anda telah mengatakan bahwa Anda tidak melihat perubahan apa pun, bahwa uang REDD juga tidak membantu dalam demarkasi tanah adat. Bagaimana semua ini mempengaruhi perempuan adat di komunitas mereka?

Leticia: Sebagai koordinator organisasi perempuan, saya mengatakan bahwa kami perempuan pribumi bukanlah lebah atau semut, untuk hidup hanya dengan mencium bau. Kita hidup dari tindakan nyata, betapapun kecilnya. Ada pertemuan dengan orang-orang dari berbagai negara di sebuah hotel yang sangat mewah di sini. Ada otoritas dari berbagai negara. Tetapi mereka tidak mengundang saya karena mereka tidak ingin saya muncul untuk mengatakan yang sebenarnya.

Tapi saya tetap pergi ke pertemuan ini. Saya menunggu semua orang berbicara. Ada banyak orang yang melihat saya, khawatir, karena mereka tahu saya akan berbicara. Lalu saya minta bicara, karena saya anggota dewan REM/SISA, saya anggota penuh. Kami adalah empat perempuan dan saya berkata: lihat lah, para perempuan, saya akan berbicara. Saya tidak berbohong, saya tidak mengatakan hal-hal yang tidak benar. Mereka telah berbicara tentang berbagai anggaran, bernilai jutaan dan

jutaan. Lalu saya berkata: di mana jutaan? Kita, para perempuan, di manakah kita termasuk dalam jutaan ini? Semua orang tampak terkejut. Saya berkata: di mana kita? Kita dilupakan di tengah hutan dengan program REM ini, yang merupakan program yang sama dengan REDD. perempuan dari Jerman, Christina, dia mendengar saya, dia berkata: Nona Letícia, saya perlu berbicara dengan Anda. Saya menunggu dan ketika dia pergi, dia berhenti peduli. Dia bahkan tidak menatapku lagi. Kemudian saya menulis surat pengunduran diri dari dewan.

Jadi saya tidak melihat hasil yang baik, kami perempuan tidak diikutsertakan, mungkin untuk orang-orang CPI atau saudara kami Francisca Arara, dia wakil pemerintah, tapi bukan perempuan adat di desa-desa. Karena asosiasi adat yang memiliki perempuan yang dipilih oleh desa, itu adalah sesuatu yang lain, mari kita perjelas. Saya tidak mengejek, saya mengatakan yang sebenarnya. Perempuan tidak memiliki partisipasi. Jika ada perempuan yang pergi ke negara lain, mereka adalah perwakilan dari pemerintah, itu berbeda. Tapi perempuan pribumi Acre tidak diberi peluang berpartisipasi apapun.

Dan bagaimana REDD mempengaruhi perempuan yang bekerja sebagai ekstraktivista di dalam Cagar Ekstraktif Chico Mendes selama 10 tahun ini, di mana berbagai proyek REDD+ dilaksanakan untuk memberi manfaat bagi keluarga dan perempuan? Misalnya, 'hibah hijau', proyek 'hutan tanaman' dan pengelolaan hutan, yang merupakan nama yang diberikan untuk **tebang pilih.**

Dercy: Pada tahun 2010 ketika pemerintah Acre mengambil kebijakan REDD+, pemerintah menetapkan 'zero fire' atau nol api dan mendatangkan 'hibah hijau'. Hibah Hijau adalah pembayaran triwulanan untuk mengimbangi kenyataan bahwa orang tidak bisa lagi membuka lahan pertanian di hutan. Ini merupakan kerugian budaya yang tidak dapat dipulihkan karena selalu perempuan, baik perempuan pribumi maupun perempuan *extrativista* yang menggarap lahan. Dengan larangan ini mulai 2010, mereka berhenti memproduksi. Dan makanan adalah salah satu hal mendasar dalam hidup, tanpa makanan tidak ada yang bisa hidup dan bahagia. Para perempuan biasa menanam sayuran dan menjualnya. Saat ini, orang bergantung pada membeli makanan, beras mahal yang berasal dari negara bagian lain, dari Mato Grosso. 'Hibah hijau' adalah sejenis banyuan amal, saya tidak tahu apakah jumlahnya meningkat, tetapi dulu 100 reais [kurang dari 19 dolar AS] per bulan. Dan saat ini, ICMbio⁵ sedang mendistribusikan karung besar produk industri di dalam Reserve. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan perempuan karena mereka juga berhenti mewariskan budaya ini kepada anak-anak mereka, memproduksi apa yang dikonsumsi, tanpa bahan kimia pertanian, produk berkualitas, di komunitas itu sendiri.

Berkenaan dengan proyek 'hutan tanaman', terdapat 'sistem agro-forestry', saya berbicara dengan seorang perempuan yang mengambil bagian dalam program ini dan dia banyak mengeluh. Pertama dalam kaitannya dengan volume pekerjaan yang menambah kehidupan keluarga. Kedua, karena selama menerima anakan untuk ditanam, mereka tidak memiliki dukungan untuk melakukan pekerjaan, seperti pemotong sikat dan bahan bakar, untuk memelihara sistem agroforestri sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan keluarga terus-menerus diminta tentang pemeliharaan ini oleh presiden asosiasi yang memimpin proyek ini dan mengunjungi secara teratur

untuk memeriksa apakah semuanya sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk proyek tersebut. Dia mengatakan hidupnya menjadi neraka. Masalah lain adalah bibit hanya ditawarkan di luar musim hujan, karena tanaman dimaksudkan untuk bertahan selama musim kemarau. Oleh karena itu, banyak tanaman yang tidak dapat bertahan karena orang tidak dapat mengairinya. Kesimpulannya, proyek ini bisa berhasil jika dikerjakan oleh 5 orang, dan 5 orang ini semua terkait dengan pemerintah, dengan kata lain, mereka tidak melakukan angkat berat. Mereka akan membayar seseorang untuk melakukan pekerjaan itu. Itu sebabnya itu proyek ini berhasil untuk mereka.

Orang tidak memiliki sarana untuk melawan, karena mereka [promotor REDD+] menggunakan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapa pun.

Tentang 'pengelolaan hutan', sebenarnya tidak ada yang berkelanjutan, malah membuka preseden bagi masyarakat sendiri untuk merusak hutan. Mengapa pemerintah, dalam 20 tahun ini memerintah Acre dengan wacana pembangunan berkelanjutan ini, tidak menerapkan kebijakan apa pun untuk memastikan keberlanjutan keluarga? Manajemen ini tidak meninggalkan sumber daya yang dapat mengubah kehidupan keluarga, sebaliknya memiskinkan mereka. Dan menciptakan preseden bagi keluarga untuk terus menjual kayu terlepas dari apakah ada perusahaan yang melakukan manajemen atau tidak, mereka menjual ke peternak skala besar untuk memagari lahan penggembalaan mereka. Dan kita tahu bahwa ini hanya akan menyebabkan pemiskinan penduduk, terutama perempuan, yang akan berakhir di pinggiran kota, karena kebutuhan, terpaksa melihat anak perempuan mereka masih menjual tubuh mereka atau bergabung dengan kelompok-kelompok [terkait dengan perdagangan narkoba].

Ini adalah fakta yang sangat rumit karena kita tahu bahwa sebelumnya, perempuan berhasil membesarkan anak-anak mereka dalam standar budaya rasa hormat dan tanggung jawab. Saat ini kita melihat gadis-gadis berusia 14, 15, dengan bayi di gendongan, banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan ada keluarga yang hancur. Tetapi orang-orang tetap anonim, tidak terlihat dan tidak ada yang berubah. Jadi masuknya agen eksternal ini menyebabkan dekarakterisasi mendalam dari cara hidup, dan hanya meninggalkan reruntuhan, tidak ada yang positif.

Ada berbagai elemen lain yang berkontribusi pada semacam naturalisasi dari apa yang terjadi. Misalnya, ponsel paling modern ada di dalam Area Cagar Alam, di berbagai sudut. Televisi juga. Ini adalah elemen yang mengalihkan perhatian, yang mencegah orang untuk berefleksi. Elemen lain yang memberikan kontribusi signifikan adalah gereja-gereja evangelis. Gereja-gereja ini berkontribusi pada proses penyebaran orang ini dalam kaitannya dengan kenyataan dan masa depan.

WRM: Salah satu usulan program REDD+ adalah mengubah perempuan adat menjadi pengusaha mikro, untuk menciptakan pasar bahkan di luar negeri untuk kerajinan mereka. Apa pendapat Anda tentang inisiatif ini?

Letícia: Saya berkeliling ke berbagai tanah adat. Saya melihat bahwa 90% pembuat kerajinan adalah perempuan pribumi, yang membuat kerajinan mereka, lukisan mereka, untuk mereka gunakan dan untuk dijual. Ini menciptakan kemandirian di

dalam desa. Ada banyak perempuan, janda, terkadang perempuan yang ditinggalkan suaminya, yang ada di sana, bersama anak-anaknya. perempuan ini membantu dirinya sendiri, dengan anak-anaknya, dia melakukan pekerjaan kerajinannya, dengan para perempuan inilah kami memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu, untuk memiliki ruang bagi kami untuk menerima kerajinan perempuan ini, untuk menjualnya dan mengembalikan uangnya kepada para perempuan. Inilah yang kami katakan kepada mereka, ini adalah keinginan para perempuan, tetapi kenyataan berkata lain.

Kerajinan yang selalu untuk kita gunakan, memiliki nilai simbolis dan tidak dapat dilakukan dengan cara lama. Orang-orang mengubah manik-manik menjadi gambar yang memiliki makna untuk mengingatkan diri pada lukisan kita saat kita tidak memiliki kontak dengan luar. Dan setiap kali kami menjual kerajinan kami, kami mengadakan upacara. Orang yang mengambilnya diberkati. Ada cincin hitam yang dibuat oleh Apurinã, kan? Yaitu Mereka mengadakan ritual ketika seorang perempuan mengalami kram menstruasi, cincin itu benar-benar milik perempuan, dia memakainya untuk tidak mengalami kram yang parah. Jadi semua kerajinan di mata kita memiliki makna, nilai budaya dan nilai spiritual.

WRM: REDD+ menyatakan bahwa ini adalah mekanisme untuk mengurangi deforestasi, tetapi setelah 10 tahun REDD di Acre, deforestasi meningkat, dan bahkan lebih banyak saat Bolsonaro berkuasa. Bagaimana hal ini mempengaruhi tanah adat dan Cagar Alam Ekstraktif? Apa tantangan perempuan dalam menghadapi hal ini?

Dercy: Perempuan-perempuan dari masyarakat adat dulunya memiliki banyak kegiatan, termasuk bekerja dengan tanaman rambat. Baru-baru ini saya pergi ke suatu tempat dan melihat suatu daerah yang dulunya berhutan, di mana dulu, ketika saya menjadi petugas kesehatan, saya berjalan dengan berjalan kaki, sekarang hutan itu telah menghilang. Hal ini merugikan perempuan, karena mereka biasa membuat barang-barang dari tanaman merambat dan mendapatkan uang: sapu, keranjang untuk memanen jagung atau padi di ladang, atau menyimpan pakaian bekas, atau menyimpan telur, karena ventilasinya baik. dan ini membantu mereka tetap segar. Saat ini sudah tidak memungkinkan lagi, tidak ada lagi tanaman merambat karena semuanya sudah diserahkan ke padang rumput.

[Kami akan tetap tinggal di tanah kami, dengan atau tanpa uang, itu adalah kewajiban kami sebagai Masyarakat Adat]

Deforestasi meningkat pesat selama periode Bolsonaro berkuasa, 2019, 2020, 2021, sebagai fungsi dari devaluasi kegiatan *extrativistas*. Karena aktivitas *extrativista* ini tidak dapat menopang permintaan konsumsi yang datang dengan peningkatan *ramais* [jalan besar dari tanah] dan kedatangan energi, orang-orang membagi *colocações* mereka menjadi banyak, dan ketika mereka melakukannya, masing-masing membersihkan sejumlah hektar, jadi sebuah peternakan besar dengan banyak pemilik secara bertahap terbentuk. Karena yang satu menjual 3 hektar, yang lain menjual 5, yang lain, 6. Hari ini, Anda meninggalkan kota terdekat Xapuri, dan Anda dapat melintasi Cagar Ekstraktif, dari satu ujung ke ujung lainnya, oleh *ramais*.

Tentang seluruh proses yang terjadi dengan REDD+, perspektif saya adalah bahwa kita dapat membalikkan gambaran ini berdasarkan proses pendidikan dalam hubungannya dengan komunitas-komunitas ini, dengan percakapan dalam bahasa yang dapat diakses sehingga orang-orang dapat memahaminya. Jika tidak ada alasan lain, karena orang tidak memiliki sarana untuk melawan, karena mereka [promotor REDD+] menggunakan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapa pun. Dan ketika Anda tidak memiliki informasi, Anda tidak dapat melawan argumen tersebut.

Adapun perempuan, kita perlu melakukan investasi di bidang politik, sungguh, untuk memasukkan perempuan dalam debat ini agar mereka memahami proses ini karena kita adalah mayoritas di Brasil. Jadi, kita bisa membuat perbedaan dari saat kita memahami semua yang terjadi, keseriusan proses ini, dan kita memposisikan diri secara politis.

Leticia: Kami sangat sedih melihat ini. *Samaúma* kami, menurut sejarah kami, untuk spiritualitas kami, adalah pohon yang sangat besar di tengah hutan, itulah mengapa kami menyebut pohon ini seorang perempuan, dia berarti buah, dia berarti naungan, dia adalah yang terbesar dari semuanya. Sekarang keadaan menjadi lebih buruk karena dengan pohon demi pohon ditebang, kayu yang tumbuh selama 40, 50 tahun ditebang dalam beberapa menit, sangat menyedihkan bagi kita untuk melihat ini.

Jika *Samaúma* adalah seorang perempuan yang dapat berbicara, dia akan menangis, dia akan berteriak ketika anak-anaknya dibawa pergi. Dengan itu datanglah kekeringan, yang mempengaruhi orang-orang di tanah kami karena tanah kami dikelilingi oleh orang-orang yang bahkan tidak kami kenal. Hewan-hewan akhirnya meninggalkan tempat yang gundul itu, *igarapés* – nama yang diberikan di wilayah Amazon Brasil untuk sungai yang mengalir ke sungai – mengering, begitu juga sungai di ujung lainnya. Sebagai seorang perempuan pribumi, saya melihat ini dengan banyak kesedihan.

Tapi kami akan tetap tinggal di tanah kami, dengan atau tanpa uang, itu adalah kewajiban kami sebagai Masyarakat Adat. Dengan dukungan itu akan lebih baik, dan mungkin ada anggaran tidak hanya untuk kepentingan kantor-kantor pemerintah di kota, tetapi juga terutama dukungan untuk perempuan, karena perempuan membutuhkannya.

1 *Extractivista / Extractivismo.* Jangan disamakan dengan industri ekstraktif, *extractivismo* dalam konteks Brasil menggambarkan cara hidup yang ditempuh oleh berbagai komunitas tradisional. Pemungutan hasil hutan bukan kayu, sering kali dikombinasikan dengan pertanian subsisten, adalah definisi dari *extractivismo*. Penyadapan karet, pengambilan getah dari pohon karet yang tumbuh di dalam hutan adalah salah satu contohnya. Buah sawit açai dan kacang Brazil adalah contoh lain dari produk yang membentuk basis *ekonomi ekstraktif*. *Extractivismo* sering dikaitkan dengan penyadapan karet dan Amazon Brasil. Namun, ada komunitas *extractivista* di luar wilayah Amazon seperti *quebradeiras de coco babaçu* yang mengumpulkan dan mengolah buah palem babaçu.

2 Sebuah program disebut “REDD+ yurisdiksional” ketika implementasinya tidak hanya di lahan yang dikaitkan dengan proyek tertentu, tetapi di seluruh yurisdiksi, seperti

departemen, provinsi, negara bagian, atau negara. Baca lebih lanjut di sini: <https://www.wrm.org.uy/other-information/from-redd-projects-to-jurisdictional-redd-more-bad-news-for-the-climate-and-communities>

3 <https://www.wwf.org.br/?33524/Acre--primeiro-estado-a-realizar-transaes-com-REDD>

4 Nama tempat para penyadap karet dan keluarganya tinggal dan bekerja; biasanya terdiri dari rumah dan area yang dimaksudkan untuk pertanian skala kecil dan pemeliharaan ternak, dikelilingi oleh jalan setapak pohon karet. Rata-rata ukuran colocações ini sekitar 300 hektar.

5 ICMBio: Institut Keanekaragaman Hayati Chico Mendes, lembaga pemerintah federal yang bertanggung jawab atas pengelolaan Cadangan Ekstraktif – RESEX.

El Cerrejon, tambang batu bara di La Guajira,
Kolombia, Januari 2017

Foto: Wikimedia



Batubara berdarah untuk Karbon berdarah di Kolombia: Perluasan Pajak Karbon dengan REDD+ Bukti Kegagalan Penetapan Harga Karbon

Negara-negara di belahan dunia Selatan telah 'didorong' untuk membangun sistem penetapan harga karbon mereka sendiri, yang sering kali berarti mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang berdampak pada wilayah masyarakat. Artikel ini menguraikan sistem penetapan harga karbon di Kolombia dan mengungkapkan bagaimana perusahaan pertambangan telah menggunakan REDD+ untuk secara ilegal menghindari pembayaran pajak sambil mengklaim 'netralitas karbon'. Glencore, sebuah perusahaan pertambangan multinasional besar yang telah menyebabkan polusi, kekerasan dan penggusuran di Kolombia, diberikan keringanan pajak karbon karena investasinya dalam program penggantian kerugian perampasan tanah.

Artikel ini menguraikan bagaimana perusahaan-perusahaan penghasil 'batubara berdarah' yang kejam di Kolombia diberi keringanan pajak karbon karena

berinvestasi dalam program **penggantian** kerugian hutan perampasan tanah di wilayah lain negara itu - berdampak pada komunitas Afro-Kolombia dan Masyarakat Adat di kedua wilayah.

Terletak di timur laut Kolombia, tambang batubara terbuka terbesar di belahan bumi barat menjangkau wilayah Cesar dan La Guajira. Tambang telah menjadi lokasi ekstraksi kekerasan selama beberapa dekade sejak pembukaannya pada 1980-an oleh perusahaan AS yang terkenal kejam, Exxon. Disebut sebagai 'batubara darah' di wilayah tersebut karena kekerasan historis dan berkelanjutan yang terkait dengan perusahaan pertambangan batubara. Kelompok dan komunitas yang menolak ekstraksi dihadapkan dengan kekerasan ekstrim mulai dari pasukan militer dan paramiliter, ancaman pembunuhan, kriminalisasi dan intimidasi. Sembilan puluh delapan (98) persen hasil batubara ini diekspor. Secara historis, sebagian besar batubara dikirim ke benua Eropa.¹

Menambah deretan kekerasan di lokasi ekstraksi dan pembakaran, kebijakan mitigasi perubahan iklim itu sendiri menciptakan celah keuangan dan subsidi untuk industri ekstraktif dengan penetapan harga karbon, yang memungkinkan penggunaan **penyeimbangan karbon** alih-alih berurusan dengan pengurangan ekstraksi bahan bakar fosil di sumbernya. **Penyeimbangan karbon** malah memungkinkan industri ekstraktif terus mencemari. Selama bertahun-tahun kita telah melihat sistem yang salah yang menyamakan emisi dari kelebihan produksi energi bahan bakar fosil dengan program konservasi berbasis lahan. Ekstraksi energi bahan bakar fosil tidak boleh dikacaukan dan dicampur dengan arena konservasionisme yang sangat kompleks dan historis. Dalam lima tahun terakhir, sistem penetapan harga karbon telah berkembang biak di Selatan global.

Berdasarkan penelitian selama lima belas bulan di Kolombia, artikel ini menguraikan sistem penetapan harga karbon di negara ini dan menunjukkan bagaimana Glencore, sebuah perusahaan pertambangan multinasional besar, memenuhi syarat untuk pemotongan pajak dengan membeli **kredit karbon** dari proyek-proyek REDD+ sambil mengklaim 'netralitas karbon'. Artikel ini berfokus pada anak perusahaan Glencore, Prodeco, yang beroperasi di wilayah timur laut Cesar. Namun, penting untuk dicatat bahwa mulai awal tahun 2021, Glencore sekarang menjadi satu-satunya pemilik operasi penambangan Cerrejón² dan mengoperasikan operasi penambangan yang luas di La Guajira yang berdekatan, yang berdampak parah pada komunitas Adat Wayúu.³

Harga Karbon

Pada the UN Secretary-General's Climate Leadership Summit (KTT Kepemimpinan Iklim Sekretaris Jenderal PBB) pada bulan September 2014, karena rendahnya harga **kredit karbon** pada saat itu, tujuh puluh empat negara, dua puluh tiga negara bagian, provinsi dan kota, dan lebih dari 1000 bisnis dan investor dengan lebih dari US\$4 triliun dolar dalam aset bertemu untuk membahas serangkaian inisiatif baru untuk 'harga karbon'. Langkah ini terlepas dari banyaknya bukti bahwa pasar karbon gagal mengurangi emisi.

Rencana penetapan harga karbon baru bertujuan untuk menghubungkan sistem perdagangan emisi, pajak karbon, REDD+ dan program penetapan harga lainnya. Pada saat yang sama, tujuannya adalah untuk menghubungkan penetapan harga pada skala global untuk meningkatkan 'fleksibilitas' pasar keuangan bagi industri pencemar terbesar dan pemerintah industri paling kuat di dunia.

Negara-negara di belahan dunia Selatan didorong untuk membangun sistem penetapan harga karbon nasional mereka sendiri untuk bersiap-siap menghadapi sistem penetapan harga karbon global. Langkah inilebih lanjut ditetapkan melalui rencana yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian Paris PBB. Pada tahun 2015, ketika Persetujuan Paris diadopsi pada pertemuan iklim PBB di Paris, Prancis, Kolombia berkomitmen untuk mengurangi 20 persen emisinya pada tahun 2030. Untuk melakukan ini, komitmen dibuat untuk memperluas kawasan lindung, mengurangi deforestasi, melindungi *páramos* (lahan basah spesifik), meningkatkan konservasi daerah aliran sungai, dan membangun program untuk kerangka kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sejak 2015, serangkaian undang-undang untuk penetapan harga karbon juga telah diperkenalkan di Kolombia.

Yang pertama adalah UU 1753 (2015), di mana Pasal 175 membuat Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca. Undang-undang tersebut memasukkan REDD+ yang akan diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan. Pada tahun 2016, pemerintah mengesahkan undang-undang reformasi pajak menyeluruh yang mencakup pajak karbon (UU 1819). Undang-undang tersebut menerapkan pajak CO₂ untuk pembakaran bensin, minyak tanah, bahan bakar jet, ACPM dan bahan bakar minyak, tetapi terutama bukan batu bara. Gas alam juga dikenakan pajak tetapi hanya untuk digunakan dalam industri dari penyulingan hidrokarbon dan petrokimia, dan gas minyak cair (LPG) dan hanya untuk dijual kepada pengguna industri. Emisi dari bahan bakar ini mewakili sekitar 27 persen dari total emisi negara. Pajak awalnya ditetapkan sebesar 15.000 pesos (US\$5,5 dolar) per ton setara karbon dioksida (tCO₂e) dan dijadwalkan meningkat setiap tahun hingga mencapai sekitar US 11 dolar per tCO₂e.

Jika perusahaan mematuhi ketentuan offset/ penyeimbangan, mereka dapat mengklaim 'netralitas karbon' dan menghindari pajak penuh

Pada tahun 2017, Keputusan 926 memasukkan ketentuan 'netral karbon', yang memungkinkan penggantian **kerugian karbon** dibeli sebagai pengganti pembayaran pajak karbon melalui verifikasi pihak ketiga. Bukan hal yang aneh jika amandemen atau dekret untuk penggantian **kerugian** diperkenalkan setelah pajak karbon awal ditetapkan, seperti yang terjadi di Meksiko. Beberapa proyek memenuhi syarat untuk menjual **kredit offset karbon** di Kolombia. Di antaranya adalah proyek REDD+. Disebut sebagai 'proyek-proyek REDD+ *'nested'* (atau kadang-kadang juga disebut 'REDD+ yurisdisional', yang berarti menyatukan beberapa proyek di wilayah geografis yang sama), pemerintah Kolombia telah memberi izin untuk lebih dari 75 proyek REDD+ untuk didaftarkan mulai Mei 2021 dan jumlahnya meningkat pesat.

Proyek-proyek REDD+ telah banyak dikritik karena menargetkan cara hidup

dan wilayah Masyarakat Adat, menaikkan harga tanah, meningkatkan kekerasan dan menyebabkan perpecahan masyarakat. Organisasi Masyarakat Adat dan komunitas penghuni hutan berpendapat bahwa REDD+ adalah mekanisme kolonial yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil alih hutan dengan memberi harga pada alam. Selain itu, laju deforestasi bertambah pesat dengan REDD+.

Penting untuk diingat bahwa setiap perdagangan karbon mewakili polusi dan kekerasan nyata terhadap masyarakat di lokasi polusi dan ekstraksi.

Kolombia dipuji sebagai Juara Penetapan Harga Karbon. Pada tahun 2017, Kolombia, sebagai bagian dari Negara-negara Aliansi Pasifik (Chili, Meksiko, Kolombia, dan Peru), menandatangani Deklarasi Cali untuk menegaskan kembali Perjanjian Paris dan untuk memperkuat pasar sukarela di kawasan tersebut. Pada tahun yang sama, Kolombia bergabung dengan World Bank Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) untuk menghubungkan negara maju dan berkembang di pasar penetapan harga karbon. Kolombia bergabung dengan One Planet Summit di Paris bersama Kanada, Chili, Meksiko, Kosta Rika, dan tujuh negara bagian dari AS dan Kanada untuk meluncurkan Carbon Pricing dalam kerangka kerja sama Amerika dan membangun platform perdagangan untuk menghubungkan pasar karbon di seluruh belahan bumi.

Jika perusahaan mematuhi ketentuan **offset / penyeimbangan**, mereka dapat mengklaim 'netralitas karbon' dan menghindari pajak penuh. **Penyeimbangan karbon** ini harus dihasilkan setelah 1 Januari 2010 dan diterapkan di Kolombia. Dengan demikian, program pajak karbon Kolombia telah mendorong pengembangan lebih banyak proyek REDD+.

Awalnya, pendapatan pajak akan masuk ke *Fondo Colombia Sostenible* (FCS– Colombia Sustainability Fund). Lembaga ini merupakan inisiatif Pemerintah Kolombia yang dibiayai oleh Norwegia, Swedia, dan Swiss yang melaksanakan program konservasi, termasuk REDD+, di 277 kotamadya di seluruh Kolombia. Dana tersebut dikelola oleh Inter-American Development Bank (IDB) berdasarkan Deklarasi Bersama (DCI) yang ditandatangani oleh Kolombia, Norwegia, Inggris dan Jerman pada pembicaraan iklim PBB 2015 di Paris. Pada 2019, selama pembicaraan iklim di Madrid, Spanyol, Lembaga ini diperbaharui.

Undang-Undang Perubahan Iklim Kolombia tahun 2018 mengintegrasikan program penetapan harga karbon domestik yang mencakup antara lain *Programa Nacional de Cupos Transables de Emision de GEI* (PNCTE – Program Nasional Kuota Emisi Gas Rumah Kaca yang Dapat Diperdagangkan) yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Undang-undang ini mengizinkan satu unit karbon untuk diakui dan dibayarkan ke dalam skema **offset** pajak karbon, dengan demikian menghubungkan perdagangan karbon, pajak karbon, dan sistem **offset karbon**.

Kolombia selanjutnya mempertimbangkan bagaimana menghubungkan program domestiknya dengan pasar internasional. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap perdagangan karbon mewakili polusi dan kekerasan nyata terhadap masyarakat di lokasi polusi dan ekstraksi.

Komunitas Afro-Kolombia yang terkena dampak penambangan batu bara dan REDD+ di Kolombia

Proyek REDD+ Cocomasure dan BioREDD+ berlokasi di pantai Pasifik di mana orang Afro-Kolombia memiliki hak atas tanah lebih dari 5 juta dari 10 juta hektar hutan tropis. Anak perusahaan pertambangan batubara Kolombia Glencore, Prodeco, dan perusahaan minyak Chevron termasuk di antara pembeli REDD+ pertama di seluruh Kolombia.

Direktur Lingkungan Glencore/Prodeco menjelaskan bahwa mereka terlibat dalam negosiasi kebijakan untuk membangun undang-undang pajak karbon tetapi juga diinformasikan oleh LSM konservasi: “Pajak karbon dimulai di sini pada tahun 2016 dan mulai diterapkan pada tahun 2017... *ide ini muncul dari kami ... kami berpartisipasi dalam segala hal tentang munculnya dan diskusi undang-undang ini. Kami berkonsultasi tentang lahirnya semua undang-undang ini. Akan tetapi tema yang untuk industri pertambangan di Kolombia relatif baru. Kami butuh beberapa saat untuk memahaminya dan akhirnya melalui aliansi seperti Conservation International karena kami sudah memiliki beberapa proyek dengan mereka*” (komunikasi pribadi 2019, penekanan ditambahkan).

Proyek Cocomasure dimulai pada 2011 dan terletak di Koridor Choco-Darien di Urabá Antioqueño. Proyek ini telah menghasilkan 40.000 **kredit karbon** di sekitar 14.000 hektar di mana 20 komunitas tinggal. **Kredit karbon** telah dibeli oleh anak perusahaan Glencore Kolombia, Prodeco, untuk mengkompensasi emisi bahan bakar diesel yang disebabkan selama operasi. Proyek awal ini merupakan simbol karena menjadi preseden untuk lebih banyak proyek REDD+ yang akan didirikan dan kemudian dikaitkan dengan sistem pajak karbon Kolombia.

Bahan bakar fosil harus dihapus dan disimpan di tanah, sementara kekerasan rasis dan sosial ekonomi yang sedang berlangsung di lokasi ekstraksi, pembakaran, dan transportasi harus dihentikan sekarang.

Di sisi lain negara itu, tambang batubara Glencore/Prodeco terletak di timur laut Karibia dan juga berdampak pada komunitas Afro-Kolombia. Masyarakat di sekitar tambang batu bara di Cesar menderita dikarenakan kelangkaan air, tingkat polusi yang berbahaya, kekerasan dan penggusuran selama bertahun-tahun, perampasan tanah dan diskriminasi.⁴ Prodeco memilih untuk membeli kredit REDD+ di muka daripada membayar pajak karbon.

Program BioREDD+ dikembangkan oleh badan pembangunan USA USAID pada tahun 2013 dan mereplikasi proyek Cocomasure REDD+ di delapan komunitas lainnya.

Fondo Acción adalah operator kontrak proyek BioREDD+ untuk USAID. Prodeco dan Conservation International (CI) bekerja sama dalam beberapa proyek terkait dengan Pembayaran Jasa Lingkungan, dan CI-lah yang mendorong Prodeco untuk

berhubungan dengan USAID. Prodeco menandatangani kontrak dengan Fondo Acción untuk membeli kredit. Fondo Acción telah terlibat dengan kompensasi dan keuangan konservasi selama bertahun-tahun. Mereka adalah LSM pelaksana yang terlibat dalam debt-for-nature-swap (pembatalan hutang dalam pertukaran dengan komitmen atas mobilisasi sumber daya domestik untuk pelestarian lingkungan/sumber daya alam pembatalan hutang dalam pertukaran dengan komitmen atas mobilisasi sumber daya domestik untuk pelestarian lingkungan/sumber daya alam) tahun 2004 dengan AS. Direktur Prodeco menjelaskan bahwa Fondo Acción bertindak sebagai fasilitator antara Prodeco dengan masyarakat (komunikasi pribadi tahun 2019). Dia juga menjelaskan bahwa Fondo Acción tahu bagaimana berkomunikasi “dengan industri swasta dalam bahasa mereka, tentang kontrak dan masalah keuangan” (komunikasi pribadi 2019). Dia melanjutkan dengan mengatakan:

“Mereka [Conservation International] melakukan kontak dengan USAID dan dengan Fondo Acción, yang telah mengerjakan proyek REDD di Pasifik selama lebih dari lima tahun, bahkan sebelum pajak karbon dihasilkan di Kolombia. Ada proyek USAID yang merupakan proyek yang sangat, sangat besar, yang disebut proyek BioREDD, yang pada dasarnya adalah dorongan yang menghasilkan penataan proyek REDD di Pasifik, dengan mereplikasi model Proyek REDD, yang merupakan pelopor di negeri ini.” (komunikasi pribadi 2019).

Terlepas dari kepercayaan Direktur, ketika Fondo Accion mendekati masyarakat untuk menjual kredit REDD+ ke Prodeco, masyarakat mengatakan tidak. Mereka melawan dan mengatakan tidak akan terlibat dengan perusahaan batu bara. Namun, menurut perwakilan Prodeco, Fondo Acción yang berargumen atas nama Prodeco:

“Karena sebenarnya mereka [majelis atau consejo] berkata, “Tidak, itu adalah perusahaan pertambangan yang akan membelinya. Ini adalah perusahaan pertambangan.” Tapi Fondo Acción, mengatakan, “Mereka bukan sembarang perusahaan pertambangan, ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab, ta ta ta ta ta [bla, bla, bla] Dan kami pergi dengan komitmen dan kami membuat kesepakatan, tapi kami masih harus menjelaskan siapa Prodeco itu [kepada mereka] dan belajar lebih banyak tentang mereka [komunitas]. Proses ini lah yang sedang kami jalani.” (komunikasi pribadi 2019).

Akibatnya, dengan proyek-proyek REDD Prodeco akan membayar sekitar seperempat hingga sepertiga dari jumlah pajak karbon, yang menambah penghematan keuangan yang signifikan bagi perusahaan. Selain itu, Prodeco akan mengumpulkan tidak hanya manfaat pajak tetapi juga upaya hubungan masyarakat iklim yang baik untuk dikategorikan sebagai ‘netral karbon’.

Saat ini, lebih dari 75 proyek *nested*-REDD+ pada dasarnya digunakan sebagai subsidi/penggantian bahan bakar fosil **melalui** program pajak karbon Kolombia. Beberapa program berlokasi di Amazon dengan melibatkan sedikitnya lebih dari 17 komunitas Pribumi.

Sementara PBB, pialang karbon, lembaga pembangunan dan konservasi berdebat tentang mendapatkan **penghitungan karbon** yang benar, mereka kehilangan poin sebenarnya. Tidak ada satupun kalkulus karbon yang bisa memperbaiki sistem yang cacat ini. Menetapkan garis dasar, membangunnya lebih besar, dan mengatasi risiko pelepasan karbon prematur tidak akan pernah membuat bahan bakar fosil tetap

bertahan. Sudah saatnya mereka berhenti mencampuradukkan konservasi dengan kebutuhan akan pengurangan energi bahan bakar fosil yang drastis. Bahan bakar fosil harus dihapus dan disimpan di tanah, sementara kekerasan rasis dan sosial ekonomi yang sedang berlangsung di lokasi ekstraksi, pembakaran, dan transportasi harus dihentikan sekarang.

Sistem penetapan harga karbon darah tidak dapat mempertahankan batubara berdarah, atau bahan bakar fosil lainnya, tetap berada di dalam tanah.

Tamra L Gilbertson

PhD, adalah Penasihat Kebijakan Perubahan Iklim dan Hutan di Jaringan Lingkungan Adat (Indigenous Environmental Network - IEN), dan Dosen di Departemen Sosiologi Universitas Tennessee. Artikel ini didasarkan pada penelitian disertasinya dan artikel berikutnya yang diterbitkan di Community Development Journal.

Agustus 2021

- 1 PAX, European energy companies contributed to human rights violations and must now contribute to reparation, 2021, <https://paxforpeace.nl/news/overview/european-energy-companies-contributed-to-human-rights-violations-and-must-now-contribute-to-reparation>
- 2 CIMMagazine, Glencore to acquire full stake in Cerrejón mine, 2021, <https://magazine.cim.org/en/news/2021/glencore-to-acquire-full-stake-in-cerrejon-mine-en/>
- 3 Corporate Accountability Lab, El Arte de Operar con Impunidad: La Historia de Cerrejón en la Guajira Colombiana, 2021, <https://corpaccountabilitylab.org/calblog/2021/3/24/el-arte-de-operar-con-impunidad-la-historia-de-cerrejn-en-la-guajira-colombiana>
- 4 Community Development Journal, Financialization of nature and climate change policy: implications for mining-impacted Afro-Colombian communities, 2021, <https://academic.oup.com/cdj/article/56/1/21/5960023?questAccessKey=575b8542-aeef-441c-b66e-913f6afc4ca7>



Proyek REDD+ Katingan di Indonesia: Komodifikasi Alam, Tenaga Kerja dan Reproduksi Masyarakat

'Konsesi karbon' yang didirikan untuk menghasilkan dan menjual kredit karbon juga sangat mengikis struktur masyarakat, organisasi mereka dan reproduksi masyarakat. Inilah kisah desa Bapinang Hilir di Indonesia. Meskipun terletak di luar area konsesi 'proyek REDD+ Katingan', telah diidentifikasi sebagai di dalam zona proyek yang diverifikasi oleh skema sertifikasi (VCS dan CCBA). Artikel ini mengeksplorasi bagaimana pemilik konsesi memperoleh keuntungan dari penyertaan ini dengan mengorbankan penduduk desa Bapinang Hilir.

Desa Bapinang Hilir terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotawaringin Timur), Indonesia. Wilayah ini adalah salah satu dari tiga belas kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah di pulau

Kalimantan. Lokasinya yang berada di muara, berbatasan dengan Sungai Katingan dan Sungai Mentaya, merupakan kawasan rawa pasang surut dengan lapisan gambut dan pirit. Daerah ini mulai didiami 150 tahun yang lalu oleh arus migrasi akibat ekstraksi batubara di Kalimantan Selatan dimana orang Banjar diusir dan dipindahkan ke Sungai Mentaya, tempat di mana arus modal komoditas tanaman (kelapa dan karet) sedang berlangsung disiapkan oleh pemerintah kolonial.

Konteks sejarah di Bapinang Hilir pasca migrasi kental dengan konflik perebutan tanah perbatasan antara sirkuit pemodal dan masyarakat yang tinggal di daerah ini. Modal yang disuntikkan dari luar terutama mengakibatkan perluasan kegiatan industri yang memakan ruang-ruang hidup. Lahan gambut yang peka terhadap perubahan jelas menggambarkan kerusakan ekologis ini, di mana pusaran eksploitasi manusia dan lingkungannya semakin memperburuk marginalisasi bagi masyarakat. Dalam dasawarsa terakhir, lahan milik bersama yang tersisa semakin tertutup oleh bisnis perdagangan karbon.

Babak baru dalam sejarah Bapinang Hilir ini menunjukkan ekspansi absolut akumulasi kapital yang tidak hanya memakan ruang-ruang kehidupan ekologis, tetapi juga reproduksi masyarakat¹. Ekses/kelebihan (polusi) yang terus-menerus ditaburkan oleh modal keuangan dan industri negara-negara utara selama dua abad terakhir sekarang dianggap sebagai krisis (iklim) dan, dalam logika modal, ini pun telah menjadi komoditas. Hal ini akhirnya memungkinkan terciptanya konsesi karbon yang menghasilkan dan menjual kredit karbon. Ironisnya, model ini mengalihkan tanggung jawab untuk ‘mengurangi’ emisi ke petani kecil di Bapinang Hilir. Namun, kredit karbon yang dihasilkan tidak berkurang tetapi pada kenyataannya hanya dianggap sebagai kompensasi polusi lebih lanjut di tempat lain.

Kesimpulan awal tentang skema bisnis yang tidak hanya menjual lanskap hutan gambut tetapi juga mengubah struktur dan organisasi masyarakat – seperti yang disyaratkan oleh skema **sertifikasi karbon** – jelas-jelas bentuk komodifikasi reproduksi masyarakat. Jadi, ketika mengacu pada konsesi karbon yang didirikan untuk menjual kredit karbon ke sebagian besar negara-negara utara dan perusahaan, ruang (masyarakat reproduktif dan alam) juga secara sistematis dikomodifikasi.

Proyek REDD+ Katingan

Tanah yang dibiarkan tanpa konsesi ekonomi atau kegiatan ekstraktif masih dianggap tanah ulayat. Namun, sejak 2016, areal yang tersisa ini telah dikuasai PT Rimba Makmur Utama (RMU) untuk Proyek Restorasi dan Konservasi Gambut Katingan atau proyek REDD+ Katingan, melalui konsesi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Perusahaan Indonesia RMU didirikan pada tahun 2007 dengan ide mengambil keuntungan dari kegiatan konservasi hutan melalui perdagangan karbon. Permohonan RMU pada tahun 2008 untuk Izin Restorasi Ekosistem (ERC)² seluas 227.260 hektar yang terletak di Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur. Padahal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru mengeluarkan izin di Kabupaten Katingan pada tahun 2013, dan lainnya pada tahun 2016, seluas 149.800 hektar (lihat Peta Area Proyek dan Zona

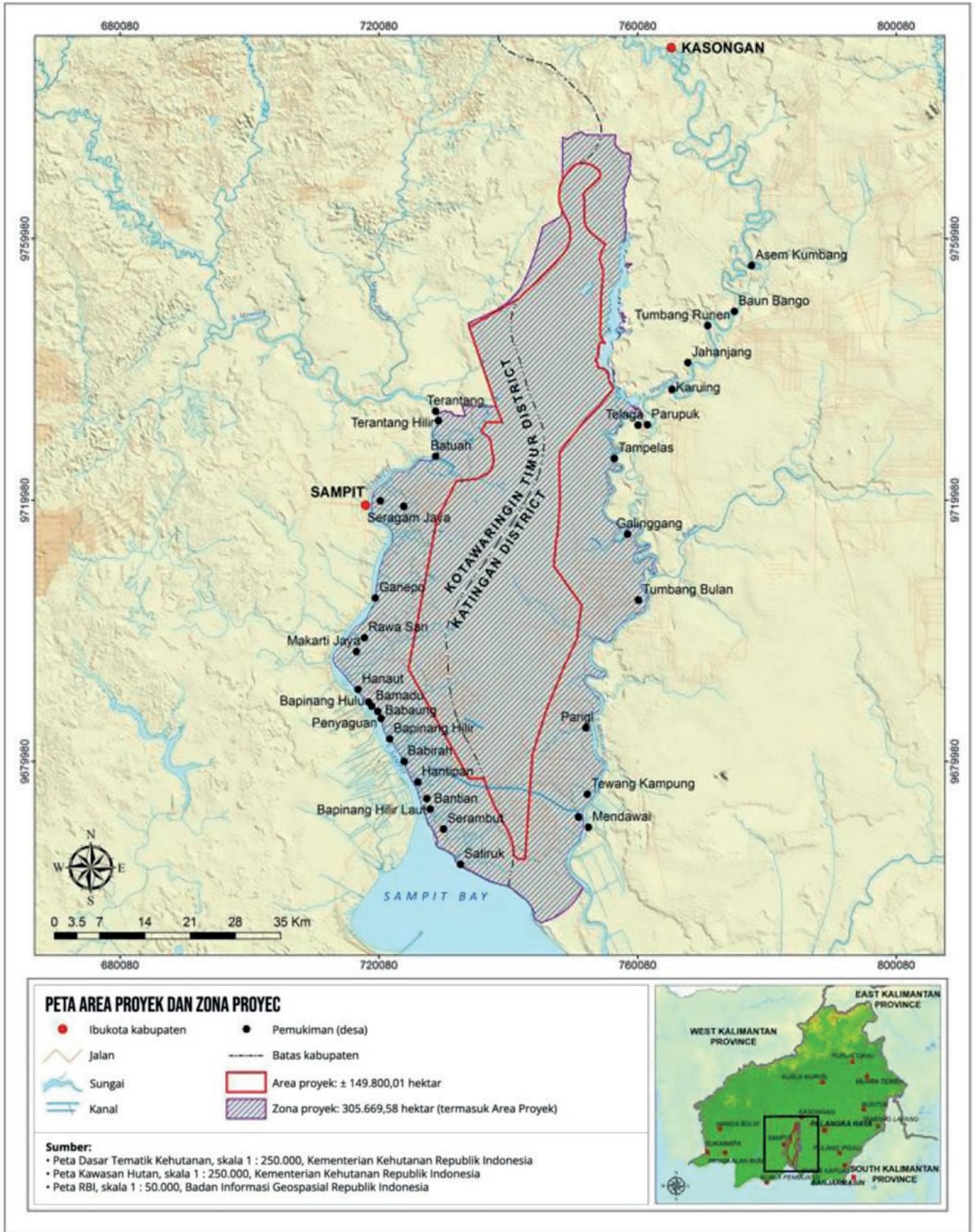
Proyek).³ Apabila dihitung luas Wilayah Proyek yang meliputi areal di luar Konsesi Restorasi Ekosistem, luasnya mencapai 305.669 hektar, menjadikan proyek Katingan REDD+ proyek pengurangan emisi terbesar di dunia. Proyek ini telah menerima **sertifikasi** terverifikasi Standar Karbon (Verified Carbon Standard /VCS) dan Aliansi Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati (Climate, Community & Biodiversity Alliance / CCBA).

Meskipun luas area konsesi RMU adalah 149.800 hektar, total area yang diperhitungkan sebagai zona proyek yang diverifikasi VCS dan CCBA adalah 305.669 hektar.³ Sebelum kredit karbon dapat dijual, RMU mengandalkan investasi dari berbagai organisasi dan perusahaan, termasuk The David and Lucile Packard Foundation, USAID Indonesia Forest and Climate Support, Global Environmental Facility, Clinton Foundation, bank pembangunan Norwegia NORAD dan Yayasan Puter yang merupakan mitra RMU untuk kegiatan pengembangan masyarakat.

Selain penjualan kredit karbon, RMU melalui Yayasan Puter menerima dana dari berbagai perusahaan dan yayasan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Program yang muncul di Bapinang Hilir antara lain pemetaan partisipatif, pemberdayaan petani gula kelapa, dan program-program yang mendorong masyarakat beralih ke pertanian hortikultura organik. Dana ini dapat dilihat sebagai cara bagi RMU untuk memenuhi persyaratan biaya untuk skema **sertifikasi** dan sebagai insentif untuk mempermudah perdagangan **kredit karbon**.

Kredit karbon dihitung berdasarkan skenario ancaman deforestasi dari konsesi HTI, hak budidaya masyarakat dan perambahan hutan oleh masyarakat. Jumlah karbon dioksida yang diharapkan dapat dihindari dengan proyek REDD+, menurut dokumen proyek, menjadi dasar jumlah kredit yang dapat dijual. Ini seharusnya didasarkan pada perhitungan di wilayah konsesi (atau wilayah proyek) antara skenario dasar tanpa proyek dan skenario yang dibayangkan dengan proyek. Namun, perhitungan ini juga mencakup wilayah di luar konsesi, atau yang disebut sebagai zona proyek, yang meliputi pemukiman masyarakat dan lahan pertanian. Daerah-daerah ini merupakan faktor pengurang kredit karbon yang dapat dijual. RMU sendiri mengakui bahwa hal ini membawa risiko terhadap penguasaan lahan dan politik lokal dan menyarankan bahwa hal ini dapat dikurangi melalui pendekatan dan kesepakatan di antara masyarakat.³

Sertifikasi VCS yang diperoleh RMU memiliki syarat. Salah satunya adalah memastikan proyek tidak berdampak negatif bagi masyarakat lokal dan mendorong partisipasi mereka dalam proses pengembangan dan pelaksanaan proyek. Sertifikat CCBS bertujuan untuk menjamin bahwa proyek meningkatkan kesejahteraan masyarakat di zona proyek. Hal ini dihitung dengan membandingkan skenario kesejahteraan masyarakat tanpa intervensi kegiatan dan kesejahteraan masyarakat setelah intervensi. Sertifikat CCBS dapat meningkatkan nilai kredit karbon sekitar 1,6 dolar AS per tCO₂e (dari harga awal sekitar 2,3 dolar menjadi 3,9 dolar pada 2016). Selain itu, sertifikat ini merupakan faktor penentu untuk mengurangi risiko yang dapat berdampak pada jumlah karbon yang dapat dijual, serta bagian dari skenario pengurangan emisi yang muncul karena perambahan masyarakat. Diperkirakan RMU berpotensi menghasilkan sekitar US1,7 miliar dolar untuk masa konsesi 60 tahun, tanpa memperhitungkan dana hibah yang juga mereka peroleh.³



Peta Area Proyek dan Zona Proyek

Munculnya karbon sebagai satu lagi komoditas kapitalis telah mengubah tenaga kerja dan hubungan produktif di pedesaan secara dramatis.

RMU mulai berinteraksi dengan masyarakat melalui Puter Foundation pada tahun 2012, menggunakan dana USAID, untuk memetakan sumber daya dan mata pencaharian masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk berkolaborasi dalam bisnis karbon. Ini merupakan tahap awal bagi perusahaan untuk mencoba menandatangani Nota Kesepahaman dengan pemerintah desa. Setelah penandatanganan MoU, desa akan menerima 100 juta rupiah (sekitar US7 ribu dolar) dan dua juta rupiah (sekitar 140 dolar) per bulan untuk penguatan perangkat desa. Penduduk desa juga dapat mengajukan proposal untuk pengembangan kegiatan ekonomi mereka. Pengembangan usaha masyarakat yang dilakukan didasarkan pada program pertanian yang memperkenalkan pupuk organik dan melarang pembakaran dan penggunaan bahan kimia.

Tahap inisiasi pertama ditolak oleh hampir semua pemerintah desa, membuat RMU banyak kesulitan untuk mendapatkan Nota Kesepahaman (MoU). Perlawanan ini dimobilisasi oleh elit kelapa yang menguasai pemerintahan desa dan kecamatan serta Kelompok Tani Dayak Misik Pulau Hanaut.⁴ Penolakan ini dipicu oleh kabar yang beredar di masyarakat di Kabupaten Katingan bahwa warga kesulitan mengakses hutan akibat pembatasan bertahap pemanfaatan warga di kawasan konsesi oleh RMU.⁵ Namun pemberian dana kepada pemerintah desa mendorong aspirasi pemerintah desa lainnya untuk bekerjasama dengan RMU serta menumbuhkan kecurigaan antara desa dengan Kelompok Dayak Misik.

Kelompok Dayak Misik sebagai satu-satunya lembaga kelompok adat yang berkepentingan dengan perluasan tanah melalui penerbitan Sertifikat Tanah Adat, terhambat oleh penguasaan tanah ulayat oleh RMU. Petani lain yang tidak tergabung dalam Kelompok Dayak Misik, seperti perangkat desa dan pemilik perkebunan kelapa besar di Bapinang Hilir, cenderung mendukung Dayak Misik karena mereka menganggap MoU antara desa dan RMU berarti penyerahan tanah ulayat dan pelarangan masuknya penduduk desa ke dalam hutan mereka. Munculnya himbauan⁶ untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi kredit karbon, seperti menanam kelapa sawit, memanen kayu dan berburu, membuat sebagian petani semakin merasa terancam⁷ dengan adanya MoU. Selain itu, penguasaan lahan oleh RMU juga membuat lahan menjadi langka.

Pada tahun 2017, camat dikeluarkan dari elite kelapa dan camat terpilih dinilai memfasilitasi proses penandatanganan MoU. Setelah camat berganti, hampir semua desa menandatangani perjanjian kerjasama dengan RMU karena tergiur desa lain yang sudah diberi uang.

Bisnis karbon dan komodifikasi manusia

Munculnya karbon sebagai satu lagi komoditas kapitalis telah mengubah tenaga kerja dan hubungan produktif di pedesaan secara dramatis. Petani, yang memiliki

tingkat otonomi tertentu, menguasai alat-alat produksi dan bekerja dengan tenaga mereka sendiri, diubah oleh proyek REDD+ menjadi produsen komoditas kecil.⁸ Dengan kehilangan otonominya, mereka harus memproduksi barang-dagangan untuk mendapatkan uang sebagai ganti membeli barang-dagangan lain untuk kebutuhan konsumsi dan dengan demikian tergantung pada uang yang mereka peroleh dari menjual tenaga mereka ke dalam ekonomi pasar kapitalis.

Masyarakat Bapinang Hilir dan masyarakat adat Kalimantan pada umumnya memiliki pengaturan dan pembagian kerja khusus dalam **pembakaran semak belukar** sebelum penanaman.⁹ Hal ini dilakukan agar **api** tidak mengeluarkan asap dan tidak merembet ke kebun petani lain. Pada musim kebakaran, masyarakat yang memiliki kebun biasanya menggunakan tenaga mereka untuk mencegah agar hasil panen mereka tidak dilahap api. Pembakaran semak menjadi isu yang berat di Bapinang Hilir pada 2019-2020 karena ancaman penjara 25 tahun dan denda 2 miliar rupiah (sekitar US14 ribu dolar) kepada yang memulai kebakaran. Akibatnya, petani umumnya beralih menggunakan herbisida untuk menghilangkan rumput atau, dalam jumlah kecil, untuk membakar lahan secara diam-diam. Kebakaran lahan sebenarnya adalah kebakaran yang tidak terkendali, umumnya disebabkan oleh lahan terlantar dan menyebar dengan meluasnya perkebunan pohon monokultur skala besar, seperti kelapa sawit dan akasia.

Kebakaran lahan tahun 2015 yang meninggalkan tanah keras dengan tingkat keasaman tinggi dan membakar kebun makanan, merupakan akibat dari perputaran modal kapitalis yang muncul 150 tahun yang lalu. Kondisi ini menimbulkan diferensiasi kelas di masyarakat. Petani kecil semakin terpinggirkan akibat kebakaran lahan karena tanah yang keras dan keasaman yang tinggi, elit yang mengontrol pemerintahan desa dan memiliki perkebunan kelapa yang sangat besar menumpuk banyak lahan dan petani menengah memperluas kelapa sawit mereka. Petani padi marginal dibiarkan menggunakan herbisida karena dilarang menggunakan **api**, yang secara signifikan meningkatkan biaya menanam padi dan merusak tanah dan sumber air. Satu tahun setelah kebakaran besar, bisnis karbon mencaplok dan menutup sisa lahan yang belum diolah melalui konsesi restorasi ekosistem. Inspeksi bisnis karbon tidak hanya tentang penutupan lahan, membatasi akses ke komunitas lokal, tetapi juga tentang bagaimana reproduksi komunitas dikomodifikasi.

Penilaian baseline dan perpindahan masyarakat di luar areal konsesi serta bentuk-bentuk intervensi yang diusulkan dan disepakati oleh lembaga sertifikasi merupakan cikal bakal penilaian kegiatan reproduksi masyarakat. Reproduksi yang dimaksud tidak hanya berbicara tentang komunitas marginal yang mengalami krisis, tetapi juga dinamika perubahan agraria. Yang diperjualbelikan bukan hanya petani marjinal, tetapi juga persoalan terkait kebiasaan masyarakat (membakar rerumputan), reproduksi tenaga kerja jangka panjang (pendidikan) dan dinamika kelas di pedesaan (lahan kosong, akses terbatas elit, petani marjinal).

Sementara itu, proyek REDD+ Katingan menjual kredit karbon kepada pencemar multinasional seperti perusahaan minyak Shell dan maskapai penerbangan KLM. Perusahaan-perusahaan ini mengklaim 'netral karbon' karena mereka membeli kredit karbon yang dihasilkan oleh proyek-proyek yang sebenarnya secara struktural mengubah struktur dan organisasi masyarakat.¹⁰

Implikasinya adalah rekah metabolik dan dinamika yang menyertainya (perubahan ekologi, diferensiasi kelas dan marginalisasi) dimasukkan sebagai komoditas reproduktif masyarakat. Intervensi yang tercantum dalam laporan validasi sertifikat menunjukkan bahwa bisnis karbon tidak hanya mengkomodifikasi lanskap karbon yang luas, tetapi juga menghasilkan ruang-ruang baru di mana ekologi (di mana manusia menjadi bagiannya) sendiri menjadi komoditas.

Izzuddin Prawiranegara
Pusat Sumber Daya Agraria, Indonesia

1 Reproduksi masyarakat yang dimaksud mengacu pada hubungan dan proses sosial yang memastikan atau menopang struktur sosial dari waktu ke waktu. Lihat lebih lanjut di: Bachriadi, Dianto. 2020. 24.2: Manifesto Penataan Ulang Penguasaan Tanah 'Kawasan Hutan'. Bandung: ARCBooks.

2 <https://www.wrm.org.uy/id/node/14854>

3 RMU. 2016. Katingan Peatland Restoration and Conservation Project: Project Description VCS Version 3, CCB Standards Third Edition. Washington, DC: Verified Carbon Standards dan CCB Standards. https://www.katinganproject.com/uploads/default/modular/CCB_PROJ_DESC_ENG_1477_11MAY16.pdf

4 Kelompok Dayak Tani Misik merupakan bagian dari Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik (FKKT) (selanjutnya disebut Dayak Misik) yang didirikan pada tahun 2014 untuk memastikan keamanan lahan dan hutan kepada masyarakat Dayak serta mencegah tanah adat agar tidak dikuasai pendatang dan perusahaan. FKKT Dayak Misik memiliki program penyerahan tanah seluas lima hektar kepada anggota kelompok Dayak Misik melalui penerbitan Sertifikat Tanah Adat. Di beberapa tempat, Dayak Misik digunakan sebagai skema untuk melawan penguasaan tanah skala besar oleh perusahaan pertambangan dan kelapa sawit. Di Bapinang Hilir, kepengurusan Dayak Misik dikendalikan oleh keluarga elit kelapa dan anggotanya tidak terbatas pada orang Dayak, tetapi juga mencakup orang Banjar dan Melayu.

5 Sebelum memperoleh konsesi di Kabupaten Kotawaringin Timur, RMU memperoleh konsesi di Kabupaten Katingan pada tahun 2012. Setelah memperoleh sertifikat VCS, RMU terlebih dahulu berhasil memperoleh Nota Kesepahaman dengan mayoritas pemerintah desa di Katingan.

6 Himbuan ini disertai dengan pelatihan budidaya tanaman pangan dan sayuran organik kepada petani terpilih oleh petugas lapangan RMU. Setelah para petani kembali ke daerah masing-masing, para petani diberikan dana untuk mendirikan ladang percontohan untuk tanaman pangan dan pupuk organik.

7 Ancaman ini menimbulkan kecurigaan yang tinggi dari pihak luar sehingga sulit untuk berinteraksi dan mendapatkan kepercayaan dengan masyarakat Bapinang Hilir. Untuk mengetahui apakah pihak luar berpihak pada RMU atau tidak, para petani mengajukan pertanyaan tentang boleh tidaknya membakar rumput di lahan mereka.

8 Istilah petani mengacu pada orang yang mengolah tanah di pedesaan, menguasai alat-alat produksi, bekerja dengan tenaga sendiri, yang surplus produksinya diambil oleh penguasa dan sisanya digunakan untuk menukar produk yang dihasilkan (dari tenaga kerja). Untuk barang-barang yang - secara budaya - dianggap setara. Sedangkan produsen barang-dagangan kecil semata-mata adalah sekelompok orang yang terlibat dalam usaha tani untuk tujuan menghasilkan barang-dagangan atau orang-orang yang terlibat dalam hubungan produksi barang-dagangan kapitalis di bidang pertanian. Meskipun tampak tidak konsisten, terutama dalam mencari padanan bahasa Indonesia, di sini produsen komoditas kecil juga akan disebut sebagai 'petani'.

9 Sebagai perbandingan, lihat Dove, Michael, R. 1988. *Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Studi-studi Kasus dari Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. And, Dove, Michael R. "Theories of swidden agriculture, and the political economy of ignorance" *Agroforestry systems* 1.2 (1983): 85-99, yang memberikan gambaran yang sangat rinci tentang teknik pembakaran lahan yang digunakan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat dalam mempersiapkan lahan pertanian. Watson, G. A. 1984. "Utility Of Rice Cropping Strategies In Semuda Kecil Village, Central Kalimantan, Indonesia." *Workshop on Research Priorities in Tidal Swamp Rice*. Los Banos: International Rice Research Institute (IRRI). 49-67, juga menggambarkan bagaimana masyarakat di DAS Sungai Mentaya menanam padi dengan cara dibakar.

10 <https://www.wrm.org.uy/id/node/14830>

Referensi

Prawiranegara, Izzuddin. 2020. *Dari marginal menjadi lebih marginal: Pendalaman Metabolic Rift di Lahan Gambut (unpublished)*. Bandung: Pusat Sumber Daya Agraria.

Großmann, Kristina. 2019. "'Dayak, WakeUp': Land, Indigeneity, and Conflicting Ecologies in Central Kalimantan, Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 175 (2019) 1-28 1-28.

Hamrick, Kalley, dan Melissa Gallant. 2017. *Unlocking Potential State of the Voluntary Carbon Markets 2017*. Washington, DC: Forest Trends' Ecosystem Marketplace.

Pertemuan komunitas di Nhambita, Mozambik



Warisan Proyek Karbon Komunitas di Nhambita, Mozambik: Nostalgia, Kekecewaan, dan Kemarahan ¹

Perusahaan Inggris Envirotrade memulai proyek REDD+ pada tahun 2003 yang melibatkan masyarakat di zona penyangga Taman Nasional Gorongosa di bagian utara Mozambik. Proyek ini menjual kredit karbon di pasar sukarela. Envirotrade merekrut ratusan penduduk desa untuk menanam pohon. Setiap keluarga yang menerima pembayaran selama tujuh tahun, diwajibkan untuk merawat pohon selama bertahun-tahun. Pada tahun 2018, perusahaan meninggalkan wilayah tersebut, meninggalkan kewajiban yang tidak terpenuhi, hutang kepada penduduk desa dan ratusan keluarga yang kebingungan.

Pada tahun 2003, perusahaan Inggris Envirotrade yang sekarang sudah tidak beroperasi memulai proyek REDD+ di antara masyarakat sekitar dan di dalam zona penyangga Taman Nasional Gorongosa di provinsi Sofala, Mozambik tengah.

Dengan apa yang disebut ‘proyek karbon komunitas Sofia’, diklaim bahwa akan ada pengembangan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan kegiatan untuk mencapai pembangunan pedesaan di wilayah tersebut.² Proyek ini adalah usaha mencari keuntungan, karbon yang ditangkap melalui wanatani atau agro-forestry, konservasi hutan dan pencegahan deforestasi dijual di pasar karbon sukarela. Envirotrade juga merekrut ratusan anggota keluarga yang tinggal di wilayah Pungwe, di mana Nhambita menjadi bagiannya, sebagai ‘produsen’. Mereka ditugaskan untuk menanam berbagai jenis pohon berdasarkan kontrak yang menetapkan pembayaran selama tujuh tahun, meskipun tanggung jawab produsen untuk melindungi dan merawat pohon diperpanjang setelah periode tersebut.

Di luar kegiatan wanatani ini, proyek tersebut mencakup pendirian pabrik penggergajian dan pertukangan kayu lokal yang akan menggunakan bahan-bahan lokal secara berkelanjutan, dan juga pembuatan pembibitan untuk tanaman yang menghasilkan buah dan spesies tanaman lainnya. Pembibitan bertujuan untuk mendukung kegiatan wanatani dan sebagian besar mempekerjakan perempuan. Oleh karena itu, seperti halnya produsen, perusahaan memiliki ikatan kontrak dengan tukang kayu, pekerja pembibitan, penyuluh dan agen yang berpatroli di hutan untuk mencegah deforestasi dan **kebakaran**.

Lima belas tahun kemudian, pada tahun 2018, proyek tersebut berakhir dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi dan ratusan keluarga yang kebingungan. Menurut mantan produsen, perusahaan meninggalkan wilayah itu tanpa pamit kepada masyarakat dan berhutang pembayaran untuk penanaman pohon dan jasa perawatan.

“Envirotrade pergi meninggalkan banyak masalah. Envirotrade berhutang pembayaran kepada banyak orang. Pertama adalah hutang kepada produsen untuk menanam selama tiga tahun. Kedua, hutang kepada pekerja pembibitan yang menghasilkan anakan, juga selama tiga tahun mereka tidak melakukan pembayaran. Ketiga, utang kepada orang-orang yang melindungi kawasan, yang membuat sekat bakar, juga tiga tahun [hutang]. Keempat, mereka berutang karbon kepada orang-orang yang termasuk dalam kawasan [hutan] individu, juga tiga tahun. Terakhir, mereka berutang kompensasi kepada para pekerja.”³

Menurut mantan perusahaan manajemen karbon Envirotrade, yang membantah pernyataan di atas, bisnis ditutup karena jatuhnya harga karbon di pasar global dan akibat ketidaklayakan finansial, karena pendapatan dari karbonlah yang menopang proyek secara finansial.⁴ Lebih jauh lagi, perusahaan menganggap dirinya sebagai korban dari ‘kampanye anti-REDD+’ yang diduga mendiskreditkan kerja Envirotrade selama bertahun-tahun.

Pertanyaan apakah proyek tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan wilayah membagi pendapat di Nhambita. Namun, beberapa mantan produsen dan teknisi Envirotrade menyesali berakhirnya proyek, terutama karena hilangnya manfaat moneter yang biasa mereka terima setiap tahun.

Efek, warisan, pandangan, dan strategi

Ada keraguan di antara masyarakat Nhambita mengenai adakah kemungkinan atau tidak proyek tersebut diambil kembali oleh Envirotrade atau pihak berkepentingan lainnya.⁵ Antara ketidakpastian dan harapan, beberapa produsen di satu sisi terus melestarikan pohon yang ditanam, meskipun tidak perlu merawatnya, sementara di sisi lain membuka lahan baru untuk pertanian. Sementara Envirotrade berada di wilayah tersebut, produsen terikat kontrak dilarang membuka area baru untuk kegiatan lain, termasuk pertanian, karena Envirotrade tertarik pada vegetasi dan bioma sebanyak mungkin untuk memungkinkan kapasitas yang lebih besar untuk menangkap karbon.

Kunjungan yang dilakukan ke rumah tangga di Nhambita mengungkapkan banyaknya pohon yang menghasilkan buah, terutama pohon mangga dan jambu mete, yang ditanam di dalam lingkup proyek. Beberapa produsen yang dikunjungi menandatangani beberapa kontrak, yang mengadopsi sistem yang berbeda (*bordadura, consorciação, quinta*). Berbagai sistem kontrak ini dimungkinkan terutama bagi mereka yang memiliki ketersediaan lahan yang lebih besar.

Salah satu kekhawatiran yang dikemukakan oleh produsen yang diwawancarai adalah tidak mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan dengan pohon-pohon tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait tentang tingkat pengetahuan produsen tentang tujuan dan kekhususan proyek.

Menurut salah satu produsen,

*“Kami hanya menyimpan tanaman (...) ada area [di mana] mereka menebang pohon karena gugup dan tidak tahu harus bagaimana, karena mereka tidak dibayar, di ladang juga, mereka menebang pohon. Saya tanya kenapa mereka memotong, mereka bilang [karena] dilarang selama bertahun-tahun dan kemudian tidak dibayar. Ladang penuh dengan tanaman dan mereka [mengatakan] tanaman tersebut akan ditebang.”*⁶

Di luar kesimpangsiuran informasi antara perusahaan dan produsen, fakta bahwa narasi tentang kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai akibat dari proyek-proyek lingkungan juga perlu diperhatikan. Temuan di lapangan adalah perusahaan menciptakan tingkat ketergantungan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat, yang mengakibatkan pecahnya tingkat pendapatan dan ladang swasembada setelah perusahaan meninggalkan wilayah tersebut. Strategi untuk mempromosikan kedaulatan dan kemerdekaan tidak dibuat – malah sebaliknya.

Kedaulatan pangan

Salah satu kecaman paling menonjol yang dilontarkan pada proyek karbon Nhambita oleh para peneliti dan aktivis adalah potensi risiko terhadap keamanan dan kedaulatan pangan di kawasan tersebut⁷, karena produsen yang dikontrak (beberapa ratus di antaranya) cenderung mengabaikan produksi tanaman pangan karena sibuk mengabdikan diri pada penanaman dan perawatan pohon proyek.

Kenyataannya, menurut persepsi seorang guru sekolah dasar setempat setelah mengamati dinamika pelaksanaan proyek selama sekitar 10 tahun, dia

menemukan bahwa dengan proyek tersebut, komunitas Nhambita menunjukkan keunikan dibandingkan komunitas lain di mana dia mengajar. Para petani di sana mendedikasikan lebih sedikit jam kerja untuk lahan pertanian mereka sendiri agar dapat menginvestasikan waktu mereka dalam kegiatan proyek wanatani. “[Petani] sedikit merugi karena lebih banyak terlibat dengan perusahaan sehingga dan produksi pangan keluarga menjadi prioritas nomor 2”. Meskipun pendapatan dari penanaman pohon membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, “dengan mengesampingkan produksi pangan, mereka akhirnya merugi,” katanya.

Bukti menunjukkan bahwa para petani bergabung dengan proyek hanya karena mereka berharap akan menerima pembayaran uang. Meskipun seseorang tidak dapat meminimalkan nilai komunitas dari pohon yang ditanam – misalnya, menyediakan naungan dan buah⁸, serta perlindungan dari angin kencang dan angin topan –, dalam perspektif yang lebih luas, pohon tampaknya tidak banyak berguna kepada produsen. Sementara beberapa memilih untuk membuka ruang baru, yang lain menebang beberapa pohon yang ditanam (meskipun dalam skala kecil). Ini menunjukkan bahwa proyek tersebut pada akhirnya akan menghasilkan efek bumerang dari yang diinginkan oleh para pendukungnya, yaitu Envirotrade, perusahaan penyandang dana dan pembeli karbon. Tentu saja, kurangnya lapangan pekerjaan pedesaan di Mozambik secara struktural menentukan penerimaan proyek di masyarakat adalah.

Jelas, dengan tidak adanya studi khusus, akan terlalu dini untuk menilai perubahan yang terjadi di Nhambita sehubungan dengan penurunan produksi pangan lokal dan pola makan. Fenomena yang muncul dengan berakhirnya proyek adalah proses ‘re-agrarianization’ yang ditunjukkan dengan kembalinya praktik pertanian sebagai aktivitas utama rumah tangga.

Persepsi tentang dampak

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada perbedaan pendapat tentang dampak ekonomi proyek terhadap masyarakat. Menurut pendapat ‘nostalgia’, proyek tersebut memungkinkan orang-orang di bawah kontrak untuk memperoleh bahan dan barang konsumsi tertentu, seperti batu bata semen dan atap seng untuk memperbaiki rumah mereka, dan peralatan listrik tertentu (radio, panel surya, dll), meskipun hanya sedikit rumah yang dibangun menggunakan bahan non-lokal ini, seperti yang diamati oleh tim peneliti kami.

Di antara suara-suara yang lebih skeptis adalah kepala komunitas Nhambita (*régulo*) terkemuka. Baginya Envirotrade hanya ‘mengeksplorasi orang’. Tokoh masyarakat ini menolak untuk menjadi produsen Envirotrade karena ia menganggap jumlah yang ditawarkan tidak mencukupi dan tidak sepadan dengan upaya yang diperlukan untuk menjaga pohon tetap hidup dan sehat, dan bahwa persyaratan kontrak hanya menguntungkan Envirotrade. Bersama keluarganya, pemimpin ini memutuskan untuk meneruskan produksi makanan atau pangan. Beberapa keluarga lain juga memilih untuk tidak terlibat dalam proyek tersebut.

Pengalaman para perempuan berbeda dari pengalaman produsen lain yang

terlibat dalam proyek tersebut. Seorang perempuan petani produsen melaporkan dalam sebuah wawancara bahwa dia dipekerjakan untuk bekerja di pembibitan Envirotrade, dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore dan dia akan bekerja di ladangnya sebelum dan sesudah jam-jam tersebut, belum lagi kegiatan rumah tangga. Ketika ditanya tentang beban kerja ini dan upah rendah yang diterima, dia menyatakan bahwa upah tersebut diperlukan untuk kelangsungan hidupnya dan terutama untuk kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Setelah ditinggalkan perusahaan, perempuan seperti dia – yang masih belum dibayar – kehilangan sumber pendapatan mereka dari pembibitan, kehilangan sumber pendapatan dari pohon yang ditanam dan harus kembali beralih ke pertanian mereka untuk penghidupan mereka.

Dan bagaimana dengan karbon?

Terlepas dari perbedaan pendapat ini, ada kecurigaan bersama di antara beberapa anggota komunitas Nhambita: 'Apakah karbon akan terus ditangkap oleh pohon yang mereka tanam dan pelihara? Akankah Envirotrade terus menjual kredit karbon bahkan setelah upah tidak lagi dibayarkan?'

Seperti disebutkan sebelumnya, model yang digunakan dalam proyek karbon Nhambita adalah model dengan membayar produsen selama tujuh tahun setelah penanaman. Perusahaan mengatakan pembayaran seperti itu adalah uang muka, karena produsen lah berusaha untuk menjaga dan melindungi pohon dalam jangka waktu yang lebih lama, hingga 100 tahun.⁹

Dalam kasus REDD+, tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Envirotrade terus menjual karbon bahkan jika di mata petani di wilayah tersebut proyek tersebut tampaknya ditinggalkan. Kecurigaan ini dibantah oleh mantan manajer karbon di Envirotrade¹⁰, yang mengatakan bahwa proyek tersebut telah berakhir sepenuhnya.

Yang memicu kecurigaan ini adalah kenyataan bahwa para petani menerima tim yang berusaha untuk memeriksa inventarisasi hutan pada tahun 2019, setelah Envirotrade meninggalkan wilayah tersebut. Ada pertanyaan tentang apakah pohon-pohon itu terus sesuai tujuan awalnya (penangkapan karbon) meskipun produsen tidak menerima keuntungan finansial yang layak – belum lagi hutang yang belum dibayar.

Perangkap solusi krisis iklim dari Atas

Nhambita dan proyek lingkungan lainnya untuk menangkap karbon menunjukkan kerapuhan dan kontradiksi dari apa yang penulis artikel ini anggap sebagai tindakan iklim dari atas. Meskipun narasi para pendukung proyek menampilkannya seolah-olah mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati lokal di satu sisi, dan mengizinkan pembangunan pedesaan melalui pembayaran jasa lingkungan kepada petani yang dikontrak di sisi lain, proyek tersebut gagal dalam aspek-aspek berikut:

- **Sikap meremehkan lingkungan**

Selain fakta bahwa proyek ini dirancang dari atas ke bawah, para pendukungnya mengabaikan pendapat, pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan dari penerima manfaat. Meskipun para petani diberitahu tentang dampak dan manfaat lingkungan proyek, para produsen tidak memiliki pengetahuan tentang tujuan ekonomi proyek. Misalnya, mereka tidak mengetahui bahwa karbon adalah barang yang dapat diperdagangkan yang akan dijual di pasar internasional, kepada siapa akan dijual dan berapa harganya, untuk apa, dll. Dengan kata lain, seseorang menemukan asimetri informasi yang cukup besar tentang tujuan ekonomi nyata dari proyek: penangkapan karbon dan penjualan kreditnya di pasar internasional. Demikian pula, produsen tidak menyadari bahwa kredit karbon tersebut akhirnya digunakan untuk melancarkan kegiatan pencemaran di bagian lain dunia.

Fakta bahwa proyek dirancang tanpa mempertimbangkan aspirasi dan prioritas produsen berarti bahwa ketika perusahaan keluar, produsen mengalami penurunan pendapatan secara tiba-tiba. Lagi pula, mereka telah menginvestasikan pekerjaan dan tanah dalam proyek untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pohon daripada memusatkan upaya mereka pada kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang tanpa ketergantungan ekonomi pada perusahaan.

Terlepas dari kenyataan bahwa inventarisasi hutan menyebutkan manfaat tertentu, para produsen saat ini tersadar bahwa mereka ditinggal sendiri dengan area yang diambil alih oleh pohon-pohon yang menghasilkan buah dan spesies lain dengan kegunaan ekonomi yang kecil. Buah-buah ini akhirnya membusuk karena kurangnya pasar dan unit pengolahan. Skenario yang terjadi saat ini di Nhambita adalah hasil dari kebijakan yang tidak disesuaikan dengan realitas dan prioritas lokal, dan yang hanya mengakomodasi kepentingan ekonomi eksternal.

- **Kegagalan REDD+ dan pasar karbon**

Belum ada catatan proyek REDD+ yang berhasil mencapai tujuannya untuk menghentikan deforestasi, tetapi banyak yang berhasil mencapai tujuannya untuk mengimbangi kegiatan polusi. Beberapa studi telah menunjukkan bukti bahwa proyek semacam ini, di luar dampak sosial yang merugikan, tidak efektif dalam mencapai tujuan lingkungan, yaitu, mereka mempertanyakan kemanjuran kebijakan tersebut dalam mengurangi dan memerangi perubahan iklim.¹¹ Namun, kita perlu merenungkan dan mempertanyakan landasan kebijakan seperti REDD+ untuk bergantung pada rangsangan pasar internasional agar terwujud. Misalnya, salah satu penyebab kegagalan Envirotrade di Mozambik, sebagaimana disebutkan di atas, adalah jatuhnya harga karbon di pasar internasional. Tanpa penjualan kredit karbon, proyek menjadi tidak layak secara finansial, yang menunjukkan ketergantungan pada variabilitas dan rangsangan harga pasar internasional.

Selama 5 tahun terakhir, harga kredit karbon, seperti dalam kasus proyek REDD+ jenis ini, bervariasi dari US\$5 hingga US\$36 per ton.¹² Variabilitas ini merupakan risiko pelaksanaan dan keberlanjutan proyek REDD+ yang bergantung pada penjualan kredit karbon. Di luar risiko ekonomi, faktor ini mewakili risiko sosial, karena harga karbon yang rendah dapat berarti lebih sedikit manfaat bagi rumah tangga yang terkena

dampak proyek, atau bahkan kegagalan proyek seperti yang terjadi pada Envirotrade di Mozambik. Namun, skema ini juga memiliki risiko terkait nilai tukar antara Dolar AS dan Metical (mata uang lokal). Semakin tinggi nilai Dolar versus Metical, itu artinya semakin besar pendapatan dalam mata uang lokal dan lebih banyak sumber daya untuk proyek sosial akan tersedia. Namun, jika kebalikannya akan berisiko. Oleh karena itu, selain ketergantungan pada harga karbon, keberhasilan program-program tersebut juga bergantung pada volatilitas nilai tukar. Dengan kata lain, penghidupan produsen yang terlibat akan tergantung pada dinamika pasar internasional dan mata uang, dan akan tunduk pada risiko yang melibatkan skema semacam itu.

Oleh karena itu, cara REDD+ dipahami tidak hanya menampilkan risiko sosial, seperti meningkatnya kemiskinan pedesaan, tetapi juga mempromosikan skema yang terus melemahkan lingkungan karena memungkinkan pencemar untuk terus mencemari. Dengan kata lain, logika pasar di mana REDD+ beroperasi membuat komponen ekonominya menjadi dominan di atas tujuan lingkungan dan sosial.

- **Membangun keadilan iklim**

Implementasi REDD+ di Mozambik, khususnya kasus Nhambita, mengungkapkan bagaimana ketidakadilan iklim terjadi. Secara historis, Mozambik adalah salah satu negara dengan jejak masalah lingkungan terkecil di dunia. Namun, negara ini telah menjadi tuan rumah berbagai proyek penangkapan karbon, dengan biaya sosial yang tinggi, untuk memungkinkan penghasil emisi besar seperti China dan Amerika Serikat, serta perusahaan transnasional, untuk terus memproduksi dan melakukan industrialisasi. Selain beroperasi di sektor-sektor seperti ekstraksi mineral (batubara, bijih, gas), perkebunan (kayu putih, pinus, karet) dan pertanian industri skala besar, yang berdampak negatif pada ribuan petani, perusahaan-perusahaan ini juga mendapat manfaat dari pasar karbon. Strategi ini berfungsi untuk membersihkan citra perusahaan-perusahaan yang menggolongkan diri sebagai 'karbon netral'.

Proyek-proyek untuk memberikan solusi terhadap krisis iklim dari atas mungkin tampak menarik bagi kaum tani karena janji mereka akan uang dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Namun, model ini belum berkelanjutan, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman Nhambita. Di luar efek buruk dari kebijakan ini, Mozambik telah terkena dampak peristiwa cuaca ekstrem dengan dampak lingkungan yang mengerikan. Ini berarti bahwa negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis lingkungan adalah yang paling merasakan dampaknya, serta menjadi tuan rumah 'solusi palsu' untuk perubahan iklim.

Dalam konteks inilah perlu ditekankan perlunya memperdalam pengertian dan konsep keadilan iklim, dengan tujuan untuk mengadopsi kebijakan dan solusi krisis lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi dan berkeadilan sosial, serta mempertimbangkan faktor sejarah jejak kerusakan lingkungan dan prioritas yang berbeda dari negara-negara dengan tingkat industrialisasi dan pembangunan ekonomi yang berbeda. Dengan kata lain, konsepsi dan desain kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip panduan keadilan iklim.

Boaventura Monjane

Peneliti asosiasi di Pusat Studi Afrika (CEA, UEM); peneliti pasca-doktoral di Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS, UWC); rekan dari International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) dari Rosa Luxemburg Foundation

Natacha Bruna

Peneliti Observatório do Meio Rural

Euridse Samuel

Asisten Peneliti

Fotos: Elton Júlio

Puzzle Pictures

1 Artikel ini merupakan hasil penelitian akademis yang didanai oleh Queen Elizabeth Scholarship (QES) dari York University, Kanada, dengan dukungan editorial dari World Rainforest Movement. Para penulis mengunjungi Nhambita pada Juli 2021 dan melakukan wawancara semi-terstruktur dan kelompok fokus dengan sekitar 20 anggota komunitas, di antaranya adalah mantan produsen dan teknisi Envirotrade, pemimpin lokal, dan pejabat pemerintah setempat.

2 https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000169

3 Wawancara, mantan teknisi lokal Envirotrade.

4 <https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/DR-135-Mercado-de-carbono.pdf>

5 Wawancara 1, mantan produsen.

6 Wawancara 2, mantan teknisi dan produsen Envirotrade.

7 <https://viacampesina.org/en/mozambique-carbon-trading-and-redd-farmers-grow-carbon-for-the-benefit-of-polluters/>

8 Beberapa petani yang diwawancarai mengaitkan fakta bahwa penderitaan masyarakat tidak seberat yang lain dari dampak Badai Tropis IDAI, yang menghancurkan provinsi Sofala pada Maret 2019, dengan keberadaan banyak pohon di wilayah tersebut.

9 https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/Nhambita_internet.pdf

10 Adalah fakta bahwa baik proyek ini maupun Envirotrade tidak muncul di portal virtual di mana kredit karbon dijual.

11 <https://redd-monitor.org/2019/02/15/recent-academic-review-describes-redd-readiness-in-indonesia-as-a-failure/>

12 <https://indices.ihsmarkit.com/#/Carbonindex>

Area proyek REDD di Mai Ndombe, DRC

Foto: WRM



Proyek PIREDD/Plateaux REDD+ di Mai-Ndombe, DRC: Konflik dan Mekanisme Pengaduan

Proyek yang dibahas dalam artikel ini adalah bagian dari salah satu inisiatif yurisdiksional REDD+ terbesar di dunia: Proyek PIREDD/Plateaux REDD+. Seperti kebanyakan proyek REDD+, proyek ini memiliki mekanisme pengaduan. Cerita dari masyarakat yang terkena dampak mengungkapkan janji palsu tentang bagaimana mekanisme ini akan membantu meminta pertanggungjawaban proyek terhadap mereka yang terkena dampak. Rancangan mekanisme pengaduan secara sistematis ini gagal menyelesaikan pengaduan masyarakat. Tapi kemudian, mengapa mekanisme ini ada?

Republik Demokratik Kongo (DRC) memiliki kawasan hutan tropis terbesar di Afrika dan, oleh karena itu, secara khusus menjadi target para pendukung REDD+ seperti Bank Dunia dan LSM konservasi. Kisah yang mereka ceritakan selama 10-15 tahun terakhir adalah bahwa orang-orang yang bergantung pada hutan di DRC harus disalahkan atas deforestasi dan bahwa proyek-proyek REDD+ akan mengurangnya. Cerita itu salah dalam mengidentifikasi pendorong utama deforestasi dan menargetkan masyarakat, bukan industri penebangan atau pertambangan, dengan membatasi bagaimana mereka menggunakan hutan mereka. Hasilnya adalah meningkatnya laju deforestasi dan banyak konflik antara masyarakat dan pemrakarsa proyek REDD+ (lihat, misalnya www.wrm.org.uy/node/11935).

Pemerintah DRC mengadopsi strategi REDD+ pada tahun 2012, untuk membuka jalan bagi lebih banyak pendanaan dari Bank Dunia dan lainnya. Rencana investasi untuk menjalankan strategi REDD+ dijabarkan untuk periode 2016-2020 dengan mengadopsi beberapa instrumen hukum terkait REDD+.

Artikel ini berfokus pada proyek yang merupakan bagian dari salah satu inisiatif yurisdiksi REDD+ terbesar di dunia: Proyek PIREDD/Plateaux REDD+ di provinsi Mai-Ndombe¹. Seperti kebanyakan proyek REDD+, pelaksanaan proyek telah menyebabkan konflik dengan masyarakat yang penggunaan lahannya dibatasi oleh proyek. Sekali lagi, seperti kebanyakan, jika tidak semua, proyek REDD+, Proyek PIREDD/Plateaux REDD+ juga memiliki mekanisme pengaduan. Meskipun mekanisme ini seharusnya membuat proyek REDD+ bertanggung jawab kepada mereka yang terkena dampaknya, pada kenyataannya, pengaturan mekanisme tidak memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaksana proyek.

Kegagalan mekanisme pengaduan yang diuraikan dalam artikel ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang peran mekanisme tersebut dalam menghasilkan penerimaan donor dan publik terhadap inisiatif REDD+ yang diklaim partisipatif. Disfungsionalitas mekanisme pengaduan Proyek PIREDD/Plateaux REDD+ bukan hanya soal implementasi yang buruk. Bertentangan dengan gagasan di balik rancangannya, mekanisme pengaduan ini gagal diimplementasikan dan gagal menyelesaikan pengaduan masyarakat.

Proyek PIREDD/Plateaux REDD+

Provinsi Mai-Ndombe meliputi 12,3 juta hektar, dimana 80% di antaranya ditutupi oleh hutan. Pada tahun 2016, Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia menyetujui US\$13,1 juta dolar untuk proyek PIREDD/Plateaux REDD+. Proyek ini adalah komponen utama dari jumlah dana yang lebih besar yang disepakati dengan pemerintah DRC. Proyek PIREDD/Plateaux REDD+ adalah fase pertama dari program REDD+ Mai Ndombe dan dianggap sebagai inisiatif REDD+ yurisdiksi paling maju di DRC yaitu di empat wilayah administratif (Mushie, Kwamouth, Bolobo dan Yumbi).

LSM WWF adalah 'lembaga pelaksana lokal', dengan tanggung jawab untuk mempraktekkan proyek di empat bidang ini. Dengan tujuan yang dinyatakan untuk "mengurangi tekanan pada hutan", kegiatan proyek berfokus pada reboisasi, pertanian dan pengendalian kebakaran². Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Proyek Peningkatan Pengelolaan Lanskap Hutan (PGAPF, untuk akronim Perancis). Sebagai imbalan untuk menanam bibit dan melindungi sabana, masyarakat dijanjikan pembayaran berbasis hasil, manfaat moneter untuk pengiriman masyarakat yang menyediakan layanan seperti pemeliharaan jalan pemasok pertanian atau pendirian tempat penyimpanan kayu. Pembayaran sedianya dibayarkan setiap tahun oleh Program Investasi Hutan (FIP) Bank Dunia, melalui WWF sebagai perantara.

Untuk interaksi dengan masyarakat, WWF membentuk Local Development Committee (CLDs) di setiap desa. CLD mewakili masyarakat, bertindak sebagai titik kontak masyarakat untuk pelaksana proyek, menyampaikan keluhan dan menerima

serta mendistribusikan pembayaran kepada anggota masyarakat untuk tugas-tugas tertentu. Proyek ini ditugaskan untuk menyiapkan 175 CLD semacam itu. Setiap masyarakat di dalam wilayah proyek diharapkan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam. Rencana tersebut akan mengidentifikasi antara lain, area yang akan dilindungi dan di mana pohon harus ditanam.

Konflik dengan komunitas

Pemerintah DRC mengklaim bahwa salah satu pilar strategi REDD+ DRC, selain mengurangi deforestasi, adalah meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat termiskin dan paling rentan di negara ini.

Penelitian yang dilakukan oleh jaringan kelompok akar rumput yang didukung oleh organisasi Kongo Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espces Menacées (APEM) dalam kemitraan dengan Rainforest Foundation United Kingdom (RFUK), bagaimanapun, menunjukkan bahwa kenyataannya jauh dari aspirasi tersebut. Mereka bertemu dengan orang-orang di lebih dari dua puluh komunitas di wilayah administrasi Mushie, Bolobo, dan Kwamouth pada rentang tahun 2018-19. Selama pertemuan mereka dengan para perempuan, daftar panjang masalah dan konflik terkait proyek REDD+ terungkap. Daftar tersebut meliputi:

- **Perempuan tidak diperbolehkan melanjutkan praktik pertanian tradisional**

Selama pertemuan, para perempuan menggambarkan bagaimana mereka mengelola sabana secara tradisional. Setelah membajak plot yang akan mereka gunakan untuk bercocok tanam, **api kecil** akan membakar rerumputan yang telah digali. **Api kecil** juga mempersiapkan kondisi tanah yang ideal untuk mengumpulkan jamur, buah-buahan, ulat, daun, dan tanaman lainnya. Dengan adanya proyek REDD+ yang melarang pembakaran terkendali ini, banyak keluarga terputus dari sumber makanan penting. Perempuan di komunitas Bosina mengancam kurangnya ruang untuk menanam tanaman pangan di sabana. Tidak ada konsultasi dengan masyarakat tentang penggunaan kawasan tersebut untuk kegiatan reboisasi REDD+. Akibatnya, perempuan-perempuan kini harus berjalan jauh untuk menemukan area di mana mereka bisa menanam singkong. Sebagian besar lokasi ini berbentuk hutan dan oleh karena itu perempuan membutuhkan bantuan laki-laki untuk menebangnya. Hal ini tidak hanya menciptakan ketergantungan baru yang tidak dihadapi perempuan sebelumnya, tetapi juga menyebabkan lebih banyak deforestasi. Akibat proyek REDD+, produksi singkong perempuan-perempuan ini menurun. Perempuan dari desa Maa menjelaskan bagaimana mereka dilarang menggunakan sabana yang kemudian menghilangkan sumber makanan dan pendapatan lain, khususnya pengumpulan jamur. Proyek REDD+ telah memperburuk situasi ekonomi keluarga. Hal ini pada gilirannya berdampak pada, misalnya, kemampuan mereka untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Pada saat yang sama, risiko kerawanan pangan dan penyakit pun meningkat. Situasi serupa digambarkan oleh orang-orang di desa lain, termasuk Bompensole, Mbala II, Camp Ferrera, Twa Kwamouth, Lovwa, Nkô, Mbali dan Bopaka.

- **Tidak ada pembayaran untuk kegiatan reboisasi**

Para perempuan dari komunitas Bosina dan Komambi melaporkan bahwa mereka tidak menerima uang untuk reboisasi untuk jenis pohon cepat tumbuh dan pohon buah-buahan yang mereka tanam untuk proyek tersebut.

- **Pilihan jenis pohon yang tidak cocok untuk reboisasi**

Anggota komunitas Maa mengungkapkan bahwa spesies cepat tumbuh yang dipilih oleh proyek, seperti akasia dan eucalyptus, tidak sesuai dengan kepentingan komunitas. Perempuan berpendapat bahwa mereka bisa mengumpulkan kayu-kayu mati sebagai kayu bakar untuk memasak bagi keluarga mereka dan tidak membutuhkan pohon akasia atau kayu putih tersebut.

- **Tidak ada pembayaran untuk pemeliharaan jalan**

Meskipun anggota masyarakat Komambi bekerja dalam pemeliharaan jalan dan menyelesaikan tugas mereka yang telah ditentukan dengan jelas, mereka belum dibayar untuk pekerjaan ini. Orang-orang yang tinggal di komunitas Maa, kamp Molart dan Komambi melaporkan masalah yang sama. Mereka menjelaskan bahwa pekerjaan mereka bahkan ditandatangani oleh perwakilan proyek tetapi, mereka tidak menerima menerima pembayaran.

- **Tertundanya Pembayaran untuk menyediakan ‘jasa lingkungan’**

Pembayaran kepada anggota masyarakat di Bosina yang dikategorikan sebagai ‘jasa lingkungan’ (melindungi sabana melalui pemadaman **kebakaran hutan**) belum dibayarkan selama dua musim. Komunitas Masiambio, Lovwa, Komambi, Bompensole, Mbala II dan Maseke juga melaporkan adanya pembayaran tertunda untuk pekerjaan pemadaman **kebakaran hutan** mereka. Pada Juni 2019, setelah menderita kelangkaan pangan karena harus meninggalkan ladang mereka untuk bekerja pada pemadaman **kebakaran hutan** dan alokasi lahan di bawah Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam, mereka masih belum menerima pembayaran, akhirnya masyarakat memutuskan untuk memprotes dengan membakar sabana yang seharusnya dilindungi di bawah proyek tersebut. Di komunitas Maa, ketua CLD, yang menandatangani kontrak dengan proyek REDD+ seputar pembayaran ini, menambahkan bahwa dia merasa terancam karena situasi ini. Komunitas Masiambio, Lovwa, Bosina, Bompensole, Komambi dan Maseke juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran untuk pembuatan sekat pemecah api.

- **Kontrak pembayaran diputuskan secara sepihak oleh WWF**

Ketua CLD di Komambi menjelaskan bahwa kontrak proyek REDD+ untuk membayar anggota masyarakat atas jasa mereka pada proyek diputuskan secara sepihak oleh para pemrakarsa REDD+. Dia menjelaskan bahwa dia tidak memiliki bantuan untuk dia dan masyarakatnya untuk menilai persyaratan kontrak yang diusulkan oleh proyek. Anggota komunitas Lovwa menambahkan bahwa tidak ada ketentuan dan jumlah denda yang disesuaikan yang harus dibayarkan jika pembayaran

tertunda dari proyek, akan tetapi ada kontrak untuk penalti bagi komunitas yang tidak memenuhi pekerjaan mereka dalam penanggulangan **kebakaran hutan**.

- **Pembayaran yang sangat rendah**

Anggota masyarakat di Komambi mengeluhkan pembayaran yang sangat rendah untuk pemadaman **kebakaran hutan** dan pemeliharaan sekat pemecah api: yaitu US 5 dolar per hektar per tahun. Anggota komunitas Maa juga melaporkan bahwa mereka menerima imbalan yang sangat sedikit untuk beberapa kegiatan proyek yang mereka lakukan. Mereka merasa bahwa dengan kegiatan penggembalaan dan bagi hasil yang biasa mereka lakukan sebelum proyek, mereka memperoleh lebih banyak. Mereka menjelaskan bahwa itulah salah satu alasan mereka tidak menjadi bagian dari proyek REDD+ lagi.

- **Kurangnya transparansi dalam pemilihan fasilitator panitia dan ketua CLD**

Anggota masyarakat Lova mengkritik kurangnya transparansi dalam bagaimana fasilitator dari berbagai kelompok dalam Komite Pembangunan Lokal (CLD) dipilih oleh proyek REDD+. Banyak komunitas mengungkapkan bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih ketua CLD mereka. Mereka juga melaporkan tidak ada pelaporan keuangan dari CLD kepada komunitas mereka. Masalah ini telah dikomunikasikan ke WWF, namun LSM tidak turun tangan dan masalah terus berlanjut.

- **Memperparah konflik tanah yang sudah berlangsung lama**

Promotor proyek REDD+ telah memperburuk konflik lahan yang sudah berlangsung lama di perbatasan antara komunitas Komambi dan Maa. Sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk setiap komunitas, promotor REDD+ membuat peta yang mengalokasikan sebagian tanah adat Komambi ke tanah adat masyarakat Maa. Hal ini akhirnya menyalakan kembali konflik tanah yang sudah berlangsung lama dan berujung pada kasus pengadilan.

- **Menciptakan konflik lahan baru**

Konflik lahan sensitif baru muncul ketika peta yang dihasilkan sebagai bagian dari Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk setiap komunitas dibuat. Ada kesalahan penetapan batas yang ditunjukkan pada peta antara desa Monana dan desa Nkó. Meskipun kedua komunitas tahu persis di mana batas antara wilayah adat mereka, otoritas kedua komunitas telah melihat peta dengan batas yang tidak benar. Anggota komunitas Nkó menjelaskan bahwa masalah batas ini menyebabkan ketidakpercayaan di antara kedua komunitas. Kondisi ini diperparah karena promotor proyek REDD+ tidak memperbaiki masalah dengan merevisi peta. Keluhan lain terkait tanah disebutkan oleh Kepala Masiambio yang menjelaskan bahwa hak tenurial mereka atas tanah adat mereka tidak dihormati. Demikian pula di masyarakat Nkuru, desa-desa menolak menandatangani berita acara pengesahan Rencana Pengelolaan

Sumber Daya Alam karena sebagian tanah mereka dialokasikan untuk masyarakat Hebi.³

- **Kurangnya informasi dan partisipasi**

Anggota masyarakat Bosina melaporkan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam penjabaran Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam mereka. Anggota komunitas Komambi menambahkan bahwa mereka bahkan tidak diajak berkonsultasi tentang proyek tersebut sejak awal. Selain itu, mereka mengecam WWF yang kerap menggunakan komunitas, Maa, untuk mewakili mereka. Kepala komunitas Maa pada gilirannya mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan izin untuk proyek tersebut. Setelah berkonsultasi dengan anggota komunitasnya, dia memutuskan untuk menulis surat dan menyampaikan bahwa komunitasnya tidak ingin menjadi bagian dari proyek REDD+ lagi. Penduduk desa dari Monana menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa itu proyek PIREDD/Plateaux REDD+, dan peneliti komunitas menemukan bahwa hanya 20% dari penduduk desa yang berkonsultasi di dalam PIREDD/Plateaux REDD+ yang pernah mendengar tentang REDD+.

[Mekanisme pengaduan dirancang tanpa melibatkan masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya.]

Mekanisme Pengaduan Disfungsional

Secara teori, mekanisme pengaduan yang baik akan menjadi alat yang sangat penting dalam kasus-kasus di mana konflik muncul, atau lebih tepatnya, upaya terakhir bagi masyarakat untuk mengandalkan beberapa akuntabilitas atas manfaat dan hak sosial yang dijanjikan dan disepakati. Disfungsi yang terungkap dari mekanisme pengaduan Proyek PIREDD/Plateaux REDD+ mempertanyakan tujuan sebenarnya dari mekanisme pengaduan ini dalam proyek-proyek REDD+ secara keseluruhan. Apakah ini benar-benar dibentuk untuk menyelesaikan konflik yang muncul dari pelaksanaan proyek? Apa kepentingan di balik pembentukan mekanisme semacam itu?

Pada tahun 2014, ketika pemerintah DRC masih dalam tahap persiapan proses REDD+, Bank Dunia membayar US\$5,2 juta dolar kepada pemerintah untuk mengoperasionalkan proyek **safeguards** REDD+, termasuk mekanisme pengaduan. Empat tahun kemudian, pada tahun 2018, keputusan pemerintah n°047 tanggal 9 Mei 2018 menetapkan prosedur untuk persetujuan investasi REDD+ di DRC dan kerangka **pengaman** serta standar yang akan dikembangkan. Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa mekanisme untuk mengelola pengaduan dan banding merupakan keharusan untuk proses tersebut. Standar nasional REDD+ yang menunggu validasi mencakup hal ini pada prinsip 3: Kegiatan REDD+ harus meminimalkan kerugian dan kerusakan, menyediakan ganti rugi dan menerapkan mekanisme ganti rugi yang adil dan merata atas setiap kerugian dan/atau kerusakan yang diderita oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, menurut informasi resmi mulai tahun

2020, mekanisme tersebut masih dalam tahap percobaan.

Namun, para promotor REDD+ memberi kesan bahwa mekanisme pengaduan sudah mapan dan berfungsi dengan baik. Program Investasi Hutan (FIP) Bank Dunia telah menguraikan model bagaimana mekanisme pengaduan harus berfungsi untuk proyek-proyek REDD+, yang terdiri dari tujuh langkah rinci tentang bagaimana pengaduan harus diterima, dinilai, diselidiki dan ditangani⁴. Proyek PIREDD/Plateaux REDD+ mengklaim telah membangun kapasitas masyarakat tentang mekanisme pengaduan.

Namun kunjungan lapangan yang dikoordinasikan oleh APEM menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya diinformasikan tentang mekanisme ini, mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya dan tidak memiliki bantuan atau bimbingan yang diperlukan. Akibatnya dalam praktiknya, mekanisme pengaduan tidak sepenuhnya dapat diakses oleh mereka yang terkena dampak negatif proyek REDD+. Kunjungan tersebut juga menunjukkan bahwa otoritas lokal yang diidentifikasi sebagai entitas yang ditugaskan untuk menerima dan memproses pengaduan tidak diberitahu dan/atau tidak bersedia untuk memproses pengaduan yang mereka terima.

Mekanisme pengaduan dirancang tanpa melibatkan masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya. Mekanisme ini justru dirancang untuk kepentingan pihak yang mengajukan pengaduan. Misalnya, kurangnya cara untuk memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka, misalnya dengan menyediakan informasi dan formulir dalam bahasa lokal. Contoh lain adalah bahwa tidak ada definisi yang jelas tentang tenggat waktu, akses ke informasi dan transparansi dalam keseluruhan prosedur.

Kunjungan lapangan juga mencatat bahwa di antara 26 desa yang dikunjungi, hanya ketua CLD Bosina dan Nkô yang mengetahui dan mengerti mekanisme pengaduan.

Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menciptakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses sejak awal. Hasilnya adalah penguatan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Bagian depan dari mekanisme yang telah dibuat merugikan para pengadu: yaitu masyarakat. Pengembangan dan desain mekanisme pengaduan adalah contoh lain dari pendekatan top-down yang menjadi ciri keseluruhan arsitektur REDD+.

Menguji Mekanisme

Tim APEM memutuskan untuk mendukung beberapa komunitas dalam menguji fungsi mekanisme pengaduan. Mereka membantu masyarakat untuk menyampaikan pengaduan resmi kepada pihak yang berwenang, memastikan bahwa pengaduan disiapkan dan disampaikan sesuai dengan pedoman mekanisme pengaduan. Masyarakat yang berdialog dengan APEM memilih untuk fokus pada isu-isu seperti pengakuan hak atas tanah adat; kurangnya ruang bagi perempuan untuk mengolah tanaman pangan mereka; pemilihan jenis pohon dari atas ke bawah untuk reboisasi; cara pembuatan peta yang tidak partisipatif di setiap komunitas; tidak adanya

partisipasi masyarakat dalam proyek; dan kurangnya informasi yang tepat kepada masyarakat dan/atau kurangnya persetujuan terhadap proyek REDD+.

Komunitas Komambi dan Maa adalah yang pertama menyampaikan keluhannya kepada otoritas yang berwenang di Mushie pada tanggal 10 November 2019. Awalnya, keluhan mereka ditolak, dengan alasan mekanisme belum beroperasi. Setelah pelapor bersikeras, orang yang tidak mau menerima pengaduan untuk pertama kalinya mengajukan argumen lain: yaitu dia mengklaim bahwa dia belum menerima panduan tentang cara menangani pengaduan dan bahwa dia belum menerima pengaduan apa pun sejauh ini.

Setelah bersikeras selama 5 hari, pengaduan akhirnya diterima dan konfirmasi diserahkan kepada pelapor. Namun, dokumen konfirmasi tidak memiliki nomor registrasi untuk mengidentifikasi dengan jelas pengaduan yang baru saja diajukan. Para pelapor hanya diberi janji lisan bahwa aduannya akan diperiksa. Rupanya, tidak ada yang terjadi setelahnya. Saat berkunjung ke kantor FIP di Kinshasa pada tanggal 18 Desember 2019 untuk mendapatkan informasi status pengaduan, petugas 'safeguards' menyatakan belum menerima pengaduan apapun.

Catatan akhir

Kasus Proyek PIREDD/Plateaux REDD+ menunjukkan bahwa selama ini jutaan dolar yang dihabiskan untuk mempersiapkan negara-negara untuk melaksanakan proyek-proyek REDD+ sejalan dengan kerangka **pengaman** yang diadopsi pada konferensi iklim PBB untuk mencegah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia, telah habis sia-sia. Masalah sosial dan konflik lokal muncul secara sistematis sejak proyek REDD+ pertama diluncurkan hampir 15 tahun yang lalu.⁵ Selain itu, analisis awal dalam Proyek PIREDD/ Plateau REDD+ menunjukkan bahwa kegiatan proyek tidak berhasil mengurangi hilangnya hutan setiap tahunnya.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa promotor REDD+ jelas tidak peduli dengan masyarakat dan apa yang mereka katakan tentang mempertahankan hutan. Promotor REDD+ seperti Bank Dunia dan WWF memaksakan ide dan rencana mereka sendiri. Mereka tampaknya tidak memiliki kepedulian untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan serta pelanggaran hak asasi manusia secara umum. **Pengamanan** masih berupa di atas kertas kerja. Lebih buruk lagi, mereka membuka pintu untuk lebih banyak konflik ketika konflik yang ada tetap tidak terselesaikan dan para pendukung REDD+ dapat mengklaim bahwa mereka menggunakan standar sosial dan lingkungan untuk proyek **penggantian kerugian** mereka.

Intinya adalah bahwa mekanisme pengaduan dan diskusi seputar kerangka **pengaman** tampaknya berjalan sangat baik untuk memastikan donor dapat terus mendanai skema yang rawan konflik dan kontroversial seperti REDD+. Mekanisme pengaduan palsu ini menciptakan kesan akuntabilitas ketika terjadi kesalahan. Kenyataannya tidak ada niat untuk dimintai pertanggungjawaban karena konflik tidak dapat dihindari dalam realitas implementasi REDD+ di mana masyarakat disalahkan atas deforestasi dan menghadapi pengenaan perubahan dan pembatasan

penggunaan lahan. Mekanisme ini juga mengabaikan bahwa masyarakat ini telah mengelola hutan yang sama dengan baik dan melindunginya tanpa campur tangan pihak ketiga. Jika itu tujuan proyek REDD+, mengapa ada orang yang mengharapkan mekanisme pengaduan berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari apa yang dikejar oleh proyek REDD+ - pembatasan penggunaan lahan bagi masyarakat?

Prince LUNGUNGU

APEM - Action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées (Aksi untuk promosi dan perlindungan masyarakat dan spesies yang terancam punah), DRC

lungprince@gmail.com

1 Artikel ini berdasarkan informasi dari laporan APEM yang tidak dipublikasikan “Retour d’expérience de suivi des plaintes et recours des communautés locales dans la mise en œuvre de la REDD+ dans la Province de Mai-Ndombe en République Démocratique du Congo : Cas de PIREDD/Plateaux” (Umpan balik dari pemantauan pengaduan dan banding dari masyarakat lokal dalam pelaksanaan REDD+ di Provinsi Mai-Ndombe di Republik Demokratik Kongo: Kasus PIREDD / Plateaux). Informasi dalam laporan APEM didasarkan pada beberapa kunjungan lapangan oleh anggota LSM selama 2018-2019 ke masyarakat dalam proyek PIREDD/Plateaux REDD+. Kunjungan dilakukan untuk memahami apa dan bagaimana mekanisme pengaduan proyek berjalan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat juga “REDD-MINUS: The Rhetoric and Reality of the Mai Ndombe REDD+ Programme”, Norah Berk and Prince Lungungu, Desember 2020 <https://www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/redd-minus.pdf>

2 WWF, REDD+: PIREDD-plateaux, an encouraging model in the fight against deforestation in the DRC, <https://www.wwfdr.org/?26981/REDD-PIREDD-plateaux-an-encouraging-model-in-the-fight-against-deforestation-in-the-DRC>

3 Dari 24 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam yang disusun di wilayah Bolobo, 9 disahkan/disetujui tanpa keberatan, 11 disahkan/disetujui oleh masyarakat dengan syarat kesalahan diperbaiki dan dalam empat kasus, masyarakat menolak menyetujui Rencana karena parahnya konflik yang dibuat oleh Rencana. Konflik-konflik ini berlanjut hingga hari ini.

4 Programme d’investissement pour la Forêt de La Republique Democratique Du Congo PIF RDC, https://pifrdc.org/glis_c/MGPR_PIF

5 REDD: A Collection of Conflicts, Contradictions and Lies, <https://www.wrm.org.uy/publications/redd-a-collection-of-conflicts-contradictions-and-lies>

Penebangan di area Proyek Grande Mayumba, di Gabon
Foto: Muyissi.



Bahaya bagi Komunitas dan Iklim: Bukan Solusi Berbasis Alam di Gabon

Pada konferensi iklim PBB pada tahun 2021, pemerintah Gabon menampilkan dirinya sebagai juara dalam perang melawan kerusakan iklim. Apakah ekstraksi bahan bakar fosil di Gabon akan berakhir? Tentu saja tidak. Retorika ini sebenarnya adalah greenwash. Pada intinya adalah kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2019 dengan produsen bahan bakar fosil Norwegia dan proyek Grande Mayumba. Masyarakat khawatir proyek penggantian kerugian karbon akan membawa lebih banyak kesulitan bagi keluarga yang telah melihat penangkapan ikan tradisional di sepanjang pantai sangat dibatasi sementara berjuang dan terhuyung-huyung dari perusakan tak terkompensasi terhadap tanaman mereka yang amuk oleh gajah membuat semakin terpojok dikarenakan kontak yang semakin dekat dengan penebangan industri dan perkebunan kelapa sawit.

Pada bulan-bulan menjelang KTT iklim PBB November 2021 di Glasgow, Skotlandia, laporan media Inggris menyoroti pentingnya hutan untuk iklim, khususnya

hutan di Gabon.¹ Mereka mendukung klaim bahwa untuk membantu melindungi iklim, negara-negara seperti Gabon harus dibayar untuk memelihara hutan mereka, dan karbon yang tersimpan di dalamnya.² LSM Chatham House yang berbasis di Inggris bahkan menjalankan podcast berdurasi satu jam³ di mana menteri hutan, lautan, dan perubahan iklim Gabon, Lee White, juga mengemukakan argumen ini.

Ketertarikan media Inggris yang tiba-tiba terhadap hutan di Gabon erat kaitannya dengan emisi karbon. Pemerintah negara industri, perusahaan dan LSM konservasi besar mengklaim bahwa hutan dapat mengkompensasi kerusakan (iklim) yang disebabkan ketika simpanan karbon bawah tanah dihancurkan untuk mengekstraksi batu bara, minyak dan gas. Bagaimana? Dengan melindungi hutan yang disinyalir terancam rusak. Mencegah perusakan yang diduga direncanakan ini menyimpan karbon yang ada di hutan – dan keluar dari atmosfer (lihat artikel dalam publikasi ini *Apakah Semua Karbon Sama? Karbon Fosil, Kekerasan dan Tenaga*). Argumentasi ini populer di kalangan perusahaan karena memungkinkan mereka untuk terus mengambil untung dari bahan bakar fosil selama mereka membayar beberapa proyek yang mengklaim melindungi hutan yang terancam, menanam pohon tambahan atau memulihkan lahan gambut yang rusak. Gagasan berbahaya bahwa perusakan simpanan karbon bawah tanah dapat dikompensasikan dengan mengklaim karbon di atas tanah yang tersimpan di hutan telah dipromosikan dengan nama REDD - atau baru-baru ini, dengan nama lain yaitu ‘Solusi Berbasis Alam’ (lihat artikel dalam publikasi ini *REDD: Lebih dari sekedar kegagalan*)⁴.

Dua contoh dari Gabon menunjukkan mengapa ‘Solusi’ Berbasis Alam akan menyebabkan lebih banyak kekacauan iklim karena tidak membantu mengakhiri ekstraksi batu bara, minyak dan gas. Seperti REDD selama 15 tahun terakhir, apa yang disebut solusi itu juga sebenarnya akan mengekspos masyarakat pada lebih banyak konflik dan kekerasan dan tidak mengurangi emisi dari pembalakan industri atau agribisnis.

Perjanjian Norwegia-Gabon: pembayaran untuk pengurangan deforestasi sementara deforestasi meningkat

Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada September 2019, pemerintah Norwegia berkomitmen untuk membayar 150 juta dolar AS kepada pemerintah Gabon jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengurangi deforestasi di bawah tingkat yang disepakati.⁵ Argumennya adalah menghindari deforestasi berarti sejumlah karbon dioksida tidak dilepaskan ke atmosfer karena pohon yang diduga akan ditebang akan tetap berdiri - dan menghindari emisi ini membantu mengurangi emisi di atmosfer.

Manfaat dari kesepakatan semacam itu bagi pemerintah Norwegia jelas: yaitu untuk pembayaran yang kecil (kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari penghancuran simpanan karbon bawah tanah di lepas pantai Norwegia), agar pemerintah Norwegia dapat menampilkan dirinya kepada dunia sebagai juara dalam perang melawan perubahan iklim. Sementara itu, pemerintah Norwegia yang sama lah yang mendesak orang-orang di Gabon untuk melindungi simpanan karbon hutan

di atas tanah mereka, karena simpanan ini penting untuk perlindungan iklim, terus menghancurkan simpanan karbon bawah tanahnya untuk mengekstraksi minyak dan gas, dan bahkan mendapat lebih banyak keuntungan dari penjualan dari bahan bakar fosil ini.⁶

Kesepakatan itu juga disambut oleh menteri kehutanan, kelautan, dan perubahan iklim Gabon.⁷ Negara penghasil minyak utama ini menggunakan kesepakatan itu untuk mengalihkan perhatian dari kerusakan iklim yang disebabkan oleh pengeboran minyak dan gas di lepas pantai dan, sebagai gantinya, mengklaim inisiatif mereka terhadap Solusi Berbasis Alam dan perlindungan karbon yang tersimpan di hutan di Gabon. Kesepakatan itu bahkan memungkinkan pemerintah Norwegia untuk membayar USD 17 juta pertama pada Juni 2021⁸, meskipun deforestasi di Gabon meningkat – di mana 60% jalan di negara ini adalah jalan hasil penebangan dan 44% hutannya diserahkan kepada perusahaan sebagai konsesi kayu.⁹

Perlu dicatat bahwa penyimpangan semacam itu tidak terkecuali dalam hal pembayaran atas pengurangan emisi hutan (REDD).¹⁰ Secara teratur, negara dan perusahaan yang paling bertanggung jawab menyebabkan kerusakan iklim membayar orang lain yang mengklaim telah mengurangi emisi dari deforestasi meskipun deforestasi di suatu negara atau di dalam proyek REDD meningkat;¹¹ atau pembayaran dilakukan untuk klaim bahwa deforestasi hutan yang berisiko rusak telah dihindari meskipun tidak ada indikasi yang masuk akal akan adanya risiko deforestasi. Konsekuensinya: perusahaan dan negara yang paling bertanggung



Masyarakat di provinsi Nyanga, Gabon, menyerukan penangguhan proyek Grande Mayumba NBS. November 2021

jawab atas kerusakan iklim dapat mengklaim bahwa perjanjian perdagangan, produk, dan layanan mereka, entah bagaimana “netral karbon” dan menghasilkan emisi “**net-zero**” – **dan** terus mengambil untung dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi yang masih berhubungan dengan mereka.

Bagi Lee White, kesepakatan USD 150 juta dengan Norwegia hanyalah permulaan. Dalam podcast Chatham House Oktober 2021, White memberi tahu pendengar bahwa “*setiap tahun, Gabon menyerap sekitar 100 juta ton karbon dioksida, bersih. Jadi, kami mengimbangi semua emisi kami. Kami tidak bertujuan untuk netralitas karbon, kami sudah netral karbon. Kami bahkan jauh lebih baik dari itu. Kami menyerap sekitar seperempat hingga sepertiga dari emisi tahunan Inggris ke hutan hujan kami.*”¹²

Tidak jauh dari garis argumen ini adalah klaim oleh negara-negara industri dan perusahaan bahwa mereka tidak perlu berhenti membakar batu bara, minyak dan gas di dalam negeri untuk mengklaim ‘netralitas karbon’; sebaliknya, mereka hanya perlu membayar, katakanlah negara Gabon, untuk melindungi karbon yang tersimpan di hutan mereka. Itu, menurut argumen, sama baiknya dengan menghentikan penghancuran sisa simpanan karbon bawah tanah; tidak perlu bagi negara-negara industri dan perusahaan untuk berhenti membakar mereka sebagai bahan bakar fosil.

Jelas, **mengimbangi** tidak sama dengan mengakhiri penghancuran simpanan karbon bawah tanah. Bahkan, **mengimbangi** berarti masyarakat yang tanahnya dihancurkan oleh tambang batu bara dan ladang minyak akan terus terkena paparan kekerasan dan polusi beracun yang terkait erat dengan ekstraksi bahan bakar fosil. **Offsetting** juga berarti bahwa masyarakat yang lingkungannya terkena dampak kilang terus terkena dampak kesehatan yang merusak. Dan **penyeimbangan** berarti lebih banyak lahan di ujung **penyeimbang** yang dikendalikan untuk melayani kepentingan korporasi – sebagai penyimpan karbon, dalam hal ini – sementara keluarga petani dan masyarakat hutan diperintahkan untuk berhenti menanam pangan di hutan.

Proyek Grande Mayumba: Ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat yang disamarkan sebagai ‘Solusi Berbasis Alam’

Pada bulan September 2021, pemerintah Gabon mengajukan proposal yang memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan dari proyek **penggantian kerugian karbon** berdasarkan argumen yang sama dengan kesepakatan antara pemerintah Norwegia dan Gabon: jika proyek tersebut menunjukkan bahwa hutan diduga berisiko dihancurkan, dan bahwa hutan-hutan ini dilindungi oleh proyek, pemerintah norwegia dapat menjual karbon yang disimpan melalui perlindungan hutan ini kepada perusahaan-perusahaan yang ingin terus membakar bahan bakar fosil dan pada saat yang sama mengklaim bahwa kerusakan iklim dari pembakaran bahan bakar fosil ini telah dikompensasikan.¹³ Salah satu proyek semacam itu sudah ada di provinsi barat daya Nyanga di Gabon: yaitu proyek Grande Mayumba.

Proyek Grande Mayumba dimulai pada tahun 2011, ketika pemerintah Gabon

dan sebuah perusahaan yang saat itu bernama SFM Africa Ltd.¹⁴ mendirikan Grande Mayumba Development Company (GMDC) sebagai kemitraan publik-swasta. Pemerintah Gabon memiliki 34 persen dari perusahaan, sementara 66 persen berada di tangan SFM Africa Ltd., yang sekarang dikenal sebagai African Conservation Development Group (ACDG).¹⁵

Seperti perusahaan lain yang didirikan oleh pengusaha Afrika Selatan Alan Bernstein, SFM Africa Ltd. dan African Conservation Development Group terdaftar di negara-negara yang sering disebut sebagai surga fiskal. Negara-negara ini populer bagi para penghindar pajak, antara lain karena perusahaan yang terdaftar di sana membayar pajak yang sangat rendah dan hanya perlu mengungkapkan sedikit saja informasi tentang bisnis dan pemiliknya. Pada tahun 1999, Bernstein mendaftarkan perusahaannya SFM International Ltd. di Bermuda. Kelompok Pengembangan Konservasi Afrika, yang dia dirikan kemudian, terdaftar di Mauritius. Menurut portal web investigasi Ojo Público, SFM International Ltd. adalah bagian dari jaringan perusahaan yang terlibat dalam penjualan kredit karbon dan penghindaran pajak sehubungan dengan proyek reboisasi di provinsi Ucayali di Peru.¹⁶ Pada tahun 2011, SFM International Ltd. menyatakan pailit.

Dirahasiakannya Dokumen kunci tentang proyek

Sangat sedikit dokumentasi substantif yang tersedia untuk umum tentang Perusahaan Pengembangan Grande Mayumba atau proyek Grande Mayumba. Faktanya, satu-satunya dokumen publik yang substantif adalah kontrak yang ditandatangani pada 20 Oktober 2011 antara Grande Mayumba Development Company dan anak perusahaan penebangan yang dimiliki sepenuhnya, Nyanga Forestry Operations. Kontrak itu mengacu pada kontrak lain yang ditandatangani pada 20 April 2011 dan yang membuat Grande Mayumba Development Company. Namun, kontrak tentang Perusahaan Pengembangan Grande Mayumba ini tampaknya tidak dipublikasikan.

Anggota masyarakat dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berkumpul di kota Mayumba pada bulan September dan November 2021 merasa khawatir tentang kerahasiaan seputar proyek Grande Mayumba. Siaran pers 5 Maret 2021 oleh Kelompok Pengembangan Konservasi Afrika (ACDG) mengklaim bahwa “proyek telah dirancang dengan cermat melalui proses konsultasi ekstensif selama beberapa tahun”.¹⁷ Sebaliknya, anggota masyarakat yang hadir dalam pertemuan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya konsultasi, dan tentu saja tidak ada yang mempresentasikan proyek secara utuh. Mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat peta rinci wilayah konsesi, tidak mengetahui siapa yang berada di balik ACDG atau bahwa Perusahaan Pengembangan Grande Mayumba adalah kemitraan swasta-publik dengan negara bagian Gabon sebagai pemegang saham. Mereka juga tidak menyadari bahwa Nyanga Forestry Operations (NFO), perusahaan yang mereka kenal hanya sebagai perusahaan penebangan kayu kecil yang tidak signifikan sebenarnya adalah anak perusahaan dari Grande Mayumba Development Company. Seperti perusahaan penebangan lainnya, NFO memiliki kewajiban hukum untuk bernegosiasi dan membayar kontribusi keuangan

kepada masyarakat yang terkena dampak operasinya. Pasal 251 Kode Hutan Gabon mengharuskan perusahaan penebangan menyetujui kontribusi tersebut sebagai bagian dari negosiasi *cahiers de charge*¹⁸ dengan masyarakat yang terkena dampak operasinya. NFO belum memenuhi kewajiban hukum ini. Sementara itu, perwakilan masyarakat bertanya-tanya berapa banyak uang yang telah dibayarkan NFO selama sepuluh tahun terakhir kepada Perusahaan Pengembangan Grande Mayumba untuk kayu yang telah diambil dari konsesi penebangan di tanah leluhur mereka (ingat bahwa NFO adalah anak perusahaan dari Perusahaan Pengembangan Grande Mayumba).¹⁹

The Grande Mayumba project apparently consists of six separate, large concession contracts covering an area equivalent to 3 percent of Gabon's land mass.

Penginapan Mewah

Dalam sebuah wawancara tahun 2019, Alan Bernstein menyebutkan rencana untuk kompleks penginapan mewah di Taman Nasional Loango, di sebelah utara konsesi proyek Grande Mayumba.²⁰ Dalam siaran persnya tanggal 12 Januari 2021, ACDG menyatakan bahwa di Taman Nasional Loango sebuah “pondok penginapan sedang dikembangkan oleh The African Conservation Development Group (ACDG) di bawah konsesi dari Badan Nasional Taman Nasional (Agence Nationale des Parcs Nationaux, ANPN).”²¹ Sebuah laporan tentang industri pariwisata di Gabon juga mencatat bahwa “pada Februari 2013 ANPN menandatangani perjanjian konsesi pariwisata konservasi dalam bentuk PPP [private-public partnership] dengan Sustainable Forestry Management (SFM) Safari Gabon, anak perusahaan dari firma konservasi dan pengembangan lanskap yang berbasis di Mauritius, SFM Africa. Perjanjian tersebut akan melihat pembangunan rangkaian pondok safari yang mewah dan berkelanjutan, dimulai dengan dua pondok di taman nasional Loango dan Pongara yang bertujuan untuk menarik 2.000 pengunjung per tahun.”²²

Taman Nasional Loango dan Pongara terletak jauh di luar area konsesi proyek Grande Mayumba yang luas. Sebuah artikel 2 Maret 2021 yang menghubungkan pembangunan pondok dengan dana investasi pemerintah Gabon FGIS dan anak perusahaannya Luxury Green Resorts tidak menyebutkan ACDG atau proyek Grande Mayumba.²³ Namun komentar Alan Bernstein dalam wawancara 2019 menyindir penginapan di Taman Nasional Loango. Bagaimana tepatnya pembangunan pondok mewah di Loango Park terkait dengan proyek Grande Mayumba, dan apakah SFM Safari Gabon adalah bagian dari Perusahaan Pengembangan Grande Mayumba atau menjalankan kegiatan bisnis di Gabon sebagai entitas terpisah yang dimiliki oleh Alan Bernstein, tetap tidak jelas.

Hanya Pengumuman besar tanpa uang?

Situs web SFM Afrika yang sekarang sudah tidak ada lagi menggambarkan Grande Mayumba Development Company sebagai kemitraan “untuk mengkonsolidasikan dan mengembangkan lahan hutan seluas 631.100 ha dan wilayah laut seluas 260.900 ha berdasarkan rencana pengelolaan lahan jangka panjang yang optimal secara ekologis dan ekonomis. (Rencana Pembangunan Berkelanjutan Grand Mayumba).”

Perwakilan dari masyarakat di dalam area konsesi Grande Mayumba dan organisasi masyarakat sipil yang berkumpul pada bulan September dan November 2021, terkejut mengetahui bahwa proyek Grande Mayumba tampaknya terdiri dari enam kontrak konsesi besar yang terpisah yang mencakup area yang setara dengan 3 persen dari masa tanah di Gabon. Mereka tidak menyadari bahwa tanah di dalam wilayah konsesi yang besar ini akan didedikasikan untuk “lima komponen bisnis utama - kehutanan, agribisnis, perikanan, ekowisata dan pembangunan infrastruktur”²⁴ dan bahwa sebagian besar dari konsesi penebangan akan diubah menjadi ‘hutan konservasi’, kemungkinan **Kawasan Lindung** baru.

Dalam laporan media, wawancara, dan posting blog, Alan Bernstein juga menyebutkan banyak kegiatan bisnis yang terkait dengan perusahaannya dan proyek Grande Mayumba. Ini juga merupakan berita penting bagi perwakilan masyarakat. Kegiatan yang disebutkan oleh Bernstein berkisar dari proyek perkebunan tebu yang dia harapkan untuk menghasilkan 250.000 ton gula per tahun, pabrik pengolahan kayu baru²⁵ di Mangali (sebuah desa dekat kota Mayumba), rantai pondok ekowisata mewah, konstruksi fasilitas pelabuhan di laguna Mayumba, dan pendirian peternakan tiram untuk mendukung penangkapan ikan rakyat.

Penebangan yang dilakukan oleh Operasi Kehutanan Nyanga selain, anggota masyarakat belum diberitahu tentang kegiatan yang direncanakan; mereka tidak tahu kapan mereka akan mulai atau bagaimana mereka akan mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian mereka. Orang-orang sangat prihatin dengan kegiatan perikanan dan konservasi yang disebutkan dalam informasi yang jarang ada tentang proyek Grande Mayumba.

Mata pencaharian nelayan tradisional di Mayumba sudah terancam dalam beberapa bulan terakhir dengan perluasan Taman Nasional Mayumba, kawasan perlindungan laut. Mereka kini harus mencari ikan sejauh 10 km dari bibir pantai. Hal ini membuat penangkapan ikan menjadi semakin sulit – dan berbahaya karena sebagian besar nelayan tradisional berangkat dengan perahu kecil, banyak yang tidak memiliki motor tempel. Sementara itu, armada penangkapan ikan komersial yang baru saja mendapat izin dari pemerintah terlihat dari darat, beroperasi siang dan malam, tampak tidak terganggu. Pembatasan yang diberlakukan oleh administrasi Taman Laut pada penangkapan ikan rakyat mempengaruhi kedaulatan pangan di kota Mayumba dan sekitarnya. “Anda bahkan tidak bisa membeli ikan lagi di sini di Mayumba,” kata orang-orang, menjelaskan bahwa Mayumba selalu menjadi tempat bagi siapa saja yang mencari ikan segar di Gabon selatan.

Apakah rencana Bernstein akan terwujud, sulit untuk dikatakan. Dia telah berbicara tentang sebagian besar kegiatan ini dalam waktu selama satu dekade. Namun, hanya pembangunan pondok mewah di Taman Nasional Loango dan penebangan oleh NFO yang sudah berlangsung, dengan beberapa kegiatan awal

dikatakan berlangsung di lokasi lokasi perkebunan tebu.

Salah satu alasan untuk awal yang lambat dari sebagian besar kegiatan tampaknya karena Kelompok Pengembangan Konservasi Afrika, dan SFM Afrika / SFM Gabon sebelumnya, belum mendapatkan uang untuk mewujudkan rencana besar mereka. Dalam artikel Juli 2021, “direktur modal utang” mereka menjelaskan bahwa perusahaan berharap untuk mengumpulkan hingga USD 300 juta dari penjualan obligasi (investor swasta meminjamkan uang kepada perusahaan dan menerima pembayaran bunga reguler saat perusahaan menggunakan modal mereka).²⁶ Sebagian dari obligasi ini akan dikaitkan dengan kredit karbon yang diharapkan perusahaan dapat dihasilkan dari proyek Grande Mayumba. Sekitar 10 tahun yang lalu, salah satu pendiri SFM Afrika Kevin Leo-Smith telah menulis bahwa perusahaan akan meluncurkan ‘ikatan hijau’ untuk memulai proyek Grande Mayumba. Masih harus dilihat apakah rencana penggalangan dana mereka akan terwujud kali ini.

Kisah deforestasi yang tidak masuk akal membuat klaim pengurangan emisi diragukan

Dalam kisah mereka tentang apa yang akan terjadi pada hutan tanpa proyek Grande Mayumba, ACDG menulis di situs webnya bahwa 52 persen (225 juta ton CO₂) dari karbon yang tersimpan di hutan akan hilang selama 25 tahun ke depan. Dengan proyek Grande Mayumba mereka, mereka mengklaim bahwa alih-alih 52 persen, hanya 5 persen karbon di hutan di dalam konsesi mereka yang akan dilepaskan ke atmosfer selama 25 tahun. Perbedaan antara 52 persen karbon hutan yang mereka katakan akan hancur tanpa proyek Grande Mayumba dan 5 persen dengan proyek mereka adalah jumlah karbon yang diklaim dapat dihemat oleh proyek: emisi senilai sekitar 200 juta ton CO₂.²⁷ Itu berarti 200 juta kredit karbon yang diharapkan perusahaan untuk dijual ke perusahaan atau negara seperti Norwegia yang ingin terus mendapat untung dari pembakaran bahan bakar fosil **dan** mengklaim tidak merusak iklim.

Angka-angka dalam paragraf menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh situs web ACDG. Faktanya adalah bahwa selama sepuluh dari 25 tahun yang diambil sebagai referensi dalam perhitungan, Perusahaan Pengembangan Grande Mayumba anak perusahaan NFO telah masuk ke dalam konsesi proyek Grande Mayumba. Dan perhitungan di situs web ACDG menempatkan deforestasi di dalam konsesi Grande Mayumba sebesar 2.000% di atas rata-rata deforestasi tahunan sekitar 0,1 persen di Gabon. Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan mengapa ini harus menjadi asumsi yang masuk akal.

Juga tidak masuk akal bahwa hutan yang ingin disisihkan oleh proyek Grande Mayumba sebagai “hutan konservasi” akan ditebang.²⁸ Sebuah laporan tentang perluasan **Kawasan Lindung** di Gabon menunjukkan bahwa sebagian besar hutan ini tumbuh di daerah yang tidak cocok untuk penebangan: “SFM mengakui bahwa sebagian besar wilayah yang diusulkan sangat curam untuk penebangan, terutama di sepanjang perbatasan dengan Kongo dan pegunungan di sebelah timur.”²⁹ Laporan tersebut menunjukkan bahwa bagian konsesi ini dapat menjadi kandidat

untuk perluasan **Kawasan Lindung** di masa depan.

Asumsi bahwa 52 persen karbon disimpan di hutan di pegunungan dan daerah perbatasan dengan Republik Kongo tampaknya sangat tidak masuk akal, jika tidak menggelikan. Iklim akan lebih buruk jika kredit karbon yang dihasilkan oleh proyek Grande Mayumba pernah dipasarkan.

Ada juga dunia antara realitas yang dihadapi komunitas petani dan nelayan artisanal di wilayah Mayumba saat ini dan proyek yang digambarkan Alan Bernstein sebagai “di garda depan dalam menempatkan nilai pada jasa ekosistem” dan “bekerja untuk mengangkat masyarakat.”³⁰ Pengalaman masyarakat dengan konservasi jauh dari menggembirakan. Ini adalah salah satu konflik dan perusakan tanaman mereka oleh gajah yang memojokkan mereka ke dalam kontak lebih dekat dengan masyarakat karena perkebunan kelapa sawit dan operasi penebangan komersial yang merambah hutan. Masyarakat sangat prihatin dengan usulan “hutan konservasi”. Mereka takut akan dilarang menggunakan hutan yang telah mereka lindungi secara turun-temurun setelah dinyatakan sebagai **Kawasan Lindung**.

Kekhawatiran ini tidak mengejutkan mengingat Menteri negara itu Lee White mengklaim bahwa “*secara artifisial, sebagian besar pedesaan Gabon kosong. Jadi, kami dapat membuat Taman Nasional ini dengan hampir tidak ada orang di dalamnya.*”³¹ Lee White salah dalam kedua hal. Meskipun masyarakat dipaksa di bawah pemerintahan kolonial Prancis untuk meninggalkan desa mereka dan pindah ke pinggir jalan, untuk mempermudah pemungutan pajak, mereka tetap mempertahankan ikatan dengan tanah leluhur mereka dan desa tetap ada di tempat-tempat yang telah dinyatakan sebagai Taman Nasional. Ini juga akan menjadi kasus di hutan yang oleh proyek Grande Mayumba telah diidentifikasi sebagai “hutan konservasi”.

Pada tanggal 5 November 2021, komunitas departemen Basse-Banio dan kotamadya Mayumba yang akan terkena dampak proyek Grande Mayumba, merilis deklarasi berjudul “*Katakan TIDAK untuk proyek Grande Mayumba*”. Komunitas bekerja untuk kelangsungan hidup lingkungan dan desa untuk melawan ketidaksetaraan sosial, lingkungan dan iklim, menyerukan penangguhan proyek Grande Mayumba.³²

Muyissi Environnement
Gabon, dan WRM

¹ Lihat, contohnya, Sky News, 13 October 2021. Gabon: ‘Very difficult’ to protect Great Congo Basin unless country rewarded for conservation efforts, minister warns. <https://news.sky.com/story/gabon-very-very-difficult-to-protect-great-congo-basin-unless-country-rewarded-for-conservation-efforts-minister-warns-12407143>; Financial Times, 20 July 2021. Africa’s green superpower: why Gabon wants markets to help tackle climate change. <https://www.ft.com/content/4f0579ac-409f-41d2-bf40-410d5a2ee46b>

² Lihat catatan kaki ¹

³ Chatham House Podcast (2021): Episode 7. Climate Change in Africa with Minister Lee White. <https://soundcloud.com/chathamhouse/episode-7-climate-change-in>

- 4 WRM, REDD: A Collection of Conflicts, Contradictions and Lies, <https://www.wrm.org.uy/publications/redd-a-collection-of-conflicts-contradictions-and-lies>
- 5 Gabon signs US\$150 million REDD deal with Norway. Shhh... Don't mention corruption. <https://redd-monitor.org/2019/09/24/gabon-signs-us150-million-redd-deal-with-norway-shhh-dont-mention-corruption/>
- 6 Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Payment for non-performance": Norway pays Gabon US\$17 million for increasing deforestation. <https://redd-monitor.org/2021/07/07/payment-for-non-performance-norway-pays-gabon-us17-million-for-increasing-deforestation/>
- 7 Payment for non-performance": Norway pays Gabon US\$17 million for increasing deforestation. <https://redd-monitor.org/2021/07/07/payment-for-non-performance-norway-pays-gabon-us17-million-for-increasing-deforestation/>
- 8 <https://www.nicfi.no/current/gabon-receives-first-payment-for-reducing-co2-emissions-under-historic-cafi-agreement/>
- 9 Olivier Hymas (2015). L'Okoumé, fils du manioc: Post-logging in remote rural forest areas of Gabon and its long-term impacts on development and the environment. <https://core.ac.uk/download/pdf/79498104.pdf>
- 10 Ben Elgin (2020). These Trees Are Not What They Seem. How the Nature Conservancy, the world's biggest environmental group, became a dealer of meaningless carbon offsets. Bloomberg Green. <https://www.bloomberg.com/features/2020-nature-conservancy-carbon-offsets-trees/>
- 11 Situs web REDD-Monitor mencantumkan banyak contoh: www.redd-monitor.org
- 12 lbd 3, menit 39dst.
- 13 Journal Officiel de la Republique Gabonaise. 16 September 2021. Dossier 777.
- 14 <https://web.archive.org/web/20181102061457/http://www.sfmafrica.com/management-team>
- 15 <https://www.aihitdata.com/company/027E21B0/grande-mayumba/overview>
- 16 Ojo Público, 05 November 2017. Carbon Credits: The multimillion dollar offshore scheme in the Peruvian Amazon. <https://paradisepapers.ojo-publico.com/investigacion/carbon-credits-the-multimillion-dollar-offshore-scheme-in-the-peruvian-amazon/>
- 17 Grande Mayumba Development Company Signe un Accord de Convention Portuaire Avec l'OPRAG. <https://afcondev.com/media/grande-mayumba-development-company-signs-port-convention-agreement-with-oprag>
- 18 Cahiers de charge dapat dilihat sebagai pengakuan hak ulayat masyarakat atas tanah oleh negara-negara di wilayah yang mempertahankan klaim kolonial bahwa semua tanah adalah milik negara. Cahiers de charge adalah perjanjian yang mencantumkan kewajiban keuangan perusahaan terhadap masyarakat yang tanah ulayatnya berada di dalam konsesi perusahaan.
- 19 Pasal 6 dari kontrak 20 Oktober 2011 mewajibkan NFO untuk membayar, antara lain, biaya sebesar FCFA 5.000 per meter kubik kayu Okomué dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi dari CS dan FCFA 5.000 per meter kubik yang dipotong untuk spesies lain, di

mana kayu sama dengan atau lebih tinggi dari kualitas B.

20 Gorillas, Forest Elephants Lure SFM Investment in Gabon's Forest. <https://www.bloombergquint.com/onweb/gorillas-forest-elephants-lure-sfm-investment-in-gabon-s-forest>

21 Construction of ACDG's First Lodge in Gabon Under Way. <https://panafricanvisions.com/2021/01/construction-of-acdgs-first-lodge-in-gabon-under-way/>

22 Oxford Business Group. A more sustainable approach: Development and promotion with an eye on the longer term. <https://oxfordbusinessgroup.com/overview/more-sustainable-approach-development-and-promotion-eye-longer-term>

23 Le Fonds gabonais d'investissements stratégiques veut valoriser le potentiel de l'écotourisme. <https://www.lenouveaugabon.com/fr/economie/0303-16540-le-fonds-gabonais-d-investissements-strategiques-veut-valoriser-le-potentiel-de-l-ecotourisme>

24 <https://web.archive.org/web/20181102061505/http://www.sfmafrica.com/projects/gabon>

25 Situs web SFM Afrika yang sekarang sudah tidak ada lagi telah menyatakan, dalam waktu sekarang, bahwa "pohon yang dipanen di area konsesi GMDC diproses secara lokal di penggergajian GMDC." Tidak ada pabrik seperti itu pada saat penulisan.

26 <https://www.ft.com/content/4f0579ac-409f-41d2-bf40-410d5a2ee46b>

27 <https://africanconservationdevelopmentgroup.com/project/>

28 "Rencana Pembangunan Berkelanjutan Grande Mayumba, yang dikembangkan dalam kemitraan dengan Republik Gabon, menetapkan 29% dari Grande Mayumba untuk penebangan berdampak rendah di kawasan kehutanan yang ada dan 13% untuk pertanian campuran di padang rumput yang sebagian besar terdegradasi, sementara 30% dari Grande Mayumba konsesi kehutanan akan ditarik dari perhutanan komersial dan diproklamirkan sebagai kawasan konservasi, karena nilai keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Ini berarti lebih dari 220.000 ha dari 730.000 ha luas lahan akan disisihkan secara permanen untuk konservasi, termasuk hutan perwakilan dan ekosistem sabana, serta sebagai lingkungan laut dan air tawar." Alan Bernstein (2021). The convening power of natural capital. <https://forestlab.partners/perspective/perspective-01/natural-capital-investment-provides-a-new-development-model-for-africa>

29 CAFI. Accélérateur de réformes en Afrique centrale. Version 2019-18-12 Expansion des aires protégées et optimisation de l'utilisation des terres aux fins de production de cultures vivrières au Gabon. https://www.cafi.org/sites/default/files/2021-03/05_Gabon%20Parks_Ag_Final%20prodoc_23.04.pdf f pg 75/76

30 Putting a price on our natural environment could give Africa the edge. <https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2021-05-19-putting-a-price-on-our-natural-environment-could-give-africa-the-edge/>

31 Lihat catatan kaki 3

32 NO to the Great Mayumba project. Declaration November 2021. <https://www.wrm.org.uy/action-alerts/gabon-communities-say-no-to-the-great-mayumba-project>

Founding Members of Markets for Natural Climate Solutions



BHP



IETA

Pada tahun 2019, di COP25 di Madrid, Asosiasi Perdagangan Emisi Internasional (IETA) mengadakan acara sampingan untuk meluncurkan inisiatif Markets for Natural Climate Solutions.

Foto: REDD Monitor

Antara Pencemaran Berat, Penyeimbangan Karbon, dan REDD+

Offsetting adalah gangguan berbahaya dari akar penyebab krisis iklim. Solusi yang salah ini adalah kebalikan dari reaksi awal industri minyak terhadap ilmu iklim: penolakan. Pencemar Besar tidak menciptakan perdagangan karbon. Tetapi mereka telah mendukung, melobi dan mempromosikan perdagangan karbon. Mereka juga merupakan pembeli utama karbon offset. Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian penggantian kerugian karbon oleh Big Polluters telah berubah dari tetesan kecil menjadi banjir - dan LSM konservasi termasuk di antara pemasok dan pendukung utama. Dukungan lembaga ini untuk perdagangan karbon juga datang dalam bentuk yang kurang terlihat.

Penolakan perubahan iklim dan **penyeimbangan karbon** memiliki tujuan yang sama - untuk memungkinkan Pencemar Besar terus mengambil untung dari bisnis seperti biasa selama mungkin.

Tetapi **penyeimbangan karbon** mungkin bahkan lebih berbahaya daripada penolakan perubahan iklim karena tampaknya mengakui bahwa krisis iklim itu nyata, dan memberi kesan bahwa pencemar besar mengambil tindakan untuk

mengatasinya.

Offsetting saat ini sedang booming. Namun lebih dari tiga dekade percobaan dengan perdagangan karbon mengungkapkan bahwa **penyeimbangan** adalah kegagalan besar. Dalam hal mengatasi krisis iklim, yaitu. **Offsetting** adalah gangguan berbahaya yang memungkinkan Pencemar Besar untuk melanjutkan bisnis seperti biasa.

Saat ini, lebih dari 1.500 perusahaan telah membuat komitmen '**net zero**'.¹ Hampir dua pertiga dari semua negara memiliki komitmen '**net zero**'. Namun komitmen ini "tidak lebih dari sebuah penipuan besar", seperti yang dicatat Sara Shaw dari Friends of the Earth International. Perusahaan Pencemar Besar berencana untuk terus mencemari, sambil berharap untuk membersihkan citra mereka dengan skema penggantian kerugian dan penanaman pohon.

Industri penerbangan telah mengembangkan skema perdagangan karbon yang disebut Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Di dalam skema ini, emisi akan meningkat tanpa batas dan industri penerbangan akan menggunakan **offset** untuk membenarkan dan membiarkan polusi yang berkelanjutan.

Perusahaan minyak dengan antusias melompat ke Solusi Iklim Alami (kadang-kadang disebut Solusi Berbasis Alam), dalam upaya untuk memberikan kesan bahwa mereka tiba-tiba peduli terhadap lingkungan.² Pada saat yang sama, mereka terus mengeksplorasi sumber keuntungan baru di beberapa ekosistem yang paling terancam punah di bumi.

Pada tahun 2019, CEO Shell Ben van Beurden mengumumkan bahwa "Kita perlu hutan hujan seperti Brasil di tempat lain." untuk mengatasi perubahan iklim melalui Solusi Iklim Alami tersebut.³

Perusahaan Total telah membeli **penyeimbangan** untuk menciptakan gas alam cair 'netral karbon' hayalan⁴ dan berencana untuk menghabiskan US100 juta dolar per tahun⁵ untuk perlindungan hutan dan penanaman pohon.⁶

Sementara itu perusahaan minyak dan gas Itali Eni berencana untuk menggunakan 8,1 juta hektar lahan di Afrika untuk **mengimbangi** emisi yang berkelanjutan⁷.

Perusahaan Big Tech juga telah bergabung, dengan Microsoft, Apple, Amazon, dan Facebook sdalam komitmen '**net zero**'.

Exxon sudah tahu

Solusi palsu untuk krisis iklim ini adalah sisi lain dari reaksi awal Pencemar Besar terhadap ilmu iklim adalah penolakan.

Pada tahun 2015, Inside Climate News melakukan investigasi selama delapan bulan tentang sejarah hubungan Exxon dan perusahaan minyak lainnya dengan ilmu iklim yang dimulai lebih dari 40 tahun yang lalu.⁸

Perusahaan minyak tidak hanya sudah tahu tentang sains, mereka juga terlibat

aktif dalam melakukan penelitian mutakhir tentang dampak pembakaran bahan bakar fosil terhadap iklim. Exxon, misalnya, menghabiskan lebih dari US1 juta dolar untuk proyek kapal tanker yang bertujuan untuk mengetahui berapa banyak CO₂ yang diserap oleh lautan.

Sejak tahun 1977, ilmuwan senior Exxon James Black mengatakan kepada komite manajemen Exxon bahwa,

“Pertama, ada kesepakatan ilmiah umum bahwa umat manusia mempengaruhi iklim global melalui pelepasan karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil.”

Dia memperingatkan bahwa menggandakan konsentrasi CO₂ di atmosfer akan meningkatkan suhu rata-rata global sebanyak dua atau tiga derajat. Dia mendesak Exxon untuk bertindak, dengan mengatakan bahwa kita memiliki “jendela waktu lima hingga 10 tahun sebelum keputusan sulit mengenai perubahan dalam strategi energi menjadi sangat mendesak”.

Alih-alih bertindak, Exxon menjadi pemimpin penolakan iklim. Sekitar satu dekade setelah memulai penelitiannya tentang perubahan iklim, Exxon mendorong kampanye untuk meragukan ilmu iklim dan menunda regulasi industrinya. Pada tahun 1989, Exxon adalah anggota pendiri Koalisi Iklim Global. GCC menghabiskan sekitar US1 juta dolar per tahun untuk melobi pembatasan emisi gas rumah kaca. Ini menentang Protokol Kyoto.

Seperti yang diungkapkan George Monbiot dalam bukunya tahun 2006 ‘Heat’, Exxon juga mendanai sekelompok besar organisasi yang berpendapat bahwa ilmu iklim nyata, pencinta lingkungan adalah Nazi, komunis, orang gila, teroris, atau penipuan, dan jika pemerintah mengambil tindakan terhadap perubahan iklim, ekonomi global akan runtuh.⁹

Industri minyak menggunakan taktik yang sama seperti industri tembakau yaitu harus menyangkal bahwa merokok menyebabkan kanker. Mereka bahkan menggunakan beberapa orang yang sama, seperti Frederick Seitz, yang merupakan ketua dari George C Marshall Institute.¹⁰ Seitz mendirikan¹¹ Institut George C Marshall pada tahun 1984, awalnya untuk mendukung Inisiatif Pertahanan Strategis Presiden Reagan, atau ‘Star Wars’. Pada akhir 1980-an, Institut beralih ke penyangkalan terhadap perubahan iklim – dengan dana besar dari Exxon.

Sebelum itu, Seitz adalah konsultan tetap untuk perusahaan tembakau RJ Reynolds di mana dia mendanai penelitian untuk “menyanggah kritik terhadap rokok”.

IPCC

Salah satu tanggapan aktivis iklim terhadap kampanye penolakan perubahan iklim, khususnya di Global North, adalah mengangkat publikasi Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) ke status di atas segala kemungkinan kritik. Di mata

Sementara UNFCCC telah berulang kali membahas mekanisme pasar, masalah meninggalkan bahan bakar fosil tetap di bawah tanah tetap menjadi agenda utama.

mereka, IPCC telah menjadi otoritas tunggal dalam segala hal yang berkaitan dengan ilmu iklim.

IPCC¹² adalah badan PBB, didirikan pada tahun 1988, dengan tujuan menguji ilmu pengetahuan seputar perubahan iklim. Lembaga ini memberi pemerintah informasi ilmiah agar pemerintah dapat mengembangkan kebijakan untuk mengatasi krisis iklim. IPCC telah menghasilkan serangkaian Laporan Penilaian yang komprehensif, yang pertama diterbitkan pada tahun 1992. Laporan terbaru keluar pada Agustus 2021.

Penilaian IPCC cenderung konservatif. Seperti yang ditunjukkan George Monbiot¹³, hal ini tidak mengejutkan mengingat banyaknya orang yang harus menyetujui penilaian IPCC sebelum dipublikasikan.

Namun, seperti yang ditunjukkan Larry Lohmann dalam bukunya 'Carbon Trading: A critical conversation on climate change, privatization and power'¹⁴, ada banyak hal yang terlewatkan dari laporan IPCC. Buku Lohmann diterbitkan pada tahun 2006, tetapi lebih relevan dari sebelumnya hari ini.

Lohmann mencatat bahwa sebelum IPCC mengeluarkan laporannya tentang 'Land Use, Land Use Change and Forestry' pada tahun 2000¹⁵, beberapa pemerintah, termasuk AS, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, telah mendorong untuk diizinkan untuk menghitung karbon yang tersimpan di lahan berhutan mereka terhadap emisi lanjutan dari pembakaran bahan bakar fosil. Banyak pemerintah Utara juga tertarik untuk membeli kredit karbon dari proyek-proyek yang mengurangi deforestasi di negara-negara tropis.



Net Zero Greenwash, Solusi Berbasis Alam, Buka 24 jam 7 hari seminggu hingga +3°; Pohon untuk Teknologi; Kredit REDD+. Ilustrasi: Ethan Cornell / Clara.earth

“Seharusnya tidak mengejutkan,” tulis Lohmann, “bahwa laporan IPCC memberi AS dan sekutunya kesimpulan yang mereka inginkan.” Tetapi untuk melakukannya, tulis Lohmann, laporan itu “mengabaikan standar dari ketelitian teknis”.

“Ribuan referensi peer-review yang relevan - tentang deforestasi, sejarah proyek pembangunan kehutanan, perlawanan petani, rezim hutan bersama, perilaku investor, dan sebagainya-telah hilang.”

Penulis IPCC berasumsi bahwa karbon yang disimpan sementara di pohon dan tanah adalah sama dengan karbon yang terkubur di bawah tanah dalam bahan bakar fosil. Namun dalam hal dampak terhadap iklim, keduanya tidak sama. Karbon dalam bahan bakar fosil tetap tersimpan dengan aman di bawah tanah dan hanya berinteraksi dengan atmosfer ketika diekstraksi dan dibakar.

Karbon yang tersimpan di pohon dan tanah hanya disimpan sementara dan dilepaskan ke atmosfer saat pohon mati, atau saat hutan ditebang, atau dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, atau saat hutan terbakar (yang semakin sering kita lihat seiring meningkatnya krisis iklim).

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan baru-baru ini dalam jurnal ‘Social Anthropology’¹⁶, Lohmann menjelaskan bagaimana para ilmuwan iklim PBB berperilaku seolah-olah bahan bakar fosil dan ekstraktivisme sama sekali tidak relevan dengan ilmu iklim:

“Pada tahun 2014, Sir John Houghton, anggota pendiri Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, memberikan wawancara yang menjelaskan bahwa ahli iklim PBB tidak diizinkan untuk menyebutkan karbon yang terkunci dalam bahan bakar fosil dalam analisis mereka tentang perubahan iklim, tetapi hanya karbon yang telah menjadi lebih mobile dalam bentuk CO₂. Memahami apa yang terjadi ketika atom karbon melintasi salah satu batas internal sistem geofisika bumi ke atmosfer adalah ‘sains’, kata Houghton. Tetapi untuk menganalisis pergerakan mereka menuju perbatasan tersebut ‘bukanlah pertanyaan ilmiah.’”

Dan sementara UNFCCC telah berulang kali membahas mekanisme pasar, masalah meninggalkan bahan bakar fosil tetap di bawah tanah tetap menjadi agenda utama. Kata ‘bahan bakar fosil’ tidak di munculkan dalam Perjanjian Paris.¹⁷

Para Pencemar Besar dan penyeimbangan karbon

Pencemar Besar (Big Polluters) memang tidak menciptakan perdagangan karbon. Namun mereka telah mendukung dan mempromosikan perdagangan karbon, dan Big Polluters adalah pembeli utama penggantian **kerugian karbon**. Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian **offset karbon** oleh Big Polluters telah berubah dari skala kecil menjadi skala besar.

Proyek **Penyeimbangan Karbon / offset** pertama di dunia adalah proyek wanatani di Guatemala¹⁸. Pendanaan tersebut berasal dari Applied Energy Services (AES), sebuah perusahaan listrik yang berbasis di AS, sebesar US\$2 juta. Mulai akhir 1980-an, AES mendanai penanaman pohon dalam proyek yang dijalankan oleh CARE

di Guatemala untuk **mengimbangi** emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara 181 MW baru yang dibangun AES di Connecticut.

Proyek di Guatemala gagal total.¹⁹ Hannah Wittman seorang Profesor di departemen Sosiologi dan Antropologi di Universitas Simon Fraser di British Columbia telah mempelajari dampak proyek penanaman pohon terhadap mata pencaharian petani. Wittman sering menemukan konflik penggunaan lahan. Ketika para petani mulai menanam pohon, semakin sedikit lahan yang tersedia untuk menanam pangan, yang mengakibatkan kekurangan pangan di daerah tersebut.

Kegiatan seperti mengumpulkan kayu bakar untuk memasak dikriminalisasi, yang mengakibatkan konflik hak atas pohon. Sepuluh tahun setelah proyek dimulai, evaluasi oleh Winrock International menemukan bahwa proyek penanaman pohon jatuh jauh di bawah apa yang dibutuhkan untuk target **offset** AES. Petani tidak menerima pembayaran langsung untuk penanaman pohon, dan banyak yang tidak menyadari bahwa pohon menyimpan karbon untuk **mengimbangi** pembangkit listrik tenaga batu bara AES.

Namun, Big Polluters tidak hanya mendanai proyek-proyek **penyeimbangan** untuk membersihkan operasi destruktif mereka.

Pembelian offset karbon oleh Big Polluters telah berubah dari skala kecil menjadi skala besar.

Pada tahun 1999, 11 pria dan satu perempuan mengadakan pertemuan di kantor pusat Shell. Ini adalah pertemuan pertama Asosiasi Perdagangan Emisi Internasional. IETA, yang didirikan oleh Big Polluters. Asosiasi ini telah melobi skema perdagangan pasar karbon sejak saat itu. IETA telah menempatkan afiliasinya pada delegasi negara pada negosiasi iklim PBB.

Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) juga terlibat dalam pembentukan IETA. Dari tahun 1990 hingga 1999, Frank Joshua adalah kepala Kelompok Pakar Internasional PBB tentang perdagangan Emisi. Setelah membantu menciptakan IETA, ia menjadi Direktur Eksekutif pertamanya.

IETA adalah salah satu asosiasi perdagangan yang paling terkemuka dan berpengaruh di UNFCCC. Anggota IETA mencakup bank, pedagang karbon, perusahaan konsultan, pengembang proyek, perusahaan minyak (termasuk BP, Chevron, Eni, Equinor, Shell, dan Total), perusahaan pertambangan, serta standar dan pendaftar karbon. IETA ada, “untuk memastikan bahwa kebijakan perubahan iklim tidak berdampak negatif terhadap keuntungan Pencemar Besar,” seperti yang ditunjukkan oleh laporan tahun 2018 oleh Corporate Accountability.²⁰

Jelas, tidaklah mengherankan jika Big Polluters melobi untuk gangguan berbahaya seperti perdagangan karbon. Namun mereka melakukannya dengan adanya dukungan dari beberapa organisasi berkedok lingkungan.

Sebagai contoh, pada tahun 2019, IETA meluncurkan Markets for Natural Climate Solutions selama negosiasi iklim PBB di Madrid.²¹ Anggota pendiri adalah empat perusahaan minyak dan gas (Shell, Chevron, BP, dan Woodside Energy); perusahaan pertambangan (BHP); dan organisasi penanaman pohon yang berbasis di AS (Arbor

Day Foundation).

Panel Penasehat IETA termasuk perwakilan dari Conservation International, Environmental Defense Fund, Earth Innovation Institute, dan The Nature Conservancy.

Memasuki Para Pencemar Besar Norwegia dan REDD+

Secara tidak langsung, dukungan untuk perdagangan karbon dari LSM juga datang.

Pada 27 September 2007, dua pria yang sama-sama bernama Lars mengirim surat kepada Jens Stoltenberg, perdana menteri Norwegia saat itu. “Belum terlambat: Selamatkan hutan hujan – selamatkan iklim!” adalah berita utama.

Surat itu datang dari Lars Løvold, direktur Rainforest Foundation Norwegia saat itu, dan Lars Haltbrekken, ketua Masyarakat Norwegia untuk Konservasi Alam (Friends of the Earth Norway).

Lars dan Lars meminta Stoltenberg untuk membelanjakan 1 miliar dolar AS setiap tahun selama lima tahun untuk melindungi hutan hujan sebagai cara mengatasi perubahan iklim. Mereka berpendapat bahwa uang itu tidak boleh digunakan untuk menciptakan mekanisme **penyeimbang karbon**, tetapi harus sebagai tambahan untuk mengurangi emisi.

Namun anehnya kemudian mereka mengundang Márcio Santilli dari organisasi Brasil Instituto Socioambiental untuk bertemu dengan politisi Norwegia dan mempromosikan ide mereka. Pada tahun 2005, Santilli kemudian menulis untuk kepentingan “perdagangan emisi karbon internasional untuk perlindungan hutan tropis”.²²

Pada 10 Desember 2007, pemerintah Norwegia mengumumkan bahwa mereka “siap untuk meningkatkan dukungannya untuk mencegah deforestasi di negara-negara berkembang menjadi sekitar tiga miliar kroner [sekitar US\$550 juta dolar] per tahun”.

Perdana Menteri Jens Stoltenberg mempresentasikan strategi Norwegia untuk mencegah deforestasi pada pertemuan di Oslo, bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup, Erik Solheim, dan Menteri Perminyakan dan Energi, slaug Haga. Industri minyak berada di belakang dukungan Norwegia untuk REDD sejak awal.²³

Pemerintah Norwegia memiliki dua pertiga saham di raksasa minyak Norwegia, Equinor. Hingga Juli 2021, saham tersebut dikelola oleh Kementerian Perminyakan dan Energi – kini telah dialihkan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.²⁴

Selama 30 tahun terakhir, Equinor telah mengebor lebih dari 100 sumur di utara Lingkaran Arktik. Perusahaan tidak memiliki rencana untuk berhenti dalam waktu dekat. Perusahaan ini menyatakan di situs webnya, “Produksi minyak dan gas di wilayah utara akan menjadi kontributor penting untuk mengamankan pasokan untuk permintaan energi global yang terus meningkat.”²⁵

Sejak awal, industri minyak Norwegia terlibat dalam rencana Norwegia untuk menyelamatkan hutan hujan. Ini adalah isi perut dari program REDD – menggunakan hutan hujan untuk membersihkan pengeboran dan polusi yang berkelanjutan.

Pada 13 Desember 2007, Stoltenberg berada di Bali untuk negosiasi iklim PBB (COP 13). Dalam pidatonya di konferensi iklim, Stoltenberg memberi tahu kami bahwa menghentikan deforestasi akan cepat dan murah²⁶:

“Melalui langkah-langkah efektif melawan deforestasi, kita dapat mencapai pengurangan besar dalam emisi gas rumah kaca – dengan cepat dan dengan biaya rendah. Teknologi ini terkenal dan telah tersedia selama ribuan tahun. Semua orang tahu bagaimana tidak menebang pohon.”

Stoltenberg tidak ragu lagi bahwa dia mengusulkan mekanisme perdagangan karbon untuk menyelamatkan hutan hujan:

“Untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan, kita perlu memberi harga pada karbon. Kemudian kami menciptakan insentif untuk berperilaku ramah iklim. Kemudian kami membuat pencemar membayar emisi mereka. Oleh karena itu kita harus menciptakan sistem global perdagangan karbon dan pajak CO₂.”

Bank Dunia juga meluncurkan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan pada COP 13 di Bali. Benoît Bosquet, spesialis manajemen sumber daya alam senior di Bank Dunia memimpin pengembangan FCPF dan menjadi koordinator FCPF dari 2008 hingga 2014. “Tujuan akhir fasilitas ini adalah untuk memulai pasar karbon hutan yang memberi tip pada keseimbangan ekonomi, mendukung pelestarian hutan,” kata Bosquet dalam pernyataan Bank Dunia tentang peluncuran FCPF di Bali.²⁷

BP Technology Ventures Inc. meningkatkan dana US5 juta dolar untuk FCPF, seperti yang dilakukan The Nature Conservancy. Selama bertahun-tahun, sebagian besar pendanaan FCPF berasal dari pemerintah Norwegia, Jerman, dan Inggris.

Meskipun mengumpulkan lebih dari 1 miliar dolar AS, FCPF telah “terbukti menjadi cara yang sangat tidak efektif untuk mengurangi deforestasi, dengan biaya administrasi yang sangat besar dan tidak menunjukkan apa pun untuk mencegah deforestasi,” seperti komentar anonim tahun 2017 di situs web REDD-Monitor dicatat.²⁸

Melegitimasi offset

Baru-baru ini ada banyak diskusi tentang ‘meluruskan arah REDD’. Misalnya, perusahaan penyeimbang Finlandia, Compensate, berpendapat bahwa 91% dari proyek yang telah dilihatnya gagal dalam proses evaluasinya.²⁹ Sebuah perusahaan rintisan bernama Sylvera mengatakan bahwa hampir setengah dari proyek REDD yang dilihatnya “gagal”.³⁰ Dan portal berita Bloomberg Green telah melaporkan bagaimana proyek **penggantian kerugian hutan** The Nature Conservancy di AS sebenarnya tidak terancam deforestasi. The Nature Conservancy telah menjadi “penyalur penyeimbangan karbon yang tidak berarti”, tulis Bloomberg Green.

Tapi argumen ini melegitimasi **penyeimbangan karbon** karena memberi kesan bahwa 9% sisanya, atau 50% entah bagaimana adalah **pengimbangan** sebenarnya”. Bloomberg Green berpendapat bahwa “Secara ilmiah, itu [pengimbangan karbon] masuk akal.” Implikasinya adalah bahwa **penyeimbangan** hanya membutuhkan regulasi lebih banyak (atau lebih baik).

Kenyataannya adalah bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengatasi fakta bahwa bukan hanya beberapa **offset** (yang buruk, yang tidak berarti) yang menunda aksi iklim. Masalahnya adalah konsep **offset** yang selama beberapa dekade berhasil menunda tindakan yang berarti terhadap krisis iklim. Perusahaan minyak bahkan membeli **penyeimbangan karbon** untuk menciptakan bahan bakar fosil yang “netral karbon”. Yang jelas-jelas omong kosong.

Penyeimbangan, REDD, dan Solusi Iklim Alami menjadi alat yang sempurna bagi Pencemar Besar yang memberi kesan seolah mengambil tindakan memperbaiki iklim, sambil membiarkan ekstraktivisme destruktif mereka terus berlanjut.

Chris Lang

[REDD-Monitor.org](https://redd-monitor.org)

- 1 REDD-Monitor: <https://redd-monitor.org/tag/net-zero/>
- 2 REDD-Monitor: <https://redd-monitor.org/tag/natural-climate-solutions/>
- 3 REDD-Monitor, Shell boss says “Another Brazil in terms of rainforest” is needed to address climate change. Meanwhile, Shell continues to profit from fossil fuels, 2019, <https://redd-monitor.org/2019/03/22/shell-boss-says-another-brazil-in-terms-of-rainforest-needed-to-address-climate-change-meanwhile-shell-continues-to-profit-from-fossil-fuels/>
- 4 REDD-Monitor, How Total’s fantasy of carbon neutral fossil fuel is helped by offsets from the Kariba REDD+ Project in Zimbabwe, 2021, <https://redd-monitor.org/2021/08/18/how-totals-fantasy-of-carbon-neutral-fossil-fuel-is-helped-by-offsets-from-the-kariba-redd-project-in-zimbabwe/>
- 5 REDD-Monitor, Total greenwash: Total CEO announces oil company will spend US\$100 million a year on forest protection and reforestation, 2019, <https://redd-monitor.org/2019/10/23/total-greenwash/>
- 6 REDD-Monitor, Anatomy of a ‘Nature-Based Solution’: Total oil, 40,000 hectares of disappearing African savannah, Emmanuel Macron, Norwegian and French ‘aid’ to an election-rigging dictator, trees to burn, secret contacts, and dumbstruck conservationists, 2021, <https://redd-monitor.org/2021/04/16/anatomy-of-a-nature-based-solution-total-oil-40000-hectares-of-disappearing-african-savannah-emmanuel-macron-norwegian-and-french-aid-to-an-election-rigging-dictator-trees/>
- 7 REDD-Monitor, Oil company Eni plans 8.1 million hectare land grab in Africa for carbon offset plantations, 2019, <https://redd-monitor.org/2019/03/17/oil-company-eni-plans-8-1-million-hectare-land-grab-in-africa-for-carbon-offset-plantations/>
- 8 Inside Climate News, Exxon. The Road Not Taken, <https://insideclimatenews.org/project/exxon-the-road-not-taken/>
- 9 The Guardian, The denial industry, 2006, <https://www.theguardian.com/environment/2006/sep/19/ethicalliving.g2>
- 10 James L Powell, The Inquisition of Climate Science, Columbia University Press, 2021,

- <https://cup.columbia.edu/book/the-inquisition-of-climate-science/9780231157193>
- 11 Science Progress, Distorting Science While Invoking Science, 2010, <https://web.archive.org/web/20100919104142/http://www.scienceprogress.org/2010/08/distorting-science-while-invoking-science-2/>
- 12 BBC News, Climate change: UN to reveal landmark IPCC report findings, 2021, <https://www.bbc.com/news/science-environment-58141129>
- 13 George Monbiot, The Heat of the Moment, 2012, <https://www.monbiot.com/2012/08/27/the-heat-of-the-moment/>
- 14 The CornerHouse, Carbon Trading. A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power, 2006, <http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/carbon-trading-0>
- 15 IPCC, Land Use, Land-Use Change, and Forestry, 2000, <https://www.ipcc.ch/report/land-use-land-use-change-and-forestry/>
- 16 The CornerHouse, White Climate, White Energy. A Time for Movement Reflection?, 2020, <http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/white-climate-white-energy>
- 17 REDD-Monitor, COP21 Paris: REDD and carbon markets, 2015, <https://redd-monitor.org/2015/12/15/cop21-paris-redd-and-carbon-markets/>
- 18 REDD-Monitor, REDDheads: Sheryl Sturges and a coal-fired power plant in the USA “offset” by tree planting in Guatemala, 2016, <https://redd-monitor.org/2016/12/11/reddheads-sheryl-sturges-and-a-coal-fired-power-plant-in-the-usa-offset-by-tree-planting-in-guatemala/>
- 19 Idem 18
- 20 Corporate Accountability, Primer: IETA, Big Polluters, and the UNFCCC, https://www.corporateaccountability.org/wp-content/uploads/2018/04/CA_Bonn_Cop24_2018_webEN.pdf
- 21 REDD-Monitor, Launched at COP25, IETA’s Markets for Natural Climate Solutions is greenwash for the oil industry, 2019, <https://redd-monitor.org/2019/12/11/launched-at-cop25-ietas-markets-for-natural-climate-solutions-is-greenwash-for-the-oil-industry/>
- 22 Santilli, M., Moutinho, P., Schwartzman, S. et al. Tropical Deforestation and the Kyoto Protocol. *Climatic Change* 71, 267–276 (2005). <https://doi.org/10.1007/s10584-005-8074-6>
- 23 REDD-Monitor, Norway’s oil industry has been right behind REDD from the start, 2018, <https://redd-monitor.org/2018/12/07/norways-oil-industry-has-been-right-behind-redd-from-the-start/>
- 24 Regjeringen flytter Equinor og Petoro til Næringsdepartementet: – Har jobbet med dette i over ett år, <https://e24.no/boers-og-finans/i/6zmOVO/regjeringen-flytter-equinor-og-petoro-til-naeringsdepartementet-har-jobbet-med-dette-i-over-ett-aar>
- 25 Equinor, <https://www.equinor.com>

- 26** Tale til FNs klimakonferanse på Bali, <https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/smk/taler-og-artikler/2007/Tale-til-FNs-klimakonferanse-pa-Bali/id493899/>
- 27** Forest Carbon Partnership Facility Takes Aim at Deforestation, 2007, <https://archive.is/BDXmG#selection-659.0-659.61>
- 28** REDD-Monitor, The most cost-inefficient tree-saving scheme ever: The Forest Carbon Partnership Facility, 2017, <https://redd-monitor.org/2017/03/29/the-most-cost-inefficient-tree-saving-scheme-ever-the-forest-carbon-partnership-facility/>
- 29** REDD-Monitor, Finnish carbon offsetting firm Compensate finds 91% of carbon offset projects fail its evaluation process. Of course the remaining 9% will also not help address the climate crisis, 2021, <https://redd-monitor.org/2021/08/11/finnish-carbon-offsetting-firm-compensate-finds-91-of-carbon-offset-projects-fail-its-evaluation-process-of-course-the-remaining-9-will-also-not-help-address-the-climate-crisis/>
- 30** Bloomberg Green, Startup That Rates Carbon Offsets Finds Almost Half Fall Short, 2021, <https://archive.ph/wdhGh#selection-3669.0-3669.62>

Bacaan yang Direkomendasikan

1. “Solusi Berbasis Alam”: Menyembunyikan Perampokan Tanah Besar-besaran

<https://wrm.org.uy/bulletins/issue-255/>

2. Apa hubungan hutan dengan perubahan iklim, pasar karbon, dan REDD+?

<https://www.wrm.org.uy/publications/what-do-forests-have-to-do-with-climate-change-carbon-markets-and-redd>

3. Pernyataan: Katakan Tidak untuk Perampasan berkedok Solusi Berbasis Alam!

<https://www.wrm.org.uy/id/declarations/statement-no-to-nature-based-solutions>

4. Golpe Verde – Falsas Soluções para o desastre climático

Tersedia dalam bahasa Portugis (<https://cimi.org.br/2022/02/golpeverde/>)

5. Mengimbangi: netral terhadap iklim melalui perlindungan hutan? Penilaian klaim ‘netral iklim’ terkait dengan kawasan Tambopata: proyek REDD di konsesi kacang Brazil di Madre de Dios, Peru. Foodwatch

https://www.foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Windbeutel/Bilder/2021/Dokumente/foodwatch2021_Tambopata-offset-project_Assessment.pdf

6. Lihat situs web REDD-Monitor untuk informasi lebih lanjut dalam bahasa Inggris

<https://redd-monitor.org/>

